



Pemerintah
Kab. Bandung Barat

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN
2022

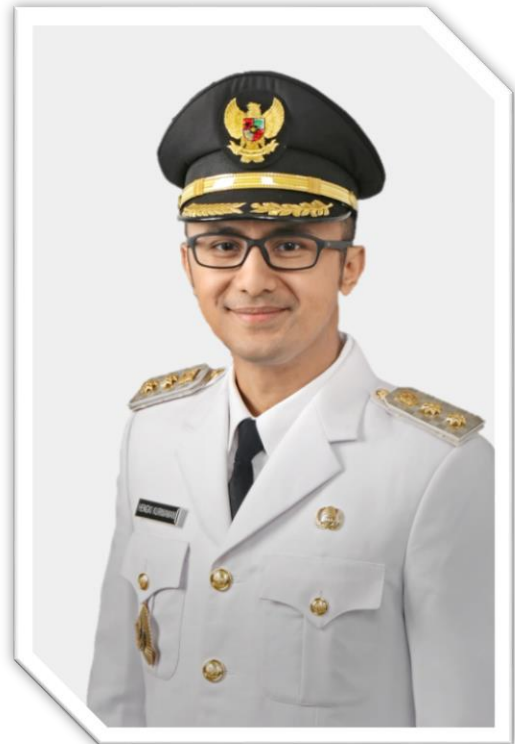


BUPATI BANDUNG BARAT
Hengki Kurniawan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah dalam upaya menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, mulai dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dan berharap semoga Laporan Kinerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat oleh Pemerintah Pusat, sekaligus sebagai evaluasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bandung Barat, 30 Maret 2023

BUPATI BANDUNG BARAT



HENGKI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Bagan.....	ix
Ikhtisar Eksekutif	x
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan dan Isu-isu Streategis Daerah.....	3
1.2.1. Permasalahan Pembangunan.....	3
1.2.2. Isu Strategis.....	4
1.2.2.1 Isu Internasional.....	4
1.2.2.2 Isu Kebijakan Nasional.....	8
 BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Rencana Strategis.....	23
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	24
2.3. Visi Dan Misi Kabupaten Bandung Barat	27
2.4. Tujuan dan Sasaran	31
2.5. Perjanjian kinerja.....	34
 BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	43
Tujuan 1 Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	44
Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan	46
Sasaran 2 Meningkatkan Minat Budaya Baca	57
Tujuan 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Yang Dijangkau Oleh Seluruh Masyarakat.....	61
Sasaran 3 Meningkatkan kualitas Layanan Kesehatan .	62
Tujuan 3 Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Non Dasar Lainnya.....	73
Sasaran 4 Terwujudnya Ketahanan Pangan	74
Sasaran 5 Meningkatkan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.....	80
Sasaran 6 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	84
Sasaran 7 Meningkatkan Sinergitas dan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	93
Sasaran 8 Mewujudkan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Kelompok Masyarakat	102

Tujuan 4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.....	108
Sasaran 9 Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Lembaga Masyarakat.....	109
Sasaran 10 Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat.....	114
Sasaran 11 Terwujudnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak.....	120
Tujuan 5 Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berkelanjutan	133
Sasaran 12 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	134
Sasaran 13 Meningkatnya Investasi PMDN	154
Sasaran 14 Meningkatnya Partisipasi Tenaga Kerja Setempat Di Kegiatan Ekonomi Yang Ada ...	167
Sasaran 15 Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi, Usaha Mikro, Wirausaha dan Ekonomi Kreatif.....	177
Tujuan 6 Meningkatkan Kualita dan Kuantitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial.....	185
Sasaran 16 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Ekonomi, Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan Di Pedesaan Melalui Alternatif Skema Pembiayaan.....	186
Sasaran 17 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sosial	190
Tujuan 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	194
Sasaran 18 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	194
Tujuan 8 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik..	199
Sasaran 19 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	199
Tujuan 9 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	210
Sasaran 20 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ...	211
3.2 Pengukuran Kinerja.....	214
3.3 Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja.....	218
BAB IV PENUTUP	223

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Prestasi Kabupaten Bandung Barat;
4. Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah;
5. SK TIM Penyusun LAKIP.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.2 Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat.....	18
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat	25
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	31
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan 2022.....	36
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja 2022	43
Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan.....	45
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan	46
Tabel 3.4 Rekapitulasi Capaian HLS.....	48
Tabel 3.5 Rekapitulasi Capaian RLS.....	48
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Meningkatkan Minat Budaya Baca.....	58
Tabel 3.7 Capaian Indikator Tujuan.....	62
Tabel 3.8 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan.....	63
Tabel 3.9 Capaian Indikator Tujuan.....	73
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan.....	75
Tabel 3.11 Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.....	81
Tabel 3.12 Capaian Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat...	85
Tabel 3.13 Rekapitulasi Pelanggaran Perda Tahun 2022.....	87
Tabel 3.14 Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	96
Tabel 3.15 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	97
Tabel 3.16 Capaian Sasaran mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat.....	104
Tabel 3.17 Capaian Indikator Tujuan.....	109
Tabel 3.18 Capaian Sasaran Terwujudnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak.....	110
Tabel 3.19 Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	115
Tabel 3.20 Capaian Sasaran Terwujudnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak.....	121
Tabel 3.21 Perbandingan Tren IPG Kabupaten Bandung	

Barat terhadap Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2022.....	124
Tabel 3.22 Perbandingan Tren IPG Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terhadap Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2022.....	125
Tabel 3.23 Hasil perolehan nilai Kabupaten/Kota layak Anak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.....	129
Tabel 3.24 Capaian Sasaran Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggul.....	135
Tabel 3.25 Capaian Jumlah Produksi Pertanian Tahun 2022.....	137
Tabel 3.26 Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata.....	152
Tabel 3.27 Capaian Sasaran Meningkatnya investasi PMDN.....	155
Tabel 3.28 Tabel Nilai investasi PMDN dan Jumlah Investor PMDN Tahun 2022.....	157
Tabel 3.29 Nilai Investasi Pre Sektor Tahun 2022.....	158
Tabel 3.30 Capaian Sasaran Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada.....	168
Tabel 3.31 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2022.....	170
Tabel 3.32 Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatifCapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif.....	178
Tabel 3.33 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2019–2022.....	180
Tabel 3.34 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Ekonomi, Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan di Pedesaan.....	187
Tabel 3. 35 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sosial.....	190
Tabel 3. 36 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	195
Tabel 3. 37 Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien.....	201
Tabel 3. 38 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	212
Tabel 3. 39 Pencapaian Kinerja Sasaran Per Indikator Tahun 2022.....	214
Tabel 3. 40 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	215
Tabel 3. 41 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022.....	219
Tabel 3. 42 Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022.....	220

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1 Perkembangan Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2017-2022.....	77
Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang Telaporkan Tahun 2020,2021, dan 2022.....	86
Grafik 3.3 Indeks Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.....	97

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.....	10
Gambar 1.2 Transformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik.....	17
Gambar 3.1 Website PETADIK.....	53
Gambar 3.2 Youtube Manik Disdik KBB.....	54
Gambar 3.3 Instagram Manik Disdik KBB.....	55
Gambar 3.4 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.....	55
Gambar 3.5 Tim MANIK Dinas Pendidikan.....	56
Gambar 3.6 Kegiatan MANIK.....	56
Gambar 3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis kelamin.....	171
Gambar 3.8 Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.....	196

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1.1 Konektivitas Antar Pilar Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	7
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Ngamprah
Email : inspektorat@bandungbaratkab.go.id Web : [Http://www.bandungbaratkab.go.id](http://www.bandungbaratkab.go.id)

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandung Barat, 29 Maret 2023

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Drs. YADI AZHAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691130 199010 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, bahwa Visi Kabupaten Bandung Barat adalah:

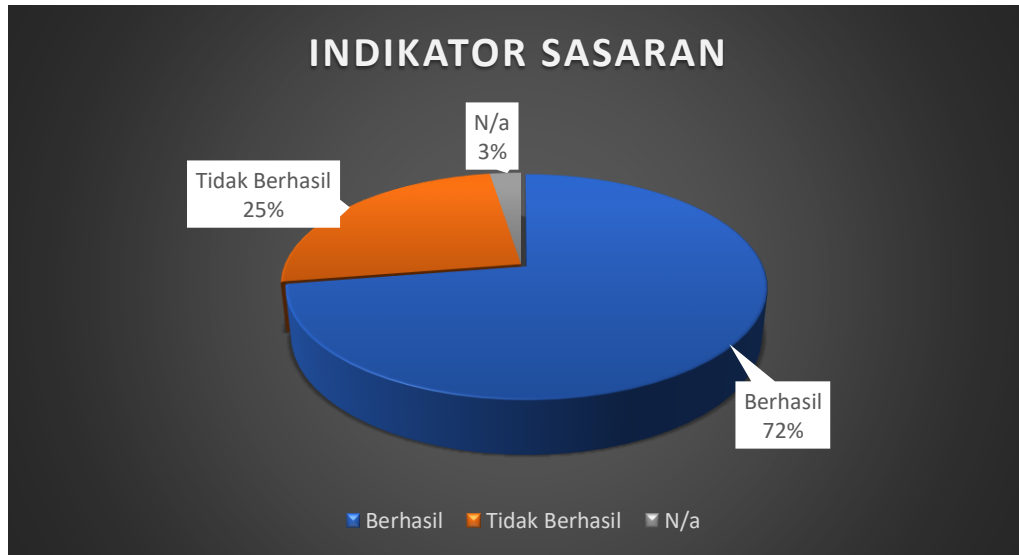
“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”.

Pada Tahun 2022 merupakan tahun ke-4 dari implementasi RPJMD, secara umum Kabupaten Bandung Barat telah dapat melaksanakan berbagai misi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil reviu RPJMD yang telah ditetapkan melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023**, Visi KBB dijabarkan ke dalam 4 misi, 9 tujuan, dan 20 sasaran. Dari jumlah sasaran tersebut, terdapat 40 indikator sasaran yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ditambah dengan kegiatan yang bersifat rutin dan insidentil dengan perencanaan biaya oleh anggaran belanja tidak langsung.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bandung Barat ini dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian $\geq 85\%$ “berhasil” dan $\leq 85\%$ “tidak berhasil”.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 20 (Dua Puluh) sasaran strategis yang mencakup 40 indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022, diperoleh **sebanyak 14**

sasaran dinyatakan “berhasil”, 6 sasaran dinyatakan “tidak berhasil” dengan kondisi 1 (satu) indikator belum memiliki hasil capaian realisasi (N/A) dikarenakan masih dalam proses penghitungan.



Untuk mencapai visi Kabupaten Bandung Barat kedepan, yaitu **“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”**. Diperlukan komitmen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 dinilai berhasil. Hal ini dilihat dari capaian indikator sasaran pada setiap Misi:

- Capaian pada misi pertama, ditetapkan 11 sasaran dengan 19 indikator kinerja. Sebanyak 13 indikator dinyatakan “berhasil”, 6 indikator “tidak berhasil”.
- Capaian pada misi kedua, ditetapkan 4 Sasaran dengan 13 Indikator kinerja. Sebanyak 9 indikator dinyatakan “berhasil” dan 4 indikator “tidak berhasil”;

- Capaian pada misi tiga, ditetapkan 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja. Sebanyak 2 indikator kinerja dinyatakan “berhasil” dan 1 indikator “tidak berhasil”;
- Capaian pada misi keempat, ditetapkan 2 Sasaran dengan 5 Indikator kinerja. Dimana seluruh indikator kinerja dinyatakan “berhasil”.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 5.674.794.053.542,00 atau **91,84%** dari pagu sebesar Rp. 6.179.021.871.131,00. Hal tersebut menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berbanding lurus jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja. Efisiensi tersebut berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran,

dengan demikian LAKIP Kabupaten Bandung Barat menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden.

Adapun Dalam pelaksanaan RPJMD selama beberapa tahun sejak ditetapkannya Perda RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 akan mengubah banyak kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 menuntut adanya keseragaman perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sedangkan pada tingkat nasional telah ditetapkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023. Alasan lain perlu dilakukannya perubahan RPJMD adalah perubahan diakibatkan adanya pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan dampak luar biasa pada tatanan dunia, seperti sektor kesehatan, ekonomi dan sektor lainnya. Perekonomian terkontraksi sangat besar sehingga berbagai kajian memprediksi pertumbuhan ekonomi akan sangat melambat.

Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, penyusunan LAKIP tahun 2022 menyesuaikan dengan substansi RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum dan kondisi daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini:

1. Kondisi keuangan dan kerangka pendanaan;
2. Permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Covid-19;
3. Target, indikator, tujuan, dan sasaran;
4. Strategi dan arah kebijakan;
5. Program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya;
6. IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah, target kinerja dan indikator kinerja program.

1.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

1.2.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan adalah adanya perbedaan atau gap antara kondisi yang diinginkan atau direncanakan, dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Hal ini tidak terlepas dengan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 menambah tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan, dampak yang dihasilkan dari pandemi mempengaruhi stabilitas dari

beberapa sektor sehingga perlu penanganan yang intensif dan simultan. Oleh karena itu tahap identifikasi masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Dalam hal pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, permasalahan disini adalah perbedaan atau gap antara rencana pembangunan dengan kondisi yang dicapai sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan. Permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek mulai dari aspek fisik dan lingkungan, sosial kependudukan, hingga aspek infrastruktur.

1.2.2 Isu Strategis

1.2.2.1 Isu Internasional

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga

peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Milenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Melalui deklarasi MDGs isu yang dibangun dan harus dicapai pada tahun 2015 adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Menindak lanjuti hal tersebut, munculah Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni :

1. mengakhiri kemiskinan;
2. mengatasi dan menekan kesenjangan; dan
3. mengatasi perubahan iklim.



Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

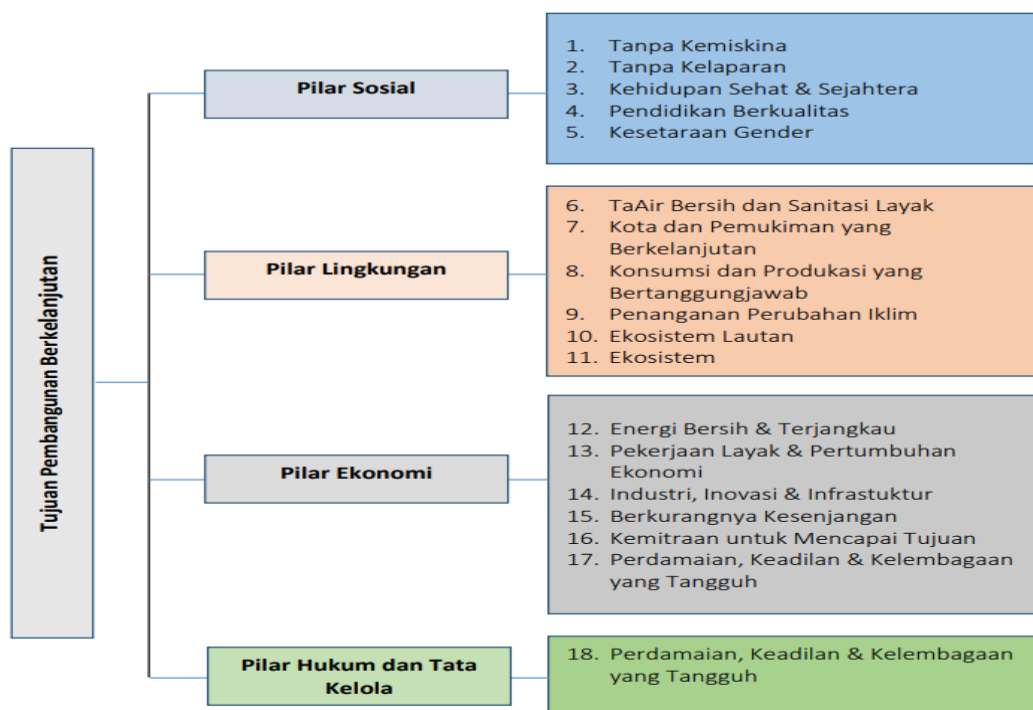
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara

- lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan pembangunan berkelanjutan di atas, berikut adalah konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:

Bagan 1.1

Konektivitas antar pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka DNA SDGs harus padat diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten / Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

1.2.2.2 Isu Kebijakan Nasioanal

A. RPJP Nasional 2005 – 20225

Visi pembangunan Indonesia Jangka Panjang sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, ialah “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”. Sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005-2025 ialah sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.

Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan IPTEK sebagai salah satu penunjang keberhasilan.

B. RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Gambar 1.1
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2023 juga memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan beberapa program proyek prioritas nasional yang berhubungan dengan Kabupaten Bandung Barat. Peninjauan ini dibutuhkan untuk melihat sinkronisasi program nasional dengan kemampuan RTRW Kabupaten Bandung Barat dalam merespon deregulasi di level Nasional. Beberapa program yang disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa Terpadu;
2. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Bandung (Cekungan Bandung).

C. Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023

Merujuk pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023, visi Pembangunan Jawa Barat pada periodewaktu yang sama adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Visi ini memiliki makna yaitu :

1. Jabar Juara Lahir Batin Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri;

2. Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan;
3. Kolaborasi Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Pada lingkup Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat mengenai beberapa hal yang menjadi isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
5. Reformasi birokrasi.

D. Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat 2019-2023

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Perumusan isu strategis

didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi-misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Bandung Barat; (2) Dinamika nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bandung Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bandung Barat; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Bandung Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (Lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat yaitu:

1. Perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Kesejahteraan dan Ketimpangan serta Permasalahan Sosial;
3. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Dan Pengurangan Risiko Dampak Bencana;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan;
5. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Memperhatikan isu-isu strategis tersebut di atas, berikut deskripsi dan justifikasi terkait isu-isu tersebut, adalah:

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas merupakan beberapa dari banyak dampak yang dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kinerja pemerintah

yang kurang optimal juga dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia di dalam lingkungan pemerintahan. Yang dimaksud kualitas sumber daya manusia disini meliputi kualitas dalam hal kemampuan berpikir dan berinisiasi (kualitas intelektual); kualitas spiritual (termasuk didalamnya adalah sikap yang baik dan prinsip dalam mempertahankan nilai-nilai kebaikan); dan kualitas fisik atau kesehatan. Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah adalah tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu masalah di Kabupaten Bandung Barat adalah mengenai masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada angka partisipasi penduduk untuk sekolah menengah, terutama sekolah menengah atas masih rendah. Sehingga sebagian besar penduduk hanya mendapat pendidikan sampai dengan tamat sekolah dasar, bahkan sebagian tidak tamat sekolah dasar. Hal ini menjadi masalah karena dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan formal dan pada akhirnya akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan. Selain mengenai tingkat pendidikan masyarakat, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah aspek kesehatan masyarakat. Sejak awal Tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara di 34 provinsi, 482 kabupaten/kota di Indonesia (sumber: www.COVID19.go.id).

Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, antara lain:

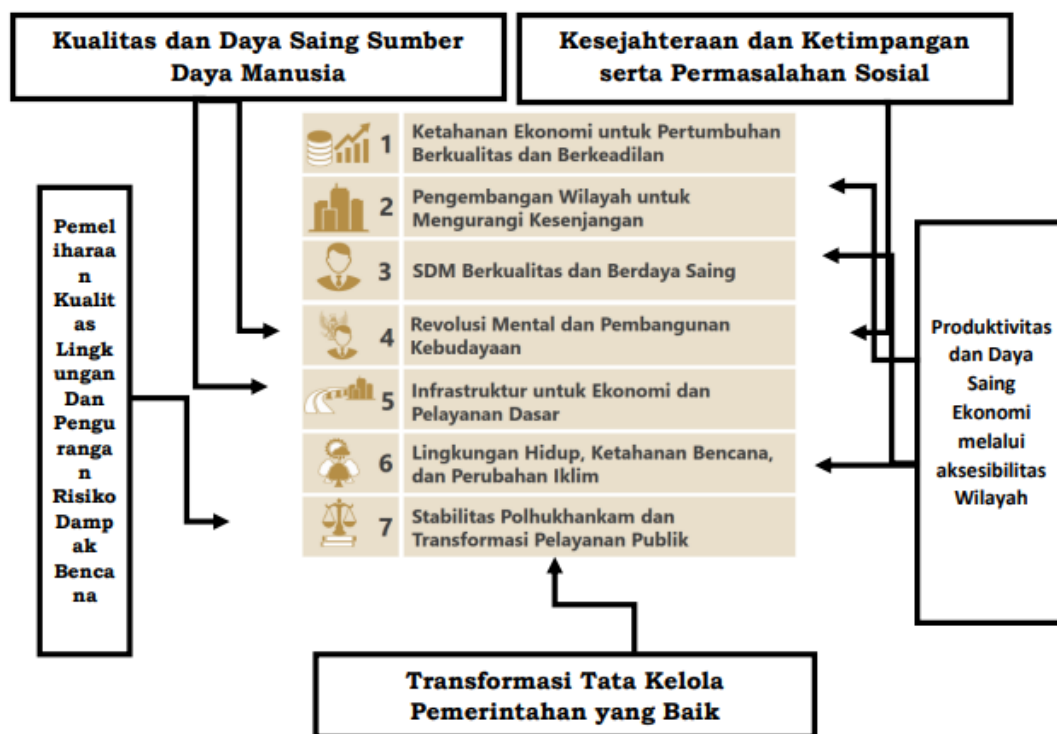
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan 12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (social distancing) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (travel ban), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (demand) maupun dari sisi penawaran (supply). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Meski tahun 2022 tren penyebaran pandemin Covid 19 telah berangsur menurun, namun

sektor perekonomian masih belum sepenuhnya stabil, oleh karena itu Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk memulihkan ekonomi dampak dari Pandemi Covid 19.

Gambar 1.2
Transformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik



Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat dan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

Keterkaitan isu strategis kabupaten bandung barat dan 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa ada relevansi antara isu strategis dan agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 kecuali isu terkait dengan pandemi Covid-19. Ada keselarasan isu antara perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dan Nasional, sehingga pemerintah pusat mudah mengimplemeatasikan program dan kegiatannya ke Kabupaten Bandung Barat karena program kegiatannya inline (seiring) dengan

program dan kegiatan di pusat dan selanjutnya isu strategis akan diturunkan dalam bentuk agenda pembangunan pada bab selanjutnya.

Tabel 1.2 Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat

ISU STRATEGIS KBB	ISU STRATEGIS JABAR
Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
Kesejahteraan dan Ketimpangan serta Permasalahan Sosial	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial
Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Dan Pengurangan Risiko Dampak Bencana	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Reformasi birokrasi

Sumber: Rancangan akhir Perubahan RPJMD KBB Tahun 2019-2023

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat relevan, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat relatif sama dengan permasalahan di Provinsi Jawa Barat.

B. Kesejahteraan dan Ketimpangan serta Permasalahan Sosial

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Demikian juga dengan Kabupaten Bandung Barat, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, masih rendah yang

ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain disekitarnya.

Kemiskinan akan membatasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, air bersih dan tempat tinggal yang layak. Merupakan kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakatnya untuk dapat hidup sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu peningkatan kemampuan ekonomi dengan penambahan pendapatan, dan juga pengurangan pengeluaran. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan peningkatan ketrampilan, pemberian bantuan modal, dan pemberdayaan yang lain. Adapun yang dimaksud dengan pengurangan pengeluaran meliputi subsidi dan pemberian bantuan.

C. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan

Aksesibilitas yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat, serta mendukung pelayanan publik lain di suatu daerah. Sebaliknya, sulitnya akses antara pusat pelayanan dan daerah layanannya, serta satu daerah ke daerah lain akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga menyulitkan masyarakat ketika akan mengakses pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan. Aksesibilitas dalam hal ini meliputi prasarana dan sarana transportasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya 38% jalan di Kabupaten Bandung Barat yang dalam kondisi baik, 24% dalam kondisi sedang dan sisanya mengalami kerusakan ringan dan berat. Dalam hal sarana transportasi yaitu angkutan umum di Kabupaten Bandung Barat juga masih perlu ditingkatkan. Dengan membaiknya aksesibilitas di Kabupaten Bandung Barat masyarakat akan lebih mudah menjangkau pusat-pusat aktifitas, baik untuk mengakses

pasar (untuk memasarkan dan belanja bahan baku), dan untuk mendapatkan pelayanan umum. Terbukanya aksesibilitas juga memudahkan distribusi barang dan jasa ke wilayahwilayah terkecil. Gagasan untuk mendorong perkembangan agrowisata di Kabupaten Bandung Barat juga perlu didorong dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Dengan demikian masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah akan lebih mudah menjangkau kawasan-kawasan agrowisata yang berkembang di Kabupaten Bandung Barat.

D. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Dan Pengurangan Risiko Dampak Bencana

Kabupaten Bandung Barat dengan alamnya yang indah telah menarik banyak orang untuk datang dan berwisata. Sebagian besar obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat berbasis wisata alam dan agrowisata. Fakta tersebut menjadi salah satu alasan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung Barat untuk selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan keindahan alamnya. Selain untuk mendukung potensi wisata, upaya pelestarian lingkungan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang dan mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan. Sebagian lahan di Kabupaten Bandung Barat merupakan lahan dengan peruntukan lindung dan penyangga. Untuk itu pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus dikendalikan dan diawasi dengan ketat untuk mencegah pembangunan berlebihan di kawasan dengan peruntukan lahan penyangga dan terlebih lagi di kawasan lindung. Berkurangnya lahan konservasi berpotensi untuk menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, ketersediaan air tanah juga akan terdampak oleh berkurangnya luasan daerah serapan. Dampak

dari kerusakan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat, terutama dengan berkurangnya luasan lahan lindung dan pembangunan berlebihan di lahan penyangga tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, melainkan juga akan dirasakan masyarakat di daerah sekitarnya, selain bencana yang berpotensi terjadi sebagai akibat dari kerusakan lingkungan, masyarakat Kabupaten Bandung Barat juga dihadapkan dengan potensi bencana alam gempa bumi karena berada di daerah patahan sesar Lembang. Untuk itu pembangunan di daerah berpotensi bencana juga perlu dibatasi.

E. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang termasuk dalam kategori baru, sehingga Kabupaten Bandung Barat perlu dan penting untuk terus melakukan transformasi segala aspek dalam urusan pemerintahannya. Khususnya transformasi tata kelola pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan dasar untuk menjalankan segala urusan pemerintahan. Dengan demikian, dengan tidak adanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, maka urusan pemerintahan yang lainnya dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah isu strategis terkait transformasi tata kelola pemerintahan:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Transformasi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pelayanan publik yang secara optimal;
4. Peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Keberadaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah terbentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun pada perkembangannya terbit berbagai kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang baru terkait perangkat daerah, berimplikasi pada penataan susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki 22 Dinas, 6 Badan serta terdiri dari 16 Kecamatan pada tahun 2022. Untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai salah satu dasar hukum Perangkat Daerah dalam mendukung seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat 2018-2023, dimana LAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 merupakan pengukuran tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah terpilih. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif

dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam rangka penyempurnaan pengukuran kinerja sasaran Perubahan RPJMD, maka mulai Tahun 2020 sampai 2023 dilakukan penyesuaian IKU pemerintah daerah dan targetnya dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Penetapan IKU tersebut telah dipilih dan disesuaikan dengan isu strategis yang ada

serta visi misi kepala daerah terpilih dimana tahun 2022 ini merupakan tahun capaian keempat periode RPJMD dimaksud.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat

No	Indikator	2021 (Baseline)	Target 2022
1	Indeks Pendidikan	71,28	72,84
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	25.200	28.800
3	Indeks Kesehatan	80,01	80,04
4	Total Fertility Rate	2,44	2,43
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81	82
6	Persentase Objek Kemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	30	32
7	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100	100
8	Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	75	77
9	Indeks Ketahanan Daerah	Sedang	Sedang
10	Persentase Angka PPKS	52,15	53,36
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	69,6-70	70,1-70,5
12	Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	71,79-72,78	72,79-73,78
13	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	82,34	91,17
14	Persentase Desa Mandiri	21	24
15	Presentase Layanan Kepemudaan	7,41%	7,83%
16	Indeks Pembangunan Olahraga	0,299 - 0,799	0,299 - 0,799
17	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	63,5	64,31
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	79,34	79,39
19	Kabupaten/Kota Layak Anak	Pratama	Pratama
20	Pertumbuhan sektor pertanian	7,50%	7,65%
21	Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	4%	4%
22	Persentase Kenaikan Produksi	5%	5%

No	Indikator	2021 (Baseline)	Target 2022
	Budidaya Perikanan		
23	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	8,11%	8,28%
24	Pertumbuhan sektor perdagangan	10,45%	10,67%
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.000.000	2.125.000
26	Persetasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata	0,69%	10%
27	Nilai Investasi PMDN	500 M	550 M
28	Jumlah Investor PMDN	190	195
29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,36	71,75
30	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	100%	100%
31	Pertumbuhan Koperasi Sehat	22	25
32	Penumbuhan wirausaha baru	100	125
33	Indeks Kesulitan Geografis	35,41	33,82
34	Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	61,92%	63,67%
35	Indeks kualitas lingkungan hidup	47,10	47,15
36	Indeks Merit	Skor 3	Skor 3
37	Nilai SAKIP	BB	BB
38	Opini BPK	WTP	WTP
39	Indeks SPBE	2,71	2,81
40	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,23	80,23

(Sumber: RPJMD Bandung Barat 2018-2023)

2.3 Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu:

"BANDUNG BARAT YANG AKUR (ASPIRATIF< KREATIF< UNGGUL DAN RELIGIUS), BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI, OPTIMALISASI SUMBER DAYA ALAM DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

- ASPIRATIF** : Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga social kemasyarakatan;
- KREATIF** : Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta lembaga social kemasyarakatan;
- UNGGUL** : Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional;
- RELIGIUS** : Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai – nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjiwai, mewarnai

dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta berbhineka tunggal ika;

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia adalah input terbaik bagi pembangunan manusia. Tanpa persiapan kualitas manusia di daerahnya, maka pembangunan dan kemudian pertumbuhan yang terjadi tidak akan mengikutsertakan masyarakat setempat dan akhirnya justru menimbulkan permasalahan sosial. Sektor-sektor yang akan dikembangkan seperti agroindustri, pariwisata dan industri lainnya akan membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia Bandung Barat yang berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang mahal dan berjangka panjang. Namun harus dilakukan karena dengan kualitas manusia yang baik maka pembangunan Bandung Barat yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas manusia tersebut dapat dicapai dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi seluruh masyarakat Bandung Barat.

Bandung Barat juga memiliki banyak kekhasan sosial dan budaya serta bentuk lokalitas lainnya. Kekhasan tersebut harus menjadi perhatian utama saat pembangunan daerah dilaksanakan, sehingga akan terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.

Pengembangan ekonomi di Bandung Barat tidak hanya menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan melibatkan modal serta pelaku usaha besar, namun juga dikembangkan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat serta memberikan dampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi di Bandung Barat akan fokus pada 2 (dua) sektor unggulan, yaitu agroindustri dan wisata alam yang ramah lingkungan. Sektor-sektor lainnya yang terkait juga harus ikut berkembang agar dapat terjadi kerkaitan usaha (rantai bisnis) di Bandung Barat sehingga daerah setempat dapat menikmati nilai tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga ditentukan adanya keterlibatan UMKM dalam ekonomi daerah. Keberlanjutan juga dapat dibangun jika lingkungan tetap terjaga dan terjadi pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Bandung Barat harus sebanding dengan pembukaan lapangan kerja secara luas dan menurunkan tingkat kemiskinan setempat.

Usaha padat modal dan UMKM perlu dikembangkan sebagai klaster ekonomi yang saling terkait. Oleh sebab itu Bandung Barat harus terbuka dan ramah terhadap investasi. Para investor dan pelaku usaha juga harus dijamin keamanan dan kepastian hukumnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya partisipasi kuat dari UMKM serta kepercayaan investor yang kuat sekaligus juga akan menunjukkan daya saing daerah.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.

Penyediaan prasarana dan sarana yang baik akan berefek luas dan berganda terhadap proses pembangunan, pengelolaan sumber daya dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Prasarana dan sarana harus dijadikan prasyarat bagi kemajuan daerah, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Bandung Barat juga akan lebih menarik bagi investasi jika memiliki daya dukung prasarana dan sarana yang memadai. Sistem prasarana dan sarana yang baik, khususnya transportasi secara langsung akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha maupun rumah tangga. Penurunan pengeluaran ini akan mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan dananya ke jenis pengeluaran produktif maupun konsumsi lainnya, sehingga secara berantai ekonomi akan hidup dan tumbuh.

Pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan lainnya perlu diwadahi dalam sistem perkotaan dan perdesaan yang efisien dan memiliki daya dukung yang memadai. Kegiatan pembangunan tersebut juga perlu didukung oleh kapasitas prasarana dan sarana wilayah yang mencukupi. Prasarana dan sarana tersebut mencakup energi, telekomunikasi, internet, transportasi, sistem utilitas dan lainnya. Bandung Barat memiliki kekhasan karena kondisi fisik lingkungannya. Oleh sebab itu maka pembangunan setempat juga tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan sekaligus menjadi Bandung Barat tangguh menghadapi bencana.

Dengan misi diharapkan pemerataan pembangunan dapat terwujud di Bandung Barat. Masyarakat secara lebih luas dapat lebih mengakses berbagai pusat pelayanan dan kegiatan

pembangunan. Masyarakat juga dapat melakukan kegiatan dan pergerakan secara mudah, murah dan nyaman.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

Ukuran penyelenggaraan pemerintahan adalah kepuasan masyarakat dan swasta serta pihak lain atas pelayanan yang diberikan, penilaian yang diberikan oleh lembaga berwenang atas tata kelola keuangan daerah serta tingkat kebocoran keuangan negara yang semakin rendah. Untuk itu maka perlu diciptakan organisasi pemerintahan daerah yang sesuai dengan tantangan, kinerja aparatur yang profesional dan bersih, dengan didukung oleh sistem teknologi informasi yang handal.

2.4 Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
MISI 1: Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.			
1	Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas,	Indeks	Meningkatnya kualitas

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
	merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	Pendidikan	layanan pendidikan
			Meningkatnya minat budaya baca
2	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
3	Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dan non dasar lainnya	Indeks Kebahagiaan	Mewujudkan ketahanan pangan
			Meningkatnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan
			Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
			Meningkatkan sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
			Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat
4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat
			Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat
			Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
MISI 2: Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.			

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
5	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
			Meningkatnya investasi PMDN
			Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada
			Meningkatnya pertumbuhan koperasi, wirausaha dan ekonomi kreatif
MISI 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.			
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial	Indeks Kesulitan Geografis	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaaan melalui berbagai alternative skema pembiayaan
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial
7	Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.			
8	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien
9	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.5 Perjanjian Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik sesuai amanat Undang-Undang adalah disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, yang bertujuan untuk:

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada dokumen rencana akhri perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2022, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah. Adapun dalam perjalanannya selama tahun anggaran 2022 berjalan terdapat beberapa penyesuaian baik dari segi perubahan anggaran yang ditetapkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran perubahan 2022 atau perubahan-perubahan minor lainnya khususnya dampak Covid 19, pemulihan pasca Covid 19 dan perubahan RPJMD 2018-2023.

Penanganan pandemik Covid 19 dan pemulihan pasca Covid 19 di Kabupaten Bandung Barat tentu berpengaruh pada perubahan anggaran yang telah ditetapkan di tahun 2022, sebelumnya perubahan ini merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat untuk menyesuaikan anggaran terkait adanya pandemik Covid 19. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan materil pendanaan pada bidang kesehatan, keselamatan dan keamanan.

Selain itu, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilakukan berdasarkan perubahan dan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) yang dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan RPJMD 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menyusun perubahan anggaran agar dapat disesuaikan dengan hasil rencana akhir perubahan RPJMD 2018-2023.

Seiring adanya perubahan fokus sasaran dan arah teknis kebijakan yang disertai adanya perubahan anggaran pada awal triwulan akhir tahun anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan perubahan tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Misi 1 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas					
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	Indeks pendidikan	Skala	72,84
2	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jiwa	28.800
3	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	3	Indeks Kesehatan	Indeks	80,04
		4	Total Fertility Rate	%	2,43
4	Mewujudkan ketahanan pangan	5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	82
5	Meningkatnya Pengembangan objek pemajuan kebudayaan	6	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	32
6	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100
		8	Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks	77
7	Meningkatkan sinergi dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
8	Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	10	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	53,36
		11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72
		12	Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	%	80
9	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga kemasyarakatan	13	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	91,17
		14	Persentase Desa Mandiri	%	24
10	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	15	Persentase Layanan Kepemudaan	%	7,83
		16	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,299-0,799 (sedang)
11	Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak	17	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,31
		18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79,39
		19	Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Pratama
Misi 2 : Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing					
12	Meningkatnya laju pertumbuhan	20	Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	7,65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	ekonomi sektor unggulan	21	Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	4
		22	Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	%	5
		23	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	8,28
		24	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	10,67
		25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.125.000
		26	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata	%	10
13	Meningkatkan Investasi PMDN	27	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	550
		28	Jumlah Investor PMDN	Perusahaan	195
14	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada	29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,75
		30	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	%	100
15	Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro wirausaha dan ekonomi kreatif	31	Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	25
		32	Pertumbuhan Wirausaha Baru	Pelaku Usaha	125
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
16	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di pedesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan	33	Indeks Kesulitan Geografis	Skala	33,82
17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial	34	Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	%	63,67
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	35	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	47,15
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi					
19	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	36	Indeks Merit	Indeks	Kategori III (Baik)
		37	Nilai SAKIP	Nilai Mutu	BB
		38	Opini BPK	Skor	WTP
		39	Indeks SPBE	Skala	2,81
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	40	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,23

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,017,248,047,273
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	429,353,389,487
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	332,196,517,775

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	22,792,463,803
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38,064,960,375
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	18,998,601,990
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	15,728,469,622
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,773,695,322
9.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	21,632,704,656
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1,285,774,074
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	37,778,535,688
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,106,760,713
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22,190,021,354
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35,506,457,610
15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	29,681,953,405
16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	21,816,656,091
17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	19,391,007,274
18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	8,975,390,486
19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	33,019,391,238

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	478,769,750
21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	289,156,529
22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3,099,620,667
23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3,164,582,485
24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	6,932,069,230
25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	19,419,043,244
26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	13,651,807,070
27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	27,965,468,874
28.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1,630,951,132
29.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	24,926,663,139
30.	Sekretariat Daerah	82,965,105,365
31.	Sekretariat DPRD	112,503,941,187
32.	Perencanaan	20,120,501,614
33.	Keuangan	608,644,584,293
34.	Kepegawaian	16,128,618,444
35.	Pendidikan dan Pelatihan	1,798,743,572
36.	Penelitian dan Pengembangan	2,385,298,575
37.	Inspektorat Daerah	19,472,672,342
38.	Kecamatan	94,366,643,535
39.	Kesatuan Bangsa dan Politik	14,833,393,629
JUMLAH		3,198,318,432,912

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

- semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja 2022

No	Kategori	Berhasil/Tidak Berhasil
1.	>85	Berhasil
2.	<85	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai **lebih dari 85%** termasuk pada kategori capaian kinerja **berhasil**. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai **kurang dari 85%** termasuk kategori capaian kinerja **tidak berhasil**. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan evaluasi terhadap

Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap Dokumen RPJMD sebelumnya, dimana pada Dokumen perubahan RPJMD 2018-2023 tersebut sudah memuat dan sekaligus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menetapkan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja 2022 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN 1

Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Dapat Dijangkau oleh Seluruh Masyarakat

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Pembangunan manusia dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk peningkatan taraf hidup maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan misi Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentunya melaksanakan pembangunan manusia yang salah satunya ditandai melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dalam bidang pendidikan, maupun kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang terjangkau oleh lapisan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program pembangunan bidang pendidikan.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	CAPAIAN 2022		
			TARGET	REALISASI	%
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	72,84	60,42	82,95

Untuk mewujudkan tujuan Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tersebut dalam tahun 2022 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan
2. Meningkatkan Minat Budaya Baca

Capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan berfikir masyarakat. Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang terjangkau oleh lapisan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program pembangunan bidang pendidikan.

Sebagai wujud nyata dari tugas pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maka capaian kinerja kebijakan agenda prioritas pelayanan pendidikan yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja adalah dengan mengukur pencapaian Indeks Pendidikan.

Untuk melihat capaian indikator kinerja indeks pendidikan tahun 2022 sebagai tahun ke-empat RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Pendidikan	60,27	60,33	72,84	60,42	82,95	74,21	81,42

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM terbentuk dari tiga dimensi yang berkaitan dengan standar taraf hidup manusia, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pendapatan.

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang Pendidikan. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Salah satu indikator tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks pendidikan diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah. (BPS, 2001 : xiv).

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Indeks Pendidikan tahun 2022 menunjukkan angka 60,42. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, Indeks Pendidikan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,09 point dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 0,15 point. Persentase capaian pada tahun 2022 adalah 82,95% dan capaian akhir RPJMD sebesar 81,42%. Meskipun persentase realisasi tidak mencapai 100%, namun capaian indeks pendidikan masuk dalam katagori capaian berhasil karena mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Capaian HLS

No	KABUPATEN/KOTA	Capaian HLS (Tahun)												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Bandung	10.82	11.01	11.26	11.5	11.74	12.13	12.42	12.43	12.64	12.68	12.69	12.7	12.71
2	Kab. Bandung Barat	9.68	10.09	10.53	11	11.06	11.39	11.56	11.79	11.83	11.86	11.87	11.88	11.89
3	Kab. Bekasi	10.54	10.84	11.05	11.42	11.73	11.93	12.23	12.63	13.05	13.08	13.09	13.1	13.11
4	Kab. Bogor	10.28	10.59	10.91	11.68	11.81	11.83	12.05	12.43	12.44	12.47	12.48	12.49	12.5
5	Kab. Ciamis	11.75	12.21	12.83	13.46	13.57	13.59	13.65	13.66	13.67	13.79	14.06	14.2	14.28
6	Kab. Cianjur	9.62	10.07	10.62	11.54	11.82	11.83	11.88	11.89	11.9	11.98	11.99	12	12.01
7	Kab. Cirebon	10.66	11	11.17	11.48	11.6	11.79	12.03	12.21	12.22	12.24	12.25	12.27	12.28
8	Kab. Garut	10.36	10.52	10.85	11.17	11.62	11.65	11.69	11.73	11.8	11.82	11.91	12.03	12.15
9	Kab. Indramayu	10.45	10.87	11.11	11.36	11.62	12.09	12.2	12.21	12.22	12.24	12.25	12.26	12.27
10	Kab. Karawang	10.76	10.92	11.08	11.31	11.64	11.69	11.85	11.96	12.07	12.08	12.09	12.1	12.19
11	Kab. Kuningan	10.84	11	11.4	11.7	12.01	12.03	12.04	12.06	12.07	12.1	12.22	12.23	12.24
12	Kab. Majalengka	11	11.08	11.22	11.38	11.61	11.74	11.89	12.18	12.19	12.21	12.22	12.23	12.24
13	Kab. Pangandaran	0	0	0	11.48	11.89	11.99	12.02	12.03	12.04	12.06	12.07	12.08	12.11
14	Kab. Purwakarta	10.16	10.26	10.71	11.22	11.33	11.44	11.82	11.89	12.09	12.1	12.11	12.12	12.13
15	Kab. Subang	10.59	10.87	11.15	11.38	11.44	11.46	11.66	11.67	11.68	11.69	11.7	11.71	11.78
16	Kab. Sukabumi	10.08	10.1	10.73	11.8	12.12	12.13	12.18	12.19	12.2	12.22	12.23	12.24	12.25
17	Kab. Sumedang	10.9	10.93	11.95	12.83	12.89	12.9	12.91	12.93	12.94	12.96	12.97	12.98	12.99
18	Kab. Tasikmalaya	10.76	11.38	11.83	12.29	12.41	12.44	12.46	12.47	12.48	12.52	12.53	12.54	12.59
19	Kota Bandung	12.41	12.97	13.05	13.13	13.33	13.63	13.89	13.9	14.18	14.19	14.2	14.21	14.23
20	Kota Banjar	11.9	12.02	12.15	12.29	12.42	12.95	13.18	13.19	13.2	13.22	13.23	13.24	13.25
21	Kota Bekasi	12.13	12.36	12.43	13.2	13.28	13.36	13.47	13.51	13.76	13.99	14	14.1	14.11
22	Kota Bogor	11.72	11.85	11.98	12.1	12.23	12.36	13.01	13.37	13.38	13.4	13.41	13.42	13.43
23	Kota Cimahi	12.24	12.76	13.23	13.7	13.71	13.73	13.75	13.76	13.77	13.79	13.8	13.81	13.82
24	Kota Cirebon	11.7	12.1	12.5	12.58	12.93	12.94	13.07	13.08	13.09	13.11	13.12	13.13	13.14
25	Kota Depok	12.45	12.46	12.47	13.24	13.3	13.54	13.86	13.87	13.9	13.91	13.92	13.93	13.94
26	Kota Sukabumi	11.55	11.68	12.19	13.08	13.18	13.24	13.38	13.39	13.4	13.46	13.47	13.58	13.59
27	Kota Tasikmalaya	11.85	12.24	12.66	13.11	13.36	13.37	13.4	13.41	13.42	13.44	13.45	13.46	13.47
Provinsi Jawa Barat		10.69	10.91	11.24	11.81	12.08	12.15	12.3	12.42	12.45	12.48	12.5	12.61	12.62
Nasional		11.29	11.44	11.68	12.1	12.39	12.55	12.72	12.85	12.91	12.95	12.98	13.08	13.1

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Tabel 3.5
Rekapitulasi Capaian RLS

No	KABUPATEN/KOTA	Capaian RLS (Tahun)												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Bandung	7.98	8.14	8.16	8.18	8.34	8.41	8.5	8.51	8.58	8.79	8.96	9.07	9.08
2	Kab. Bandung Barat	7.03	7.33	7.36	7.39	7.51	7.53	7.63	7.74	7.97	8.18	8.19	8.2	8.22
3	Kab. Bekasi	7.51	7.98	8.25	8.34	8.38	8.66	8.81	8.82	8.84	8.84	9.12	9.3	9.53
4	Kab. Bogor	6.9	6.92	7.27	7.4	7.74	7.75	7.83	7.84	7.88	8.29	8.3	8.31	8.34
5	Kab. Ciamis	6.96	7.14	7.17	7.2	7.44	7.45	7.55	7.59	7.6	7.69	7.7	7.9	8
6	Kab. Cianjur	6.17	6.28	6.39	6.5	6.52	6.54	6.61	6.92	6.93	6.97	7.18	7.19	7.2
7	Kab. Cirebon	5.92	5.97	6.03	6.08	6.31	6.32	6.41	6.61	6.62	6.71	6.92	7.1	7.4
8	Kab. Garut	6.68	6.71	6.75	6.8	6.83	6.84	6.88	7.28	7.5	7.51	7.52	7.53	7.83
9	Kab. Indramayu	4.93	4.93	5.09	5.29	5.45	5.46	5.56	5.97	5.98	5.99	6.3	6.52	6.83
10	Kab. Karawang	5.99	6.23	6.52	6.73	6.78	6.81	6.94	7.34	7.35	7.65	7.77	7.78	7.96
11	Kab. Kuningan	6.58	6.87	6.93	6.98	7.04	7.2	7.34	7.35	7.36	7.38	7.57	7.8	7.88
12	Kab. Majalengka	6.35	6.46	6.59	6.72	6.75	6.8	6.89	6.9	6.91	7.09	7.27	7.31	7.49
13	Kab. Pangandaran	0	0	0	7.01	7.05	7.06	7.07	7.37	7.58	7.67	7.74	7.85	8.03
14	Kab. Purwakarta	7.01	7.04	7.07	7.11	7.17	7.35	7.42	7.74	7.75	7.92	8.09	8.1	8.11
15	Kab. Subang	5.84	6.01	6.17	6.29	6.44	6.45	6.58	6.83	6.84	6.85	7.1	7.11	7.2
16	Kab. Sukabumi	5.82	6.07	6.32	6.32	6.36	6.51	6.74	6.79	6.8	7.02	7.07	7.1	7.11
17	Kab. Sumedang	7.51	7.51	7.51	7.51	7.66	7.66	7.72	7.98	8.17	8.27	8.51	8.52	8.72
18	Kab. Tasikmalaya	6.59	6.64	6.68	6.69	6.87	6.88	6.94	7.12	7.13	7.17	7.35	7.48	7.73
19	Kota Bandung	10.32	10.33	10.35	10.37	10.51	10.52	10.58	10.59	10.63	10.74	10.75	10.99	11
20	Kota Banjar	7.45	7.51	7.58	7.66	7.77	8.06	8.19	8.59	8.6	8.62	8.63	8.77	8.78
21	Kota Bekasi	10.07	10.43	10.46	10.49	10.55	10.71	10.78	10.93	11.09	11.1	11.16	11.31	11.44
22	Kota Bogor	9.25	9.43	9.6	9.96	10.01	10.2	10.28	10.29	10.3	10.32	10.33	10.53	10.63
23	Kota Cimahi	10.33	10.38	10.44	10.66	10.78	10.78	10.89	10.93	10.94	10.95	10.96	11.08	11.21
24	Kota Cirebon	9.09	9.31	9.32	9.33	9.53	9.76	9.87	9.88	9.89	9.9	9.91	10.12	10.33
25	Kota Depok	10.06	10.22	10.32	10.43	10.58	10.71	10.76	10.84	10.85	11	11.28	11.46	11.47
26	Kota Sukabumi	7.82	8.16	8.52	8.52	8.7	9.08	9.28	9.52	9.53	9.58	9.59	9.81	10.14
27	Kota Tasikmalaya	8.23	8.28	8.34	8.44	8.51	8.56	8.63	9.03	9.04	9.13	9.33	9.52	9.53
Provinsi Jawa Barat		7.4	7.46	7.52	7.58	7.71	7.86	7.95	8.14	8.15	8.37	8.55	8.61	8.78
Nasional		7.46	7.52	7.59	7.61	7.73	7.84	7.95	8.1	8.17	8.34	8.48	8.54	8.69

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya/tidak tercapainya/melebihi capaian target yang ditentukan

Dalam mendukung ketercapaian RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat secara teknis telah menetapkan kebijakan melalui Rencana Strategis (Renstra) dengan fokus pada peningkatan Pengelolaan Pendidikan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya capaian target yang telah ditentukan adalah :

1. Kesesuaian penjabaran misi peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui program pengelolaan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat

Pendidikan anak usia dini menjadi tonggak awal dalam pendidikan, terlebih peraturan yang berlaku saat ini mewajibkan setiap anak untuk mengikuti jenjang pendidikan anak usia dini sebelum masuk dalam pendidikan dasar sehingga program dalam kegiatan pendidikan anak usia dini ini sangat berpengaruh dalam peningkatan indeks pendidikan. Penyelenggaraan Paket B setara SMP pun didaulat sebagai program utama dalam meningkatkan RLS, merupakan salah satu kunci karena dapat merangkul siswa putus sekolah serta penduduk usia 18 tahun keatas yang belum menuntaskan pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Kegiatan ini dilaksanakan di 40 (empat puluh) lembaga PKBM di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Eksistensi dari pendidikan non formal ini sangat penting dalam peningkatan indeks pendidikan, sesuai dengan fungsinya pendidikan non formal memiliki peran sebagai suplemen (tambahan), substitusi (pengganti) dan komplemen (pelengkap) dari pendidikan formal.

2. Dilaksanakan perencanaan berbasis data melalui analisis data yang valid sebagai dasar dari penganggaran

Pendataan pendidikan dilakukan melalui aplikasi Dapodik (Data pokok pendidikan) yang diisi oleh seluruh satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP. Pendataan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau pada setiap pergantian semester sehingga data yang diperoleh melalui aplikasi Dapodik ini adalah data terbaru. Data tersebut meliputi 4 (empat) entitas data inti dalam pendidikan yaitu data siswa, data pendidikan dan tenaga pendidik, satuan pendidikan, serta sarana prasarana. Data yang berasal dari aplikasi dapodik ini menjadi data dasar dalam perencanaan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

3. Kesesuaian antara kebutuhan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai indeks pendidikan sudah sesuai dengan kebutuhan dasar dari indikator indeks pendidikan itu sendiri yang dibuktikan dengan beberapa program kegiatan yang terealisasi secara maksimal.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bandung Barat

Hambatan dalam pencapaian indeks pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah masih tingginya putus sekolah. Dari data Kementerian pendidikan alasan tertinggi dari anak putus sekolah adalah faktor ekonomi khususnya pada jenjang SMP yang dilandasi oleh beberapa faktor seperti anak yang sudah memasuki usia cukup bagi orangtuanya akan diarahkan untuk putus sekolah dan melanjutkan dengan bekerja, jarak antara rumah ke sekolah yang cukup jauh dan membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar walaupun biaya sekolah gratis menjadi juga salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya anak putus sekolah.

2. Angka Melanjutkan ke jenjang Pendidikan selanjutnya terutama dari jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK

Pendidikan kesetaraan menjadi solusi untuk penanganan anak putus sekolah, namun anggaran pendidikan kesetaraan sangat minim sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan pendidikan dari seluruh anak putus sekolah dan masyarakat yang belum mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah.

3. Tidak adanya layanan sekolah inklusi untuk anak yang berkebutuhan khusus

Pada hakikatnya pendidikan inklusi memberikan kesempatan dalam memahami segala kesulitan pendidikan yang dihadapi oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Kesulitan untuk mengikuti beberapa kurikulum, tidak mampu mengakses cara baca tulis secara normal, atau kesulitan dalam mengakses lokasi sekolah. Pendekatan pendidikan inklusi dalam hal ini seharusnya tidak melihat hambatan ini dari sisi anak peserta didik yang memiliki kelainan, melainkan dilihat dari sistem pendidikan dengan kurikulumnya yang belum sesuai, sarana yang belum memadai dan tenaga pendidik yang belum siap melayani anak-anak berkebutuhan khusus.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Menggunakan teori jemput bola yaitu guru akan datang ke tempat/daerah yang membutuhkan sarana Pendidikan

Banyaknya faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah dikarenakan jarak sekolah formal yang jauh serta kualitas pendidikan yang di dapat masih rendah, faktor lain yang mempengaruhinya adalah kurangnya pendekatan tenaga pendidik kepada anak didiknya sehingga menyebabkan orangtua lebih memilih mengutamakan anaknya untuk bekerja. Upaya yang dilakukan agar akses pendidikan tetap berjalan

adalah dengan menggunakan teori jemput bola yaitu guru datang ke tempat/daerah yang membutuhkan sarana pendidikan.

2. Materi sekolah yang didukung oleh kemajuan teknologi sehingga tidak hanya menggunakan cara tradisional.
3. Terdapat aula tempat sarana pendidikan yang diisi dengan beberapa rak buku beserta isinya yang dapat menjadi wadah bagi pelajar untuk menimba ilmu.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target:

1. PETADIK (Pelayanan Data Pendidikan)

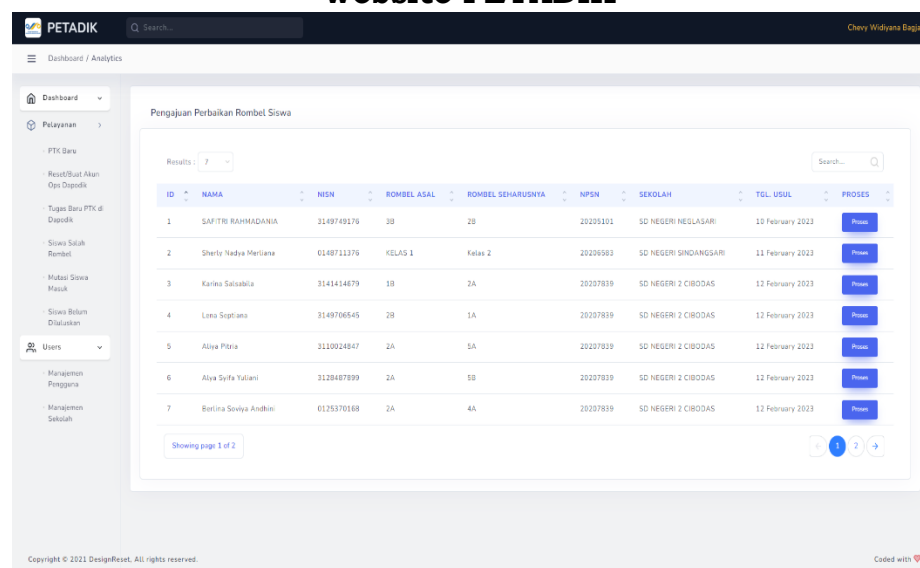
Pelayanan publik dalam perkembangannya mengalami sebuah kajian yang sangat komprehensif. Kebutuhan penyediaan layanan juga semakin berkembang sehingga memerlukan telaah secara saksama dan berkesinambungan agar mudah dicapai dengan apa yang kita sebut pemenuhan kebutuhan akan sebuah layanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya *public good* atau *public regulator*.

Peningkatan pelayanan otonomi pelayanan publik sebagai salah satu tujuan dalam daerah meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Dalam melihat peningkatan pelayanan publik melalui pemekaran wilayah, dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan publik efisiensi, responsivitas dan akuntabilitas. Dengan indikator ini, maka pemekaran wilayah dapat dinilai tingkat keberhasilannya dalam meningkatkan pelayanan publik. Pendidikan menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang juga merupakan pondasi bagi tumbuh kembangnya suatu bangsa. Problem kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan serta ketertinggalan bangsa ini akibat dari

kurang atau lemahnya perhatian pemerintah pada sektor pendidikan. Pendidikan bisa diangkat menjadi suatu tumpuan dalam proses pembangunan untuk menjadi bangsa Indonesia yang lebih maju.

Dalam hal ini Perangkat Daerah Dinas Pendidikan menerbitkan sebuah website <https://petadik.disdikbb.org/> yang sengaja dibuat ini memiliki tujuan utama yaitu membantu masyarakat luas pada umumnya dan khususnya masyarakat Pendidikan yang mana Pendidik dan Tenaga Kependidikan sendiri dalam mengakses data sekolah, sehingga operator sekolah tidak perlu mengunjungi langsung ke Dinas Pendidikan untuk memperbaiki Data Pokok Pendidikan masing-masing sekolahnya. Hal yang ingin dicapai yaitu dapat mempersingkat birokrasi, mempercepat proses pelayanan, dan mempermudah akses penggunaan sehingga kedepannya bisa mengefisiensikan waktu dalam proses transfer data.

Gambar 3.1
Website PETADIK



ID	NAMA	NISN	ROMBEL ASAL	ROMBEL SEHARUSNYA	NPSN	SEKOLAH	TGL. USUL	PROSES
1	SAFITRI RAHMADANIA	2149749176	3B	2B	20205101	SD NEGERI NESLASARI	10 February 2023	Proses
2	Sherly Nadya Marlana	0148711376	KELAS 1	Kelas 2	20205983	SD NEGERI SINDANGSARI	11 February 2023	Proses
3	Karina Salsabila	3141414479	1B	2A	20207839	SD NEGERI 2 CIBODAS	12 February 2023	Proses
4	Lena Saptiana	3149706545	2B	1A	20207839	SD NEGERI 2 CIBODAS	12 February 2023	Proses
5	Aliva Pitia	3110024847	2A	5A	20207839	SD NEGERI 2 CIBODAS	12 February 2023	Proses
6	Alva Syifa Yuliani	3129487899	2A	5B	20207839	SD NEGERI 2 CIBODAS	12 February 2023	Proses
7	Berlina Soviya Andhini	0125370168	2A	4A	20207839	SD NEGERI 2 CIBODAS	12 February 2023	Proses

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

2. Mading Elektronik Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat (Manik Disdik KBB)

Manik Disdik KBB merupakan media komunikasi dalam mengekspresikan kreativitas dan referensi dalam pembelajaran muatan lokal, yang meliputi seni, budaya, keterampilan, olahraga serta bahasa secara audio visual melalui laman Youtube dan Instagram. Sasaran Manik Disdik KBB adalah guru, siswa, dan masyarakat umum. Tujuan dibentuknya Manik Disdik KBB adalah :

- sebagai alat untuk memperkenalkan kreativitas guru, siswa mengenai budaya dan Bahasa sunda kepada masyarakat;
- sebagai media pembelajaran digitalisasi bagi siswa di Kabupaten Bandung Barat;
- sebagai referensi pembelajaran tentang budaya dan bahasa daerah;
- sebagai wadah bagi siswa untuk menunjukkan hasil karya dan bakatnya agar dapat dilihat oleh masyarakat.

Adapun konten dari Manik Disdik KBB adalah :

- 1) Manik Sekar (Seni Karya sebagai unjuk bakat siswa dan guru);
- 2) Manik Senja (Seni dan Sejarah Lokal);
- 3) Manik Mabar (Materi Belajar);
- 4) Manik Bisa (Bincang Santai);
- 5) Manik Bakar (Bahasa Karya Keterampilan);
- 6) Manik Barista (Bahasa Peristiwa);
- 7) Manik KBB Rancage (Berproses lebih baik).

Gambar 3.2
Youtube Manik Disdik KBB (<https://bit.ly/3sCbxZB>)



Gambar 3.3
Instagram Manik Disdik KBB (<https://bit.ly/3qGwQnt>)



Gambar 3.4
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan



Gambar 3.5
TIM MANIK Dinas Pendidikan



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Gambar 3.6
Kegiatan MANIK



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Kata efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program Dukungan Manajemen, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, menimbang dari hasil laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat penggunaan Anggaran cukup efisien dari rencana anggaran 100% realisasi yang terpakai hanya 88.09% dengan rincian yang terlampir, menunjukkan bahwa sumber daya melalui anggaran dapat membantu menaikkan indeks pencapaian dengan beberapa program yang di telah terealisasi secara optimal. Seperti kegiatan pengelolaan Paud, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yakni penambahan ruang kelas baru, pembangunan perpustakaan sekolah, pembangunan sarana prasarana. Program yang dilakukan sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan diharapkan dapat meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

Sasaran 2 Meningkatkan Minat Budaya Baca

Membaca ialah aktivitas positif yang memberikan manfaat sangat besar. Membaca dapat memperluas cakrawala ilmu, membentuk sikap dan keterampilan seseorang. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa kualitas seseorang tergantung pada buku yang dibacanya. Seseorang yang gemar membaca akan berpengetahuan luas, lebih kritis, dan mampu menanggapi keadaan di sekitarnya dengan bijak. Selain itu membaca merupakan bagian dari

pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. Sayangnya, tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah dan itu berpengaruh pada pembangunan sumber daya manusianya.

Data UNESCO menunjukkan, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Hal ini disebabkan oleh faktor rasio antara ketersediaan bacaan dengan jumlah penduduk yang berbeda sangat jauh. Di tengah fenomena tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus mendorong dan mencoba berinovasi agar minat budaya baca di tengah masyarakat bisa terus tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Bandung Barat. Meningkatkan minat budaya baca dapat dihitung melalui indikator sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian sasaran Meningkatkan Minat Budaya Baca

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	13.256	5.331	28.800	10.936	37,97 %	32.400	33,75 %

Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatkan Minat dan Budaya Baca diukur dengan Indikator Kinerja Jumlah Pengunjung Perpustakaan. Target pada tahun 2022 yang direncanakan sebanyak 28.800 jiwa menunjukkan realisasi sebesar 10.936 jiwa atau persentase capaian sebesar 37,97%, artinya target tidak tercapai sesuai yang direncanakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sebagai berikut :

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Letak Perpustakaan yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum termasuk pelajar.
2. Gedung Pelayanan perpustakaan yang kurang perpresentatif.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca.
4. Motor dan mobil perpustakaan keliling yang terbatas.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Masih kurangnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
2. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif sebagai gedung perpustakaan umum daerah dengan lokasi yang mudah di akses terutama oleh masyarakat Kabupateb Bandung Barat.
3. Kurangnya koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka/pengunjung perpustakaan.
4. Kabupaten Bandung Barat belum banyak memiliki Tenaga Pustawan yang ahli.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Melibatkan pihak yang mempunyai kepentingan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk melakukan kerjasama memajukan perpustakaan kecil yang ada di wilayah desa.
2. Pelayanan Perpustakaan Keliling yang ada saat ini perlu ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.
3. Identifikasi kebutuhan pengunjung perpustakaan terhadap koleksi bahan pustaka, meningkatkan jenis bahan bacaan

dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

4. Tersedianya tenaga pendamping/fasilitator perpustakaan per kecamatan dan desa.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target:

1. Melakukan Sosialisasi Pemasyarakatan Budaya Baca kepada Masyarakat.
2. Melaksana sosialisasi Aplikasi yang bernama GURILEM KBB (Gudang Literasi Elektronik Masyarakat KBB) yang didalamnya terdapat koleksi buku Digital (E-Book) ke Desa dan Sekolah

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan meluncurkan Aplikasi Perpustakaan Digital Gurilem KBB bekerjasama dengan PT Gramedia Asri Media. Gurilem KBB atau Gudang Literasi Elektronik Masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah aplikasi perpustakaan digital yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berisi konten dari penerbit GRAMEDIA dan penerbit lainnya. Kata Gurilem itu sendiri diambil dari nama panganan khas daerah yaitu Kerupuk Gurilem yang berasal dari daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi ini dapat di akses melalui smartphone dan dapat diunduh melalui Google Playstore & Appstore. Dalam Gurilem KBB terdapat sumber informasi berupa buku elektronik sebanyak 1014 Judul, 1869 Eksemplar. Dengan adanya aplikasi Gurilem KBB ini diharapkan dapat meningkatkan layanan serta akses cepat dan luas terhadap perpustakaan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Program dan Kegiatan yang menunjang semakin meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan, antara lain kampanye kegemaran membaca melalui kegiatan safari literasi, kegiatan Story Telling Keliling (Si Lingling), kegiatan Lomba Minat baca yang terdiri dari lomba bercerita, lomba mewarnai dan lomba pidato tentang literasi, iklan layanan masyarakat di berbagai media, bantuan buku kepada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, layanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling dan motor perpustakaan keliling serta pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan inklusi sosial perdesaan dan bantuan perpustakaan daerah terpencil.

TUJUAN 2

Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu dalam pembangunan juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan Kesehatan dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan standar kesehatan.

Kinerja kebijakan Agenda pelayanan kesehatan yang mudah dan murah yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas”, yaitu pembangunan yang menekankan pada kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera, dapat diukur melalui tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	CAPAIAN 2022		
			TARGET	REALISASI	%
Peningkatan pelayanan kesehatan yang dijangkau oleh seluruh masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	80,04	81,22	101,47

Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan.

Capaian terwujudnya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 tergambar dari capaian 2 indikator yang telah ditentukan yaitu Indeks Kesehatan dan Total Fertility Rate dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas layanan kesehatan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Kesehatan	80,52	80,80	80,04	81,22	101,47	80,07	101,44
Total Fertility Rate	2,39	2,43	2,43	2,24	107,82	2,42	92,56

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu dalam pembangunan juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan Kesehatan dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan standar kesehatan.

Indeks kesehatan adalah bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM terdiri dari 3 Indeks yaitu Indeks Kesehatan, Pendidikan & Daya Beli. Indeks kesehatan ini diukur melalui umur yang panjang dan sehat dengan mengukur angka kesakitan, kematian dan kelahiran. Angka indeks kesehatan diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat dengan melihat beberapa variable diantaranya penolong persalinan, tingkat gizi yang diberikan pada bayi dan kualitas tempat tinggal. Data mengenai angka kesakitan penduduk dapat diketahui dengan melakukan pendekatan angka keluhan kesehatan selama satu bulan lalu, serta cara dan jenis pengobatan yang dilakukan. Angka kelahiran/fertilitas sangat dipengaruhi oleh angka prevalensi keluarga berencana (KB). Angka prevalensi KB (Keluarga Berencana) dapat ditunjukkan melalui keikutsertaan WUS (wanita usia subur usia 15- 49 tahun) dalam program KB.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 tercatat bahwa pada indikator Indeks Kesehatan tahun 2022 dari target 80.04 realisasinya 81.22 artinya target tahun 2022 tercapai bahkan melebihi sebesar 101,47% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 80.80 mengalami kenaikan sebesar 0,42. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPMD untuk indikator indeks kesehatan sudah tercapai target yaitu melebihi target RPJMD sebesar 1.15 (101.44%).

Pencapaian ini tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor di bidang kesehatan diantaranya merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat meningkat, termasuk peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan yang membaik selain hal tersebut juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya prosentase indeks kesehatan antara lain presentasi masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan, bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan meningkatnya Angka Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu faktor yang mempengaruhi angka Indeks Kesehatan yang melebihi target di Kabupaten Bandung Barat adalah faktor ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan yang sudah mencapai 96.59% artinya masyarakat sudah mulai memahami pentingnya bersalin di fasilitas kesehatan sehingga mengurangi jumlah kematian ibu dan bayi. Pada tahun 2022 pelayanan gizi masyarakat untuk penurunan balita wasting menjadi 5.266 balita (4,61%), prevalensi underweight 7.672 balita (6,69%), dan stunting 9.304 balita (8,15%); ibu hamil anemia sebanyak 359 orang (6,19%); serta peningkatan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium 5367 rumah tangga (96,98%), dan ibu hamil kurang energi kronis yang mendapat makanan tambahan sebanyak 472 orang (87,73%).

Pada tabel 3.8 diatas juga menunjukan jika selain indeks kesehatan, indikator Rata-rata jumlah anak dalam keluarga *Total Fertility Rate* juga digunakan dalam mengukur capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan. Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Hal ini dapat digunakan Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 realisasi Indikator rata-rata jumlah anak dalam keluarga dari target 2,43 anak per keluarga dapat tercapai 2,24 anak per keluarga atau melebihi target dengan capaian sebesar 107,82% dari target yang telah ditetapkan.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Presentasi masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan yang memenuhi target.
2. Bertambahnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi.

3. Adanya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan dan penelitian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kebijakan dan mitra kerja, yang diselenggarakan untuk Petugas Lini Lapangan baik yang PNS maupun Non PNS.
4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya informasi pemohon Jaminan Kesehatan terkait tidak validnya NIK dikarenakan NIK pemohon tidak terdaftar di Disdukcapil serta adanya Double NIK pada Pemohon Jaminan Kesehatan.
2. Masih ada Puskesmas yang belum terakreditasi karena Survei Akreditasi Puskesmas belum dapat dilaksanakan. Kebijakan kementerian Kesehatan pada surat edaran no. 133 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha bidang pelayanan Kesehatan, dimana survei akreditasi belum dapat diselenggarakan pada tahun 2022 karena komitmen mutu masih berlaku sebagai pengganti sertifikat akreditasi Puskesmas.
3. Redistribusi sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan belum merata.
4. Persentase penduduk usia reproduksi saat ini relatif tinggi. Kondisi ini menuntut konsistensi dan pemerataan akses terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta masih rendahnya rata-rata usia kawin pertama perempuan. Sehingga berpengaruh terhadap ASFR 15-19 tahun.
5. Persentase penduduk usia reproduksi saat ini relatif tinggi. Kondisi ini menuntut konsistensi dan pemerataan akses

terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta belum optimalnya Pokja Kampung KB di seluruh tingkatan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Pemohon Jaminan Kesehatan melakukan Validasi NIK terlebih dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum pemohon Jaminan Kesehatan mendaftarkan Kembali ke Dinas Kesehatan.
2. Telah dilaksanakannya pembangunan di 2 puskesmas yang belum terakreditasi.
3. Dilakukannya pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan.
4. Updating data melalui peran lini lapangan (PKB, PLKB non PNS, Teladan KB, PPKBD, dan Sub PPKBD)

PLKB/PKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota berkedudukan di Desa/ Kelurahan yang bertugas melaksanakan/mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan ditingkatan Desa/ Kelurahan.

5. Promosi dan Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di setiap kelompok kegiatan

Dengan adanya program Keluarga Berencana yang mengupayakan pembatasan jumlah anak diharapkan dapat menekan angka kelahiran, sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Karena semakin rendah nilai rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan capaian yang semakin baik.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Melakukan pendaftaran melalui petugas Sik-Ng.
2. Menganggarkan pelaksanaan pembangunan di 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Sindangkerta dan Puskesmas Gununghalu sehingga rencana akreditasi dilaksanakan pada tahun 2023.
3. Redistribusi sumber daya manusia Kesehatan pada fasilitas Kesehatan yang merata.
4. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui program genre dan BKR (Bina Keluarga Remaja).
5. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi kelompok kerja (POKJA) di seluruh tingkatan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain memenuhi realisasi capaian sasaran, dapat pula disampaikan prestasi-prestasi sebagai berikut :

1. Inovasi Gelang Dan Stiker Risti Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Salah satu Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bandung Barat, perlu dibentuk inovasi Gelang dan Stiker Risti Bagi Ibu Hamil Risiko Tinggi dalam rangka menyamakan satu persepsi identifikasi Ibu Hamil Risiko Tinggi dengan penandaan khusus untuk memudahkan pemetaan Ibu Hamil Risiko Tinggi. Launching Inovasi Gelang dan Stiker Risti dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, bertempat di Ballroom Mason Pine Hotel, dihadiri oleh Pak PLT. Bupati Bandung Barat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, serta seluruh undangan.



2. Inovasi Gerakan Makan Telur Minimal Sebutir Oleh Ibu Hamil Untuk Mencegah Stunting (Getol Mieling) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat 2022

Getol mieling ditujukan untuk Ibu hamil KEK dan beresiko KEK sebagai acuan dalam pelaksanaan PMT P di Kabupaten Bandung Barat. Waktu pelaksanaan pemberian makanan tambahan lokal extra telur 1 butir sehari adalah selama 90 hari pemberian (Bulan Maret, April, Mei Tahun 2022). Tempat pelaksanaan di 32 wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah sasaran ibu hamil sebanyak 1500 ibu hamil. Kegiatan ini mendapatkan penghargaan Rekor Indonesia dari Museum Rekor-Dunia Indonesia pada tanggal 4 Desember 2022.





3. Pemeriksaan Usg Kepada Ibu Hamil Terbanyak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat 2022

Pemeriksaan USG merupakan pemeriksaan penunjang pelayanan Ante Natal Care (ANC) bagi ibu hamil. Pemeriksaan USG pada ibu hamil terbanyak dilaksanakan pada Tahun 2022. Kegiatan ini mendapatkan penghargaan Rekor Indonesia dari Museum Rekor-Dunia Indonesia pada tanggal 4 Desember 2022.



4. Terbaik II Lomba Kampung KB Kategori Kabupaten Tingkat Provinsi Jawa Barat a.n Kampung KB Cempaka Ramah Anak Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah dan Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Kabupaten dengan Capaian peserta pelayanan KB 100% pada kegiatan Pelayanan KB Serentak dalam rangkaian Hari Keluarga Tingkat Nasional



5. Juara 1 Pengelola Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Juara 1 Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna tingkat Provinsi Jawa Barat a.n SMPN 2 Ngamprah, Juara Harapan 1 Siaga Kependudukan Paripurna tingkat Provinsi Jawa Barat SMPN 3 Parongpong dan Juara Harapan 3 Siaga Kependudukan Paripurna tingkat Provinsi Jawa Barat SMPN 3 Cipeundeuy



6. Penghargaan **Manggala Karya Kencana** dan Penghargaan **Dharma Karya Kencana** dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)



TUJUAN 3

Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Non Dasar Lainnya

Kebutuhan Dasar Manusia adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua manusia dan kebutuhan tersebut essensial agar seseorang dapat bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia dapat memenuhi secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang menentukan tingkat kesehatan seseorang dan posisinya dalam rentang sehat-sakit tak dapat dipungkiri, di dalam hidup dan kehidupannya, manusia memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan dan keperluan. Sedemikian banyaknya sehingga para ahli ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu tiada terbatas.

Semua kebutuhan dan keinginan itu tentunya membutuhkan pemenuhan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka sudah seyogyanya pemerintah harus dapat menyusun strategi agar dapat menjaga stabilitas kebutuhan dasar serta non dasar sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	CAPAIAN 2022		
			TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dan non dasar lainnya	Indeks Kebahagiaan	Indeks	N/A	N/A	N/A

Sesuai dengan dokumen RPJMD 2018-2023 maka untuk mengukur keberhasilan capaian misi pertama dilakukan melalui pengukuran capaian yang diperoleh pada sasaran sebagai berikut

- Terwujudnya ketahanan pangan
- Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
- Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Meningkatkan Sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
- Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat.

Sasaran 4 Terwujudnya Ketahanan Pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Di Indonesia sendiri pangan sering kita identikkan dengan beras, karena beras adalah jenis pangan yang merupakan makan pokok utama di Indonesia. Beras mempunyai peran yang sangat penting karna itu adalah makanan pokok yang wajib dipenuhi karena apabila pangan lebih kecil dibanding kebutuhan masyarakat maka hal itu bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Kondisi ketersediaan pangan yang memadai pada tingkat makro tidak serta merta dapat meningkatkan kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat tetapi dalam kenyataannya kekayaan sumber daya alam yang melimpah justru tidak seimbang dengan perkembangan ekonomi yang kita hadapi saat ini. Untuk itu perlu keterlibatan kebijakan pemerintah untuk mengelola dan mengendalikan pangan baik ketersediannya produksi maupun konsumsi.

Adapun capaian terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat diukur lewat capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Terwujudnya ketahanan pangan

INDIKATOR KINERJA	2020	2021	CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi	76,8	79,10	82	76,80	93.66	82.5	93.09

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Skor PPH ini berfungsi sebagai:

1. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan.
2. *Baseline* data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah.
3. *Baseline* data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

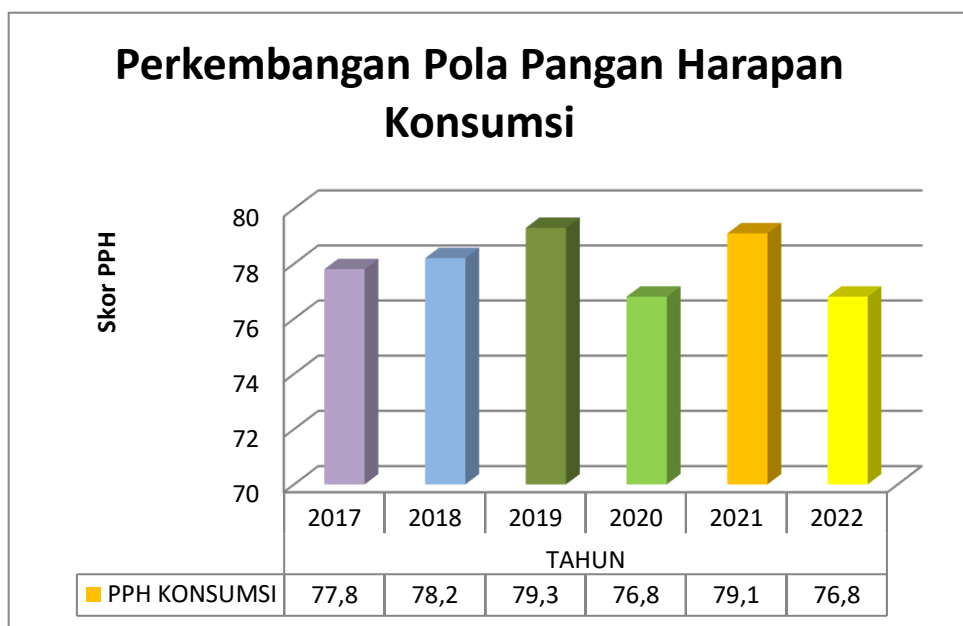
Berdasarkan tabel di atas pada indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang dianalisis tahun 2022 menunjukkan data capaian 93.66%, dengan realisasi sebesar 76,80. Capaian realisasi ini mengalami penurunan sebesar 2,3 point dikarenakan terjadi perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan konsumsi kelompok pangan jenis padi-padian dan minyak dan lemak, sementara terjadi penurunan konsumsi kelompok pangan jenis umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, dan sayur buah. Peningkatan konsumsi

beras, bisa diakibatkan salah satunya dari faktor sistem kerja WFH (Work From Home) selama Pandemi Covid-19, karena pekerjaan dilaksanakan dari dalam rumah, sehingga konsumsi beras di dalam rumah cukup meningkat signifikan. Juga berbagai bantuan pangan pokok (beras) banyak diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat selama Pandemi. Sehingga akses/keterjangkauan masyarakat terhadap beras untuk dapat langsung dikonsumsi pun meningkat. Penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat banyaknya pekerja yang dirumahkan juga menjadi faktor penurunan nilai skor PPH Konsumsi karena dengan daya beli yang lemah mengakibatkan belanja bahan makanan diutamakan pada belanja bahan pokok saja atau tidak bervariasi. Skor PPH yang menurun menjadi indikator bahwa pola konsumsi pangan di masyarakat Kabupaten Bandung Barat kurang beragam dan bergizi seimbang, untuk mencapai hidup sehat, aktif dan produktif.

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	304,6	1,273	61,6	60,6	0,5	30,8	30,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	65,1	73	3,5	3,5	0,5	1,8	1,7	2,5	1,7
3	Pangan Hewani	99,3	213	10,3	10,1	2,0	20,6	20,3	24,0	20,3
4	Minyak dan Lemak	29,9	267	12,9	12,7	0,5	6,4	6,3	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,8	5	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	1,0	0,1
6	Kacang-kacangan	23,0	51	2,4	2,4	2,0	4,9	4,8	10,0	4,8
7	Gula	11,9	45	2,2	2,2	0,5	1,1	1,1	2,5	1,1
8	Sayur dan Buah	189,8	79	3,8	3,8	5,0	19,1	18,8	30,0	18,8
9	Lain-lain	61,0	62	3,0	3,0	-	-	-	-	-
	Total		2,067	100,0	98,4		84,8	83,5	100,0	76,8

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat

Grafik 3.1

Perkembangan Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2017-2022

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan merupakan akses ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan akses pangan yang dikonsumsi. Dengan pendapatan maka rumah tangga memiliki kemampuan untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan energi dan gizi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka jumlah dan jenis makanan pun cenderung membaik. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh pada daya beli seseorang. Semakin tinggi pendapatan, daya beli seseorang juga meningkat, sehingga kemampuan untuk memilih dan membeli beragam makanan pun semakin tinggi, yang juga menandakan pola konsumsi pangan meningkat.

2. Jumlah Anggota Rumah Tangga

Jumlah anggota rumah tangga akan mempengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, maka kebutuhan pangan yang dikonsumsi akan semakin bervariasi karena masing-masing anggota keluarga mempunyai selera yang berbeda.

3. Tingkat Pengetahuan Ibu RumahTangga

Sebagai penyedia dan pengolah bahan makanan menjadi bahan siap konsumsi, ibu rumah tangga berperan dalam menyajikan makanan yang siap dikonsumsi yang memenuhi khaidah Bergizi, berimbang, sehat, aman dan halal (B2SAH).

4. Preferensi Konsumsi Pangan

Tingkat kesukaan masyarakat terhadap jenis pangan tertentu yang sudah menjadi kebiasaan dan budaya. Diperlukan perubahan pola pikir/ perubahan paradigma dalam mengkonsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang, aman dan halal.

5. Intervensi/ sosialisasi dan bimbingan Pemerintah

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan anggaran agar lebih banyak melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan secara berimbang.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Perilaku sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa makan itu asal kenyang saja sehingga tidak memperhatikan komposisi gizi. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras, konsumsi pangan yang monoton / tidak beragam dan tidak sesuai gizi yang seimbang.
2. Sebagian masyarakat lebih memilih makanan siap saji (mie instan, *fried chicken*, dll) sehingga pola konsumsi masyarakat kurang beragam.

3. Daya beli masyarakat menurun akibat pandemic sehingga makanan yang dibeli tidak beragam;
4. Jarak tempat tinggal ke pasar berpengaruh terhadap jumlah dan variasi bahan makanan yang dibeli;

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Memberikan bantuan untuk memanfaatkan pekarangan sekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari hari (Program Pekarangan Pangan Lestari/ P2L);
2. Memperbanyak pasar murah di daerah daerah;
3. Memberikan subsidi pada komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga masyarakat masih mampu untuk membeli.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Lebih memanfaatkan dan menggalakkan menu menu makanan yang berasal dari sumber daya lokal;
2. Melakukan sosialisasi akan pentingnya pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH);
3. Mengadakan pendampingan/ pelatihan cara mengolah makanan menjadi menu makanan yang berkelas.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Capaian Keuangan			Program
		2022			2022			
		Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Reslisasi Anggaran (Rp)	%	
Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81	79,1	97,5	2.386.594.736	2.350.108.996	98,47	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
								Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

								Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
								Program Penanganan Kerawanan Pangan
								Program Pengawasan Keamanan Pangan

Sasaran 5 Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

Masyarakat menghasilkan suatu kebudayaan melalui proses sosialisasi. Kebudayaan selalu mengikuti keberadaan masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak menghasilkan kebudayaan dan tidak akan pernah tercipta suatu wujud kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Namun, meskipun budaya diciptakan oleh masyarakat, budaya tersebut dapat pula mengendalikan masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat haruslah pandai dalam mengatur arah gerak dari kebudayaannya. Kesadaran budaya merupakan sikap positif manusia dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kesadaran budaya sangatlah dibutuhkan dalam mengelola perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Hal ini dikarenakan oleh seringnya perbedaan budaya yang menimbulkan konflik-konflik di dalam masyarakat. Masyarakat terkadang lupa bahwa pada dasarnya setiap masyarakat memiliki pola dan corak kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Sehingga mereka cenderung memperlakukan sama pada setiap bentuk kebudayaan. Padahal budaya itu sendiri terbentuk sesuai dengan corak masyarakat yang bersangkutan. Sikap semacam inilah yang sering sekali memicu kesalahpahaman yang berujung konflik etnis. Dengan kesadaran yang di terapkan oleh anggota masyarakat, maka diharapkan integrasi sosial akan tetap terjaga.

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Objek
Pemajuan Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA	2020	2021	CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	- 53%	40%	32 %	17%	53,13%	32 %	53,13%

Berdasarkan tabel di atas pada indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan tahun 2022 menunjukkan data realisasi sebesar 17% dengan capaian 53,13, persentase capaian tersebut tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 32%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 23%. Data keberhasilan pemajuan kebudayaan yang dilestarikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Kebudayaan yang Dilestarikan Tahun 2022	
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20 Cagar budaya 16 Cagar budaya 2 Cagar budaya 1 Dokumen
Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang dilestarikan	1 Dokumen 52 Orang 5 pagelaran 5 Ritual
Jumlah Persiapan dan perencanaan Kebudayaan dan kesenian yang berjalan dengan baik	10 kegiatan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat

Adapun pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah memiliki Tim Cagar Budaya yang telah tersertifikasi oleh Kemendikbud, dimana Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) merupakan sekelompok ahli pelestarian

dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, dengan tersertifikasinya TACB di Kab. Bandung Barat ini diharapkan dapat membantu percepatan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Keberadaan organisasi didukung oleh dasar hukum atau kewenangan yang kuat;
2. Potensi sumber daya budaya yang memadai;
3. Dukungan pembinaan dan menumbuh kembangkan kebudayaan secara moril dan materil yang kuat;
4. Dukungan organisasi profesi seni dan budaya yang kuat dan mandiri.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Standarisasi profesi SDM kebudayaan dan pariwisata masih rendah;
2. Partisipasi masyarakat masih rendah;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya;
4. Kondisi lintas sektoral masih belum berjalan dengan baik;
5. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mengembangkan kebudayaan;
6. Status aset Situs/Cagar Budaya bukan milik pemerintah daerah.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Membangun koordinasi yang intensif baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan kebudayaan;
2. Meningkatkan kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan jaman sekaligus untuk menyaring masuknya

budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;

3. Memperkuat seni budaya kearifan lokal kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh;
4. Mengoptimalkan potensi CSR dalam pendanaan pengembangan kebudayaan.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target:

1. Membuat kajian roadmap pengembangan pemajuan kebudayaan, sehingga pengembangannya dapat terarah;
2. Mengadakan festival seni dan budaya rutin setiap tahunnya;
3. Melestarikan warisan budaya dan meningkatkan penyelenggaraan gelar seni budaya dalam rangka memperkuat budaya lokal;
4. Bekerjasama dengan kelompok seni budaya dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat;
5. Revitalisasi pemetaan kawasan wisata pada destinasi objek pariwisata Kabupaten Bandung Barat.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan sumber daya yang memadai diantaranya menggunakan sumber daya personil untuk mencapai target kinerja, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat memiliki 28 ASN yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain personil ASN, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat juga dibantu dengan tenaga kerja kontrak dalam melaksanakan tugasnya di kantor Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, serta Pegawai Lapangan yang mengurus Objek Wisata (Guha Pawon dan Curug Malela), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang membantu mengelola Desa Wisata, Kelompok Seni Budaya yang membantu dalam mengelola seni dan budaya di lingkungan masyarakat, PHRI dan ASITA yang membantu dalam pengembangan industri pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat dalam mengelola penggunaan anggaran dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Tahun 2022 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan urusan bidang pariwisata dan urusan bidang kebudayaan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya anggaran untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan kurang mencukupi dimana target yang harus dipenuhi sangat banyak. Namun efisiensi dalam penggunaan anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat masih dapat diatasi dan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

Sasaran 6 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud. Begitupun dengan pembangunan kawasan tak terlepas dari kebijakan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang tidak dapat dilepaskan dari K3 (ketertiban, kebersihan, dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat,

dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban.

Adapun capaian sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut.

Tabel 3.12
Capaian sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Penegakan Perda dan Perkada	74,96	97,91	100	100	100	100	100
Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	N/a	57	77	67,53	87,70	80	84,41

Berdasarkan tabel 3.12 di atas pada indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada tahun 2022 memperoleh capaian data capaian sebesar 100%, sedangkan target yang ditetapkan tahun pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %, artinya realisasi pada tahun 2022 sudah mencapai target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang memperoleh realisasi sebesar 97,91%, dan tahun 2020 sebesar 74,96%. Sedangkan untuk indikator Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan pada tabel 3.10 di atas menunjukkan data capaian tahun 2022 dengan realisasi 67,53 dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 77 atau dengan

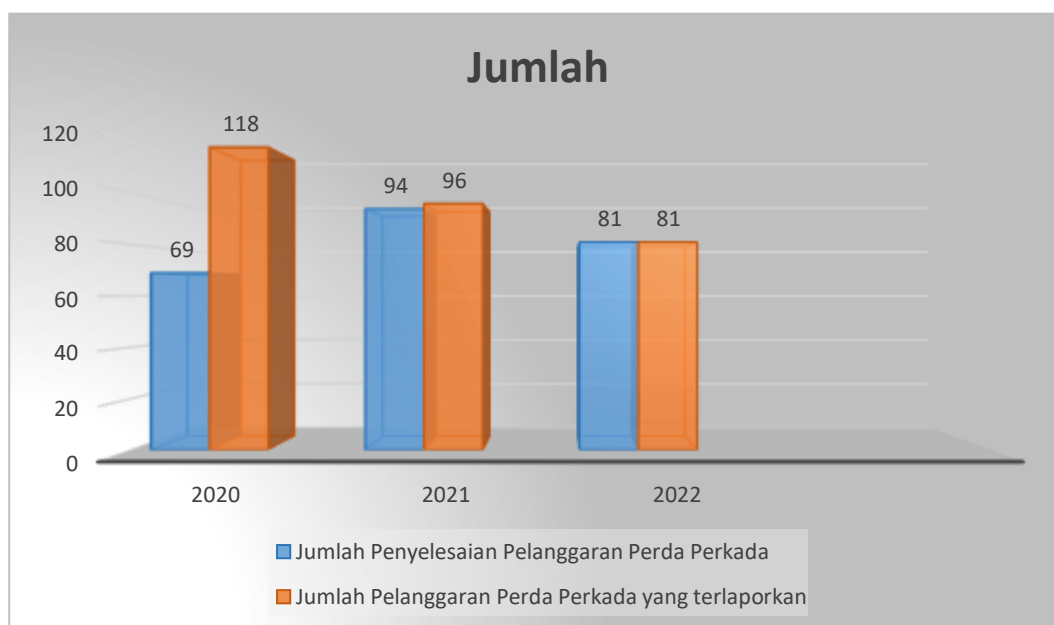
capaian sebesar 87,70%. Jika dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD sebesar 84,41%.

1. Persentase Penegakan Perda dan Perkada

Realisasi yang diperoleh dari indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan 2021, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.2

Perbandingan Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang Telaporkan Tahun 2020, 2021 dan 2022



Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Pada grafik diatas, untuk tahun 2022 diperoleh data pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 81 (delapan puluh satu) dengan jumlah pelanggaran yang ditangani sebanyak 81 (delapan puluh satu) atau capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100%. Adapun jika dibandingkan target akhir RPJMD yang di tetapkan yaitu 100% di tahun 2023, capaian tahun 2022 menunjukkan sinyal positif

yang baik hingga terpenuhi target tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap target akhir RPJMD di tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi sesuai rencana.

Adapun kegiatan Penegakan Perda yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 yaitu 1) Operasi penertiban narkoba warung remang-remang/PSK; 2) Operasi penertiban PKL; 3) Operasi penertiban bangunan tanpa IMB/bangunan liar; 4) Operasi penertiban reklame/spanduk; dan 5) Operasi penertiban anak jalanan. Dengan Perda yang ditegakkan adalah sebagai berikut :

1. Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
2. Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
3. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (sampai dengan bulan Juli 2021);
4. Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Berikut rekapitulasi pelanggaran Perda sepanjang tahun 2022.

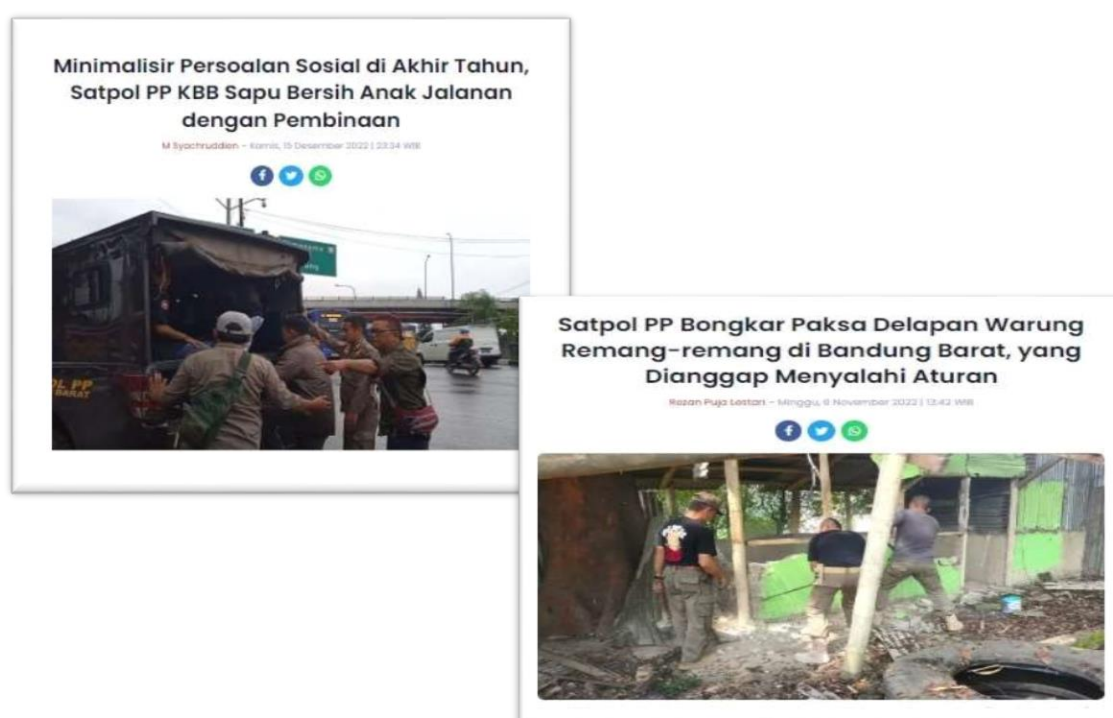
Tabel 3. 13
Rekapitulasi Pelanggaran Perda Tahun 2022

No	Jenis Penertiban	Jumlah Pelanggaran Perda Perkada yang dilaporkan	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Perkada	Tindakan	Ket.
1	PKL	44	44	Pemberian teguran, penertiban barang bukti	
2	Reklame	26	26	Penertiban reklame yang tidak berizin dan habis masa tayangnya	
3	IMB/ Bangunan liar	7	7	Pengawasan, pemberian teguran dan pemberian sanksi	
4	PSK	2	2	Penertiban/penangkapan untuk diberikan teguran dan didata	

No	Jenis Penertiban	Jumlah Pelanggaran Perda Perkada yang dilaporkan	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Perkada	Tindakan	Ket.
5	Anak jalanan	2	2	Penertiban/penangkapan untuk diberikan teguran dan didata	
Total		81	81		

Sumber : SatpolPP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berikut dokumentasi-dokumentasi pendukung pelaksanaan kegiatan penegakan Perda pada tahun 2022:



2. Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui indikator Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2022 hanya terealisasi 67,53% dari target yang ditetapkan sebesar 77%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 54%, maka mengalami kenaikan kinerja sebesar 13,53%. Hasil pengawasan atas laporan

masyarakat maupun pemantauan pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama tahun 2022, diperoleh data pelayanan kebakaran dan non kebakaran di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 422 kejadian dengan jumlah kebakaran 73 kali, Non Kebakaran 349 Kali yang mencapai SPM 39 kali dan Non Kebakaran sebanyak 246 kali kejadian yang mencapai SPM 67,53 %

Jika dibandingkan tahun 2021, terdapat 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Kejadian dengan jumlah kebakaran 73 (Tujuh Puluh Tiga) yang mencapai SPM 54 (Lima Puluh Empat) dan Non Kebakaran sebanyak 177 (SeratusTujuh PuluhTujuh) kejadian. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pelayanan kebakaran dan non kebakaran dari tahun 2022 ke tahun 2021 sebesar 33% (Tiga Puluh Tiga). Persentase kenaikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran Tahun 2022 didapat dari perhitungan sebagai berikut:

1. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

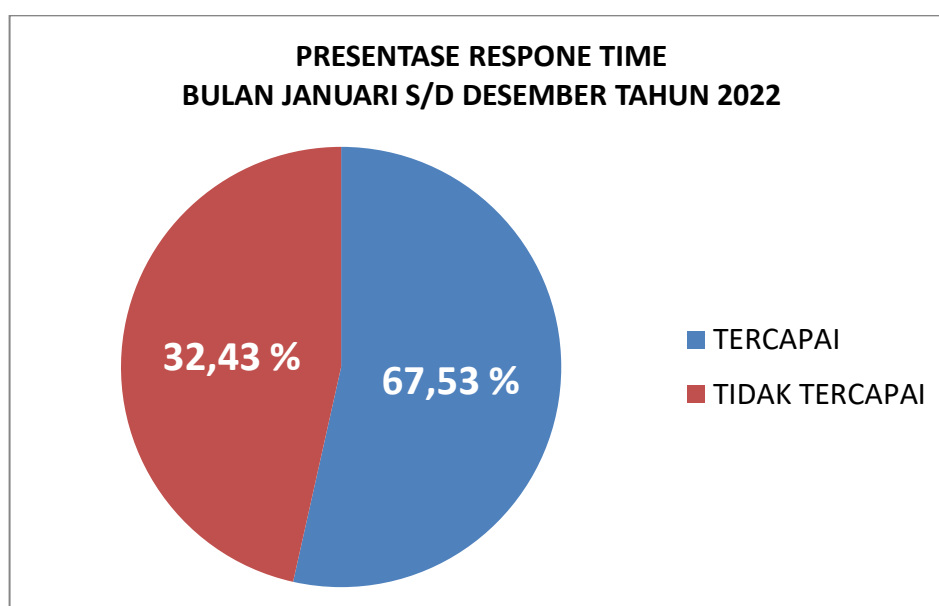
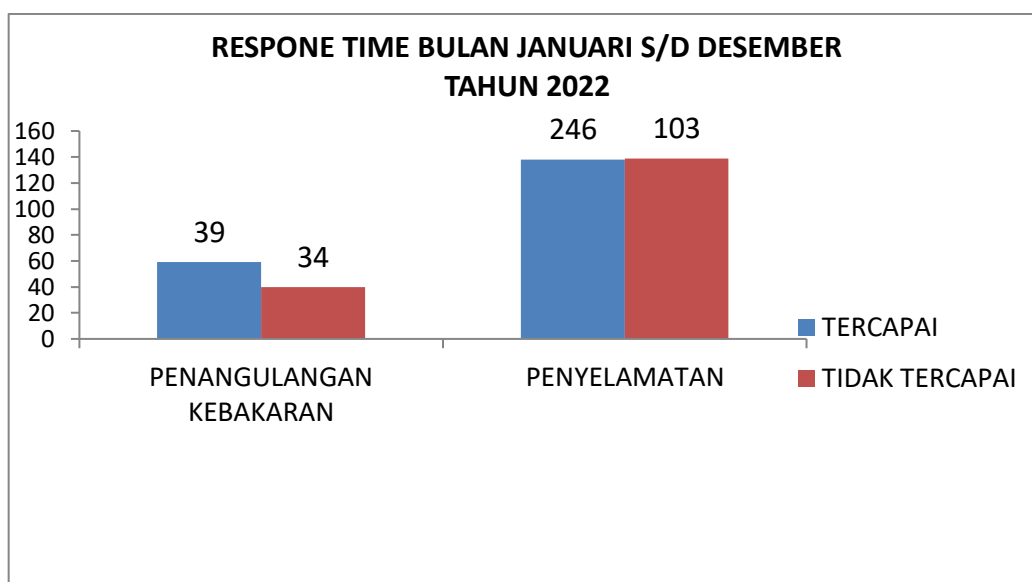
Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah $\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \times 100 \%$
--

2. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(<i>response time</i>) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah $\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \times 100 \%$
--

Perhitungan Persentase Pelayanan Sesuai SPM Tahun 2022 :

NO	STATUS RESPONSE TIME	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	JUMLAH
1	PENANGULANGAN KEBAKARAN	39	34	73
2	PENYELAMATAN	246	103	349
JUMLAH		285	137	422



A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Berkurangnya kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum hal ini dapat dilihat dari kurun waktu setahun hanya 81 kali kasus pelanggaran dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 96 kasus;
2. Kabupaten Bandung Barat terus berupaya melakukan penyesuaian dan perbaikan internal dengan perkembangan kapasitas dan kompetensi penyelenggaranya baik dengan kualitas dan kuantitasnya hal ini dapat terlihat dengan penambahan anggota CPNS pada Satpol PP KBB berjumlah 40 orang dengan diadakannya Bimbingan Teknis, Sosialisasi dalam meningkatkan kompetensi anggota baru;
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
4. Perlu adanya penambahan pos dengan rincian setiap populasi penduduk 30.000 jiwa harus dilindungi 1 Pos Kebakaran (tingkat Kelurahan), setiap populasi 120.000 jiwa harus dilindungi 1 Kantor Sektor Pemadam Kebakaran (tingkat Kecamatan), sedang untuk populasi 1.500.000 jiwa harus dilindungi 1 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota;

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hal ini dapat terlihat jumlah PPNS di Satpol KBB hanya dua orang dengan status masa berlaku KTA 1 orang kadaluarsa dan 1 orang masih aktif. Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah tindakan taktis, maka selain kebutuhan personil secara kuantitas, tetapi juga

secara kualitas diperlukan aparatur yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Bandung Barat yang saat ini masih sangat terbatas;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja yang dapat menghambat mobilitas gerak satpol PP KBB yang sering berinteraksi dengan masyarakat, kerap memerlukan kendaraan yang memadai agar selalu terjaga kesigapannya;
3. Jangkauan wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen menjadi hambatan dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain;
4. Kurang optimalnya relawan dari partisipasi masyarakat yang tersedia dikarenakan adanya program pelatihan yang tidak berkelanjutan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Mengoptimalkan peran PPNS dalam melaksanakan tugasnya;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dengan pemeliharaan secara rutin dan terus berupaya dengan mengajukan sarana dan prasarana yang baru.
3. Melaksanakan operasi dan patroli secara rutin dalam rangka penegakan Perda/Perkada dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Meningkatkan Layanan Respon Cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran, Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi dan Layanan Pendataan, Inpeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial untuk menerima aduan dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan pembuatan *google form* aduan masyarakat yang tautan linknya dicantumkan pada media sosial instagram;
2. Peningkatan sosialisasi keterlibatan masyarakat dalam penegakan Perda;
3. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan penegakan Perda lebih maksimal salah satunya melalui pengajuan revisi Perda terkait sanksi pelanggaran Perda;
4. Mengadakan sosialisasi resiko kebakaran terhadap masyarakat khususnya kepada pemilik bangunan yang tidak memperhatikan standar keselamatan gedung;
5. Melaksanakan Pelatihan atau Bimbingan Teknis dalam menunjang pelaksanaan program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dapat mendorong tercapainya indikator tersebut diantaranya adalah meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan teknis/bimtek atau pembinaan dan penyuluhan kebakaran kepada warga masyarakat, karena merekalah yang akan menjadi mitra terdepan dalam upaya penanggulangan dini ketika terjadi kebakaran dan melakukan kegiatan yang bersifat mitigasi kebakaran dan bencana lainnya.

Sasaran 7 Meningkatkan sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

Meningkatkan sinergitas dan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana merupakan komponen yang bisa ditingkatkan dalam penanggulangan bencana yang mempunyai peranan penting dalam setiap penanggulangan bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan peran masyarakat

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk mengukur kapasitas suatu daerah dalam rangka menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia yang telah dirilis oleh BNPB sebagai acuan daerah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal penanggulangan bencana. Serta memberikan strategi-strategi yang harus diambil dalam rangka meningkatkan kapasitas suatu daerah.

Kondisi geologis dan geografis menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai wilayah yang berpotensi rawan mengalami bencana alam. Peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Bencana Banjir, Gempa Bumi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, Gunung Meletus, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Multi Bahaya. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian gempa bumi dan tanah longsor. Kawasan rawan bencana longsor secara umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar, Cililin, Rongga, Gununghalu. Sedangkan untuk kawasan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua.

Dalam rangka mengurangi atau mencegah tingkat bahaya longsor, erosi dan sedimentasi, diperlukan adanya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di beberapa lokasi kawasan hutan. Sedangkan untuk mengamankan lahan sempadan sungai/pengairan/danau/waduk/bendungan/mata air dapat dilakukan dengan cara penghijauan atau menanami tanaman keras pada lahan sempadan sehingga menjadi ruang terbuka hijau. Permasalahan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, masih terdapat lahan kritis dan terlantar, hasil identifikasi menunjukkan bahwa lahan kritis saat ini diantaranya ada di wilayah Padalarang, Cipatat, Ngamprah, Cililin dan Cisarua. Permasalahan utama kebencanaan di Kabupaten Bandung Barat adalah:

- (1) Banyaknya sumber ancaman (*hazard*) bencana.

- (2) Banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- (3) Tingkat kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi terhadap ancaman bencana.
- (4) Masih kurangnya kemampuan (*capacity*) dalam penanggulangan bencana.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki resiko bencana yang tinggi, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$IRBI = Ancaman \times \frac{Kerentanan}{Kapasitas}$$

Dimana ancaman (*Hazard*) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api dan lainnya. Kerentanan (*Vulnerability*) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu; (3) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Indeks Resiko Bencana Indonesia ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat resiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Dimana perhitungan tingkat resiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor *Hazard*, *Vulnerability* dan *Capacity*.

Indeks Resiko Bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks resiko,

komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks resiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas daerah (komponen kapasitas) yaitu melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Oleh karenanya dengan IKD yang mengukur kapasitas daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan Indeks Resiko Bencana. Dalam pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dimana memperhatikan 7 Prioritas dan 71 indikator.

Tabel 3.14
Capaian Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Resiko Bencana	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	100	Sedang	100

Berdasarkan tabel di atas pada indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2022 menunjukkan data capaian 100% dimana pada tahun 2022 berada pada kategori **sedang** dengan nilai 0,47, jika dibandingkan dengan tahun 2021 berada pada kategori **sedang** dengan nilai 0,52 dan pada tahun 2020 berada pada kategori **sedang** dengan nilai 0,51 sehingga setiap tahunnya walaupun Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Bandung Barat tetap berada pada kategori sedang akan tetapi dari segi nilai mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya beberapa dokumen yang sudah habis masa belakunya seperti Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Gunung Merapi dan Renkon Sesar Lembang. Dapat terlihat hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

menggunakan tools sesuai pedoman teknis penilaian IKD yang dikeluarkan oleh BNPB sebagai berikut:

Tabel 3.15
Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bandung Barat

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.70	0.47	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.47		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.42		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.48		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.38		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.45		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.58		

NO.	PRIORITAS	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
1	INDEKS PRIORITAS	0.70	0.47	0.42	0.48	0.38	0.45	0.58
2	INDEKS KAPASITAS DAERAH	0.47						

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung Barat

Grafik 3.3
Indeks Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Sumber : BPBD Kabupaten Bandung Barat

Dapat terlihat dari tabel di atas dari 7 prioritas yang paling signifikan penurunannya adalah di prioritas pengkajian resiko dan perencanaan terpadu yang mana pada tahun 2022 ini beberapa dokumen pokok BPBD telah habis masa berlakunya seperti Dokumen Kajian Resiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontijensi Gunung Merapi dan Dokumen Rencana Kontijensi Sasar Lembang. Untuk mewujudkan kabupaten Tangguh bencana yang berkolerasi dalam penurunan indeks resiko bencana terdapat beberapa prioritas yang harus ditingkatkan untuk tahun selanjutnya sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu Pengkajian resiko dan Perencanaan terpadu.

Selain melaksanakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Resntra Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki urusan Wajib yaitu Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dimana memiliki 3 layanan yang harus diberikan kepada masyarakat yaitu :

1. Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dari ketiga pelayanan tersebut dapat disajikan hasil penerapan SPM Sub Urusan bencana pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana dimana target adalah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana mendapatkan layanan ini setiap tahunnya. Berdasarkan dokumen KIE sebanyak 254,660 orang berada di daerah rawan bencana untuk keseluruhan jenis bencana. Pada Tahun 2022 untuk layanan informasi rawan bencana mendapatkan anggaran Rp. 695.134.200,- terealisasi sebesar

Rp. 695.134.200,- dengan realisasi sebanyak 500 orang. Jika disandingkan dengan target penerapan SPM hanya mencapai 0,22 %

2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

Untuk Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana dimana target adalah seluruh warga negara dan aparaturnya yang berada di daerah rawan bencana mendapatkan layanan ini setiap tahunnya. Berdasarkan dokumen KRB sebanyak 254.660 orang berada di daerah rawan bencana untuk keseluruhan jenis bencana. Pada Tahun 2022 untuk layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana mendapatkan anggaran Rp.1.478.862.727,- terealisasi sebesar Rp. 1.478.862.727,- dengan realisasi sebanyak 550 orang. Jika disandingkan dengan target penerapan SPM hanya mencapai 0,20 %

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dimana target adalah seluruh warga negara korban bencana mendapatkan layanan ini setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 untuk layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mendapatkan anggaran Rp.402.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 367.200.000,- atau 91,16%. Dari segi Kinerja untuk pelayanan ini dapat terealisasi 99,68 atau sebanyak 1.253 orang yang berhasil diselamatkan terdapat 4 orang meninggal dunia untuk 172 kejadian bencana selama tahun 2022.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;

2. Adanya Kajian Resiko Bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah;
3. Keberhasilan Evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk tim reaksi cepat yang melakukan assessment dan evakuasi korban bencana.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya anggaran dalam mitigasi bencana;
2. Kurangnya dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
3. Adanya pandemi covid 19 yang masif di seluruh Indonesia khususnya, mengubah fokus penggunaan anggaran dan pola tatanan kehidupan masyarakat yang semakin terbatas;
4. Sinergitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
5. Sistem informasi bencana belum terintegrasi secara optimal.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Melakukan edukasi dan memfasilitasi desa Tangguh bencana yang telah terbentuk untuk mampu menanggulangi bencana Covid-19 ini dengan cara membangun kebersamaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Memfasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam evakuasi dan assessment awal bencana;
3. Membangun koordinasi yang insentif baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan penanganan bencana.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Meningkatkan Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi atau pakar dan media massa dalam penanggulangan bencana;

2. Memanfaatkan dana CSR untuk program kegiatan Mitigasi bencana;
3. Memaksimalakan seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat untuk membentuk Desa Tangguh Bencana.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. BPBD Kabupaten Bandung Barat memiliki 22 ASN yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain personil ASN, dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Bandung Barat juga dibantu dengan tenaga kerja kontrak dalam melaksanakan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) serta Fasilitator sebagai pembentukan Desa Tangguh Bencana. Pusdalops PB membantu tugas BPBD Kabupaten Bandung Barat dalam bidang komunikasi, informasi dan data, sedangkan TRC membantu tugas BPBD Kabupaten Bandung Barat pada saat terjadi bencana yaitu melakukan assessment awal dan evakuasi.

Dalam penggunaan anggaran BPBD Kabupaten Bandung Barat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Tahun 2022 dan disesuaikan dengan kabutuhan. Anggaran untuk kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan pada saat terjadinya bencana. Untuk keadaan darurat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bandung Barat selain anggaran yang terdapat dalam DPA juga digunakan Dana Tak Terduga yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana. Anggaran untuk mitigasi bencana yang kurang

mencukupi dimana target yang harus dipenuhi sangat banyak dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk memenuhi SPM Sub Urusan Bencana sangatlah banyak. Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

Sasaran 8 Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, menyebutkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pecandu narkotik dan obat-obat terlarang.

Perlindungan sosial erat kaitannya dengan mendapatkan pekerjaan layak untuk penghidupan dan untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan. Perlindungan sosial ini tidak dapat bekerja sendiri untuk mengurangi kemiskinan secara efektif strateginya harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro-pekerjaan. Selain mengatasi kemiskinan, permasalahan pada urusan sosial di Kabupaten Bandung Barat adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini disebabkan oleh: 1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; 2. Belum optimalnya penanganan bencana sosial; 3. Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan human trafficking; 4. Belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi

sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial; 5. Masih rentan terhadap konflik sosial; 6. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan 7. Meningkatnya PPKS akibat adanya Pandemi COVID-19.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sesuai dengan dokumen RPJMD 2018-2023 bahwa capaian sasaran mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diukur dengan menggunakan 3 indikator kinerja, yaitu Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat. Adapun penjelasan capaian kinerja indikator tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Sasaran mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Angka PPKS yang Tertangani	51,1	52,14	53,36	47,56	89,13	54,57	87,15
Indeks Kerukunan Umat Beragama	58,33	81,20	72	83,59	116,10	73	114,51
Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	32	34	80	52,18	65,23	100	52,18

Berdasarkan tabel diatas capaian pada sasaran mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat dari 3 (tiga) indikator kinerja dinyatakan berhasil pada nilai rata-rata 90,15%. Berikut penjelasan pada masing-masing indikator :

1. Persentase Angka PPKS yang Tertangani

Indikator Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 berada pada angka realisasi sebesar 47,56% dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 53,36% sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 89,13%. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya yang berada di angka 51,1% pada tahun 2020 dan 52,14% untuk tahun 2021.

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Selanjutnya untuk mengukur capaian sasaran mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat indikator yang digunakan adalah dengan mengukur tingkat

kondusifitas manajemen konflik di masyarakat melalui indeks kerukunan umat beragama. Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun pada sisi lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Hal ini merupakan sisi negatif dari agama itu sendiri dalam mempengaruhi masyarakat. Dan hal ini juga telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat. Mengingat pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama dan melihat potensi konflik yang ada, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadikan salah satu sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan table 3.14 di atas capaian Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi untuk tahun 2022 sebesar 83,59 dari target yang ditetapkan sebesar 72 dengan capaian yang melebihi target sebesar 116,10%.

3. Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat

Indikator Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat tahun 2022 memperoleh realisasi sebesar 52,18%, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 80 %, dengan capaian sebesar 65,23%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu tahun 2020 yang memperoleh realisasi sebesar 32%, dan tahun 2021 sebesar 34%.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan optimal seperti dalam penanganan Kasus PPKS yang bekerjasama dengan masyarakat dan pekerja sosial sebagai mitra kerja dimana masyarakat berperan memberi

pengaduan ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Sosial.

2. Adanya kegiatan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan yang mendukung indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama seperti dilaksanakannya Sosialisasi deteksi dini dan peran masyarakat dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Bandung Barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cenderung bertambah, masih perlu adanya pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
2. Kurang validnya data kemiskinan, data PPKS dan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Kurangnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama sehingga menimbulkan pro dan kontra antar umat beragama karena ketidaksepahaman.
5. Terdapat masyarakat yang tidak setuju akan pemimpin di wilayah setempat dari kalangan non muslim dan tidak setujunya masyarakat dalam pembangunan rumah ibadah lain.
6. Munculnya pemahaman-pemahaman radikal atau intoleran dari beberapa kelompok agama di Kabupaten Bandung Barat.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Memberikan Program Kewirausahaan Sosial (PROKUS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

agar bisa lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri di bidang yang mereka pelajari.

2. Membangun PUSKESO (Pusat Kesejahteraan Sosial) di 165 Desa di Kabupaten Bandung Barat.
3. Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada pengurus LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial).
4. Mengintensifkan koordinasi dengan instansi yang terlibat dan rekan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Kodim 0609 Kota Cimahi, Polres Cimahi, FKUB dan juga Ormas, OKP Kepemudaan, LSM, BIN dan FORKOPIMDA yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan juga perangkat daerah lainnya.
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKUB dan FKDM di Kabupaten Bandung Barat dengan memberikan bantuan hibah, diantaranya dengan memberikan hibah kepada FKUB.
6. Melakukan pengawasan dan monitoring terkait isu-isu sara dan konflik yang beredar di masyarakat melalui media sosial.
7. Pendidikan politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik Bagi Perempuan dan Pemuda dalam rangka sukses Pemilu dan Pilukada 2024.
8. Adanya penertiban administrasi ormas dengan melakukan verifikasi ormas, okp dan LSM Tingkat Kabupaten Bandung Barat serta mengoptimalkan peran partai politik.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis ke provinsi dan antar kabupaten dalam rangka pemulihan dan pengembangan PPKS.
2. Meningkatkan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS serta

penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

3. Meningkatkan pembinaan dan penanganan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan wanita rawan sosial ekonomi.
4. Membangun Ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (Puskomin) yang dirancang untuk melakukan evaluasi, monitoring dan membahas isu-isu strategis di bidang kewaspadaan dini serta membahas, memantau situasi stabilitas politik di Kabupaten Bandung Barat.

TUJUAN 4

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah digambarkan salah satunya pada organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan peran pembangunan dan pemerintahan yang didelegasikan ke berbagai unit dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan.

Tabel 3.17
Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	CAPAIAN 2022		
			TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	N/A	N/A	N/A

Dengan indikator tujuannya ialah “Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender” yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Melalui tujuan 4 ini yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bisa meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten untuk kedepannya yang dimulai dari sejak dini. Untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat;
2. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
3. Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Sasaran 9 Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Lembaga Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat,

perbaikan lingkungan pendidikan, ekonomi, kesehatan, meningkatkan kemampuan masyarakat dari berbagai bidang yang mereka kuasai. Selain dari pada itu, lembaga kemasyarakatan merupakan alat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, maka di harapkan dapat terwujudnya kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Dalam hal ini, peran pemerintah juga sangat penting untuk bisa meningkatkan kapasitas dan terus diberdayakan melalui indikator-indikator yang terdapat dalam sasaran “Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat”.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses penyelenggaraan kondisi Lembaga yang ada di desa yang kuat dan mandiri dengan cara penghubung antara masyarakat dan desa, menumbuhkan inisiatif masyarakat, meningkatkan keterampilan, merubah cara berfikir untuk merubah kesejahteraan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan juga merupakan wadah dalam memberdayakan masyarakat Desa sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan Lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di Desa.

Capaian terwujudnya peningkatan dari sasaran tersebut tergambar dari capaian 2 indikator dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan
Desa dan Lembaga Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	73,51	82,34	91,17	91,82	100,71	100	91,82
Persentase Desa Mandiri	16,97	24	24	37,58	156,58	27	139,19

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan

mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LKD terdiri atas RT, RW, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Tim Penggerak PKK.

Berdasarkan tabel hasil capaian di atas, realisasi pada indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif pada tahun 2022 memperoleh realisasi sebesar 91,82% sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 91,17%, artinya capaian realiasi melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian 100,71%. Jika dibandingkan dengan capaian akhir RPJMD capaian untuk indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif sebesar 91,82% artinya masih perlu dilakukan upaya-upaya yang maksimal agar target RPJMD tersebut dapat tercapai. Sedangkan realisasi untuk indikator kinerja Persentase Desa Mandiri menunjukkan data capaian 156,58% dengan realisasi sebesar 37,58% dari target yang ditetapkan sebesar 24%. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 mengalami kenaikan dan telah melebihi target, dimana target tahun 2022 adalah adanya Desa berstatus Mandiri sebanyak 40 Desa, realisasi capaiannya sebanyak 62 Desa.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Adanya Regulasi dalam bentuk Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa yang berfungsi dalam perlindungan terhadap eksistensi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Adanya Surat Keputusan Kepala Desa yang melindungi eksistensi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Pembinaan secara berkala melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan Bimbingan teknis tentang adminitrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Kecermatan Desa dalam membaca rekomendasi dari masing-masing indeks komposit tahun sebelumnya sebagai dasar

intervensi kegiatan yang dituangkan dalam APBDes mengacu pada rekomendasi berdasarkan data Indeks Desa Mandiri.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

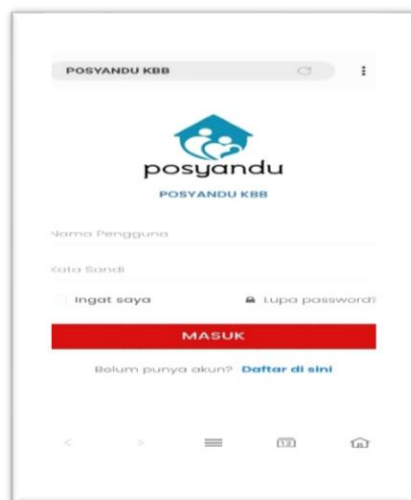
1. Faktor politik internal seperti bergantinya kepemimpinan di Desa berdampak pula terhadap pergantian Pengurus LKD;
2. Belum Optimalnya pendayagunaan Sumberdaya lembaga Khususnya eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Desa akibat dari belum tersosialisasikanya regulasi (Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa);
3. Hasil pembangunan sarana prasarana belum signifikan mendongkrak nilai IDM dari sebagian Desa;
4. Masih ada kegiatan yang dilaksanakan di desa yang belum mengacu pada rekomendasi berbasis data IDM.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Membangun pemahaman Pemerintah Desa tentang keberadaan LKD sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa dalam proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa;
2. Mendorong Pemerintah Desa dalam proses Kaderisasi pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa dan melakukan pembinaan secara terus menerus dalam pengorganisasian LKD;
3. Penyusunan perencanaan kegiatan di Desa dalam RKPDes mengacu pada rekomendasi hasil pengukuran IDM tahun sebelumnya;
4. Meningkatkan peran pemerintah Kecamatan dan Kabupaten dalam validasi dan verifikasi hasil pengukuran IDM;
5. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi ada sinergitas pendataan desa berbasis aplikasi seperti antara aplikasi.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Membuat Aplikasi Posyandu berbasis Web :
<http://sip.bandungbaratkab.go.id>



2. Peningkatan kapasitas dan peran Desa dalam mendorong peningkatan indikator IDM.
3. Adanya dukungan anggaran dari Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa yang dapat menunjang peningkatan IDM missal bankeu pencegahan/penurunan stunting dapat menunjang peningkatan score dimensi sosial.

E. Prestasi Yang Dicapai

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menerima Penghargaan atas capaian 100 % Tranformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM (UPK) menjadi BUMDES Bersama.



Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Sasaran 10 Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Langkah yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah melalui pembentukan kelompok yang akan meningkatkan solidaritas dengan gotong royong masyarakat bahkan untuk memberikan inovasi dan ide-ide baru lebih cepat dan mudah dikontrol keberhasilannya. Dalam pengembangan kelompok masyarakat harus memperhatikan dan meningkatkan kapasitas yang dimiliki. Dalam hal ini, peran pemerintah juga sangat penting untuk bisa meningkatkan kapasitas dan terus diberdayakan melalui indikator-indikator yang terdapat dalam sasaran “meningkatkan kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat”.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam berbagai bidang olahraga sebagai upaya dalam menggapai prestasi diberbagai ajang olahraga, serta mewujudkan minat berwirausaha pada pemuda sebagai upaya menciptakan, menumbuhkembangkan kecakapan pemuda dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing. Pengembangan ekonomi di Bandung Barat, tidak hanya menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan melibatkan modal serta pelaku usaha besar, namun juga dikembangkan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan peran serta pemuda yang memiliki potensi serta pasar tertentu yang akan memberikan dampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Capaian terwujudnya peningkatan dari sasaran tersebut tergambar dari capaian 2 indikator dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan
Kelompok Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Layanan Kepemudaan	N/a	9,20	7,83	7,83	100	10,30	76,02
Indeks Pembangunan Olahraga	N/a	0,41	0,499 (Sedang)	0,42	84,17	0,499 (Sedang)	84,17

Berdasarkan tabel di atas pada indikator Persentase Layanan Kepemudaan tahun 2022 menunjukkan realisasi sebesar 7,83% dari target sebesar 7,83% sehingga untuk capaiannya memperoleh persentase sebesar 100%, untuk target indikator sasaran tahun ini mengalami penurunan sebesar 1,37% dari tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian untuk tahun 2022 sebesar 76,02%.

Untuk perhitungan Persentase Layanan Kepemudaan didukung oleh 2 Program yaitu Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan/pelatihan yang diikuti oleh pemuda (usia 16-30 tahun) diantaranya Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan, Pengembangan Kewirausahaan, Kepeloporan Pemuda, dan kepramukaan.

Persentase layanan kepemudaan dijabarkan sebagai berikut:

$$\% \text{ Layanan Kepemudaan} = \frac{\text{Jml Pemuda yang mengikuti layanan}}{\text{Jml Pemuda (usia 16 – 30) di KBB}} \times 100\%$$

$$7,83\% = \frac{34.410}{439.579} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk mencapai sasaran **meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat** pada Indikator Indeks

Pembangunan Olahraga tahun 2022 menunjukkan target indeks sebesar 0,499 (sedang) dengan realisasi indeks sebesar 0,42 dari target, sehingga untuk capaiannya sebesar 84,17%. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indeks komposit dari indeks ruang terbuka, indeks SDM keolahragaan, dan Indeks Partisipasi masyarakat. Capaian IPO di Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,42. Untuk target indikator sasaran tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,01 dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu mencapai 0,41.

Berikut data Indeks Pembangunan Olahraga dan komponennya di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021:

- a. Indeks Ruang Terbuka : 0,58
- b. Indeks SDM Keolahragaan : 0,33
- c. Indeks Partisipasi Masyarakat : 0,34

Indeks Pembangunan Olahraga : 0,42

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pembangunan Olahraga } 0,42 = \frac{0,58 + 0,33 + 0,34}{3}$$

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Komunikasi dan Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Stake Holder Kepemudaan sudah berjalan dengan lancar dan akan lebih ditingkatkan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai.
3. Sistem dan pola koordinasi serta kerjasama terjalin dengan baik menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditentukan serta memahami setiap tugas yang diberikan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Kurangnya komitmen dalam kepengurusan lembaga kepemudaan atau organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan dan pendataan organisasi kepemudaan.

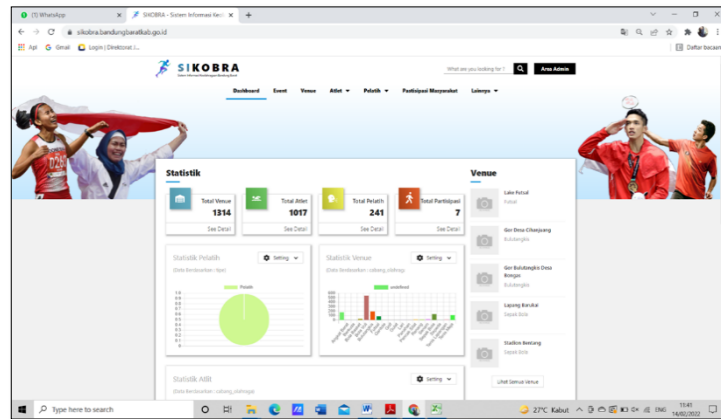
2. Kurangnya sosialisasi program kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepemudaan.
3. Sumber Daya ditinjau dari Sport Development Index masih dalam kategori rendah, disebabkan indeks tingkat kebugaran jasmani tidak masuk kedalam indeks kumulatif dalam Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Diperlukanya Peraturan Bupati Bandung Barat (Perbup) Kepemudaan sebagai ladaan hukum pembangunan kepemudaan;
2. Penyusunan/Pengumpulan Data Kepemudaan untuk mengetahui kondisi kepemudaan dalam perancangan rencana kerja;
3. Dalam rangka meningkatkan indikator Sumber Daya Manusia keolahragaan diharapkan adanya pencatatan data atau pemuktahiran data base seluruh pelaku olahraga;
4. Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga diharapkan lebih banyak memfasilitasi kegiatan olahraga dimasyarakat dalam bentuk event/ kejuaraan/festival olahraga dengan menerapkan protokol kesehatan disetiap kegiatan keolahragaan;
5. Diperlukan adanya kegiatan yang secara khusus atau rutin melaksanakan test kebugaran bagi atlet terutama yang akan mengikuti event/kejuaraan.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Pengelolaan data informasi Sektoral Olahraga melalui Aplikasi SIKOBRA “Sistem Informasi Keolahragaan Kabupaten Bandung Barat”.



2. Pengelolaan data informasi Kepemudaan melalui Website SIDAKEP “Sistem Informasi Data Kepemudaan”.
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung mobilitas pelaksanaan program kegiatan kepemudaan.
4. Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama lintas Sektor diantara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Bandung Barat dalam hal penanganan kegiatan kepemudaan.
5. Penyusunan Rencana Aksi Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2023.
6. Pembangunan Gedung Pemuda/Olahraga pada Tahun 2023.

E. Prestasi

Perolehan Medali Event/ kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi pada FORPROV IV, PEPARDA VI, dan PORPROV XIV Tahun 2022

No.	NAMA	INORGA	NOMOR	MEDALI			KETERANGAN
				EMAS	PERAK	PERUNGGU	
1. OLAHRAGA TRADISIONAL DAN KREASI BUDAYA (OTKB)							
1	JANUBA FAUZIAH	PORTINA	EGRANG PUTRI		✓		PERAK BEREKU
2	SUSILAWATI						
3	SILVIANA PUTRI						
4	SITI RAHMAH						
5	AGUS HIDAYAT	PORTINA	EGRANG PUTRA I	✓			EMAS BEREKU
6	WILDAN NUGRAHA						
7	RIO HAMDANI						
8	ICHSAN MAULANA						
9	SAEFUL RAHAYU	PORTINA	EGRANG PUTRA II		✓		PERAK BEREKU
10	FARIZA RIAN AGUNG						
11	FAUZI						
12	DYWA IKAL M						
13	WANDA	PORTINA	LARI BALOK PUTRA		✓		PERAK BEREKU
14	ARIF ARDIANSYAH						
15	DIKA ALDI ARDIAN						
16	M. RIZKA						
17	HANIF	PORTINA	SUMPITAN			✓	PERUNGGU BEREKU
18	YANI						
19	AMILIA PEBRIANTI	PORTINA	TAROMPAH PANJANG PUTRI		✓		PERAK BEREKU
20	LENI						
21	LILIS PUTRI						
22	RESTU GUSTI AYU						
23	TAZQIA PUTRI	PORTINA	TAROMPAH PANJANG PUTRA		✓		PERAK BEREKU
24	MUHAMAD RYAN						
25	PARHAN IBRAHIM						
26	M. FAHMI ALAN						
27	NURDIN	PORTINA	HADANG PUTRA			✓	JUARA BERSAMA
28	AGUNG MULYLANA						
29	ANGGA PRATAMA						
30	RAY DENAY MAHESA						
31	DYWA IKAL M						
32	RIFKI ALVIANA						
33	SANDI MIFTAHUL FATAH						
34	SOEKARNO GAMAL ABDUL						
35	YUDI ILHAM CAHYA WIGUNA	PORTINA	HADANG PUTRI	✓			EMAS BEREKU
36	ATIN NOVIANTI						
37	ANISA CINTYAASIH R						
38	ANISA SOPIANTI						
39	ROSSANTI INDAWATI						
40	NISA REINA HANIFAH						
41	TIARA AULIA OCTOVA						
42	QANITA SAIFANI SELANO						
43	RIKA NURAENI	BKI	SEMI KEMPO PRAKADET PA 30 KG			✓	PERUNGGU PERORANGAN
44	YULIUS GIRI						
45	PUTRA AREBA ARIF KURNIA	INATKF	KATA BEREKU CAMPURAN		✓		PERAK BEREKU
46	GHAITSA JUNISTA HANDAYANI						
47	EKA SURYA HERMAWAN						
48	AIRA SYAIDAH ZAHROTUL SHIPA						
49	AZMI SALSABILA KIRANI	FESPATI	UMUM PUTRA		✓		PERAK PERORANGAN
50	ASEP ENDAD						
51	ARUM CIPTA NINGTYAS	FESPATI	UMUM PUTRI			✓	PERUNGGU PERORANGAN
52	RAFA AULIA	FESFATI	PELAJAR			✓	PERUNGGU PERORANGAN
53	SUHERMAN	PELANGI	53.58			✓	PERUNGGU PERORANGAN
54	BAYU PERMANA SAKTI	AKTI	JURUS SENJATA PANJANG	✓			EMAS PERORANGAN

No.	NAMA	INORGA	NOMOR	MEDALI			KETERANGAN
				EMAS	PERAK	PERUNGGU	
2. OLAHRAGA PETUALANGAN DAN TANTANGAN (OPT)							
1	OKVAN CAHYA SOPIANA	INDOF3 (IF3)	DUO ROUNTINE	✓			EMAS DOUBLE (OKVAN & REZA)
2	M REZA PAHLEVI	INDOF3 (IF3)	DUO ROUNTINE				
			BATTLE (1VS1)			✓	PERUNGGU PERORANGAN
			SOLO ROUNTINE			✓	PERUNGGU PERORANGAN
3	ADE HIDAYAH	AIRSOFT	CQB OPEN		✓		PERAK BEREKU
4	ANDRI R						
5	SIGIT PAMUNGKAS						
6	SULAIMAN SURYA JAYA						
7	FANIY RIVA SENJAYA						
8	FABIANUS SEBASTIAN KEVIN						
9	BUNARDI SANJAYA	AIRSOFT	KST	✓			EMAS PERORANGAN
10	RANDY PERMANA DAHLAN	AIRSOFT	KST		✓		PERAK PERORANGAN
11	ALDY NURSEPTA NIRWANA SUGARTO	AIRSOFT	KST			✓	PERUNGGU PERORANGAN
3. OLAHRAGA KESEHATAN DAN KEBUGARAN (OKK)							
1	SITI SALMA SALSABILLA	ULD	KATEGORI PROPESSIONAL	✓			EMAS PERORANGAN
2	NIKITA AURA PRADITYA	ULD	KATEGORI NON PROPESSIONAL (13-29 TAHUN)	✓			EMAS PERORANGAN
			JUMLAH MEDALI 1. 2. 3	7	9	9	

Sasaran 11 Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak

Perempuan adalah *agent of development* aset bangsa yang potensial, perannya sebagai kontributor sangat dibutuhkan dalam pembangunan, hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Sedangkan dalam pencegahan dan

penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi pada anak menggunakan indikator kabupaten/kota layak anak.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu diwujudkan dalam kebijakan pemerintah maupun dalam kebijakan informal yang dipelopori oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala yang struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut masing-masing elemen masyarakat dan individu mempunyai sensitifitas gender dan program-program pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses penyelenggaraan kebijakan yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mewujudkan pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Sasaran ini diukur oleh 3 parameter yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Kabupaten/Kota Layak Anak, adapun uraian capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Sasaran Terwujudnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,40	N/a	64,31	65,83	102,36	65,11	101,11

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	79,06	79,07	79,39	79,69	100,38	79,44	100,31
Kabupaten/Kota Layak Anak	Non kategori	Non kategori	Pratama	Non kategori	0	Madya	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 3 indikator kinerja yang menjadi parameter, 1 indikator mencapai target, 2 indikator capaian untuk tahun 2022 sudah melebihi target sehingga masuk dalam kategori berhasil dan 1 indikator tidak mencapai target sehingga masuk dalam kategori tidak berhasil, yaitu indikator kabupaten/kota layak anak. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, semua indikator mengalami kenaikan dari capaian realisasi tahun sebelumnya, namun untuk kabupaten/kota layak anak memiliki hasil yang sama dengan tahun 2021 yaitu non kategori, meskipun secara score penilaian mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.

- **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Melalui berbagai mitra pemerintah Kabupaten Bandung Barat gencar mensosialisasikan pengarusutamaan gender, salah satu kegiatannya adalah pembinaan organisasi wanita, diharapkan organisasi wanita “menularkan” kepada mitra yang lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Koordinasi lintas sektor menjadi sumber keberhasilan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat, pembentukan gugus tugas Kekerasan terhadap perempuan, TPPO, POKJA PUG dan Focal Point PUG sangat menentukan capaian kinerja dari IDG itu sendiri. Diharapkan kedepan dengan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan keberpihakan data terpilah sebagai penunjang kebijakan semakin meningkat mengingat potensi perempuan di Kabupaten Bandung Barat sangat baik.

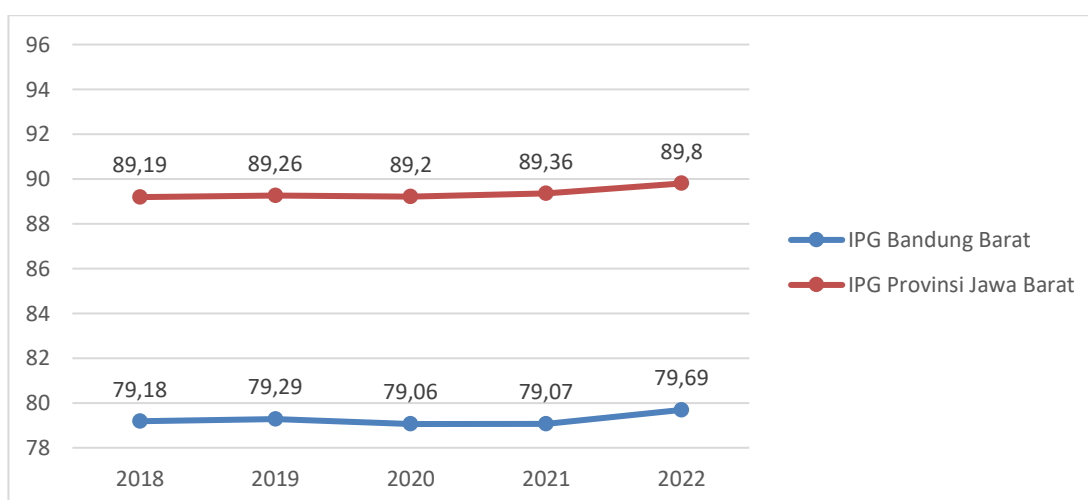
Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidupnya. Sebagaimana dinyatakan McKinsey and Company (2015), jika perempuan dan laki-laki memainkan peran yang sama dalam pasar tenaga kerja, maka pada tahun 2025 GDP global tahunan akan bertambah sebesar \$28triliun atau meningkat 26 persen.

- **Indeks Pembangunan Gender (IPD)**

IPM (indeks pembangunan manusia) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sedangkan IPG (Indeks Pembangunan Gender) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

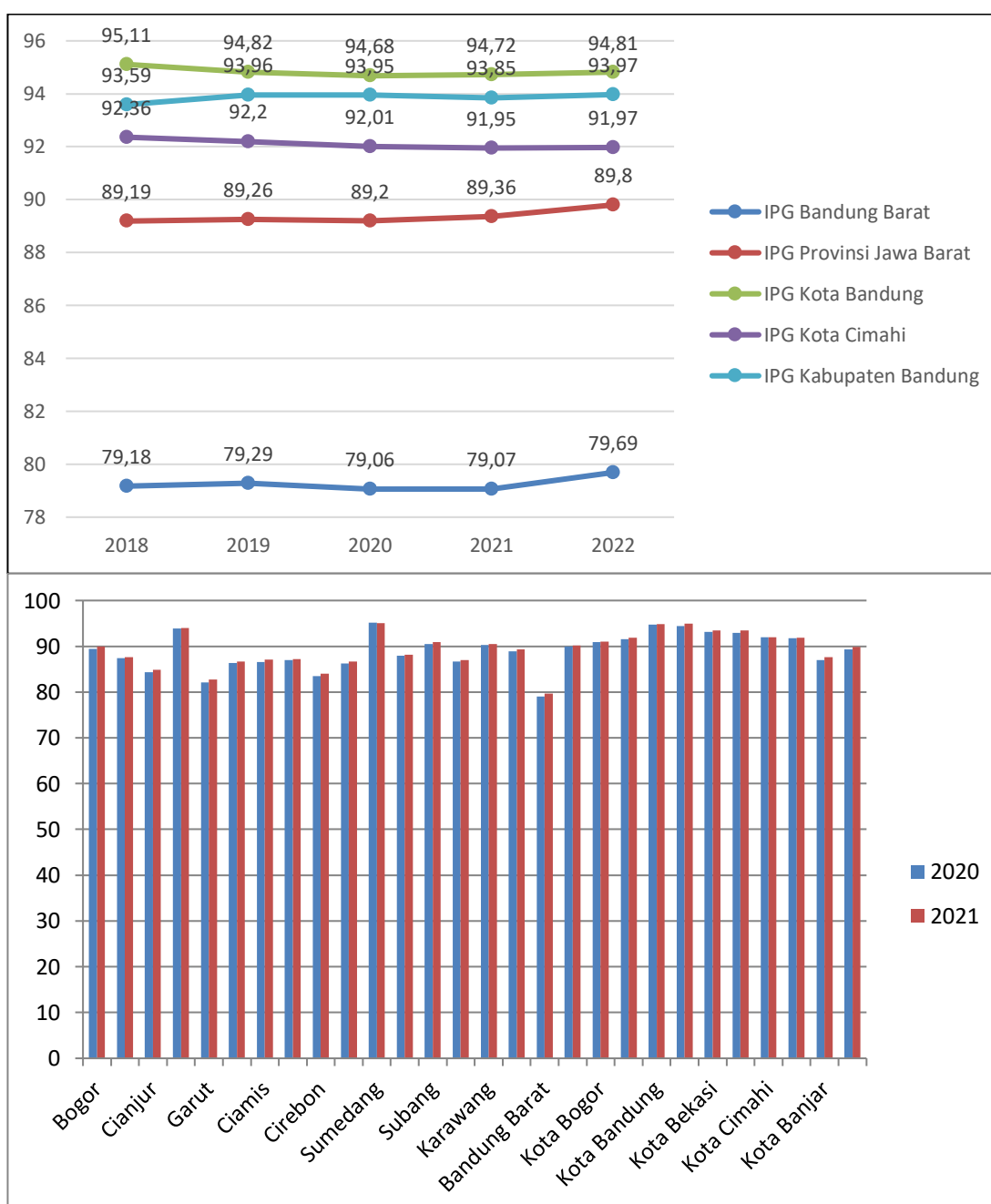
semakin kecil jarak IPG dengan nilai 100 maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun, semakin besar angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Berikut kondisi IPG Kabupaten Bandung Barat jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat:

Tabel 3.21
Perbandingan Tren IPG Kabupaten Bandung Barat
terhadap Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018-2022



Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Barat, IPG Kabupaten Bandung Barat jauh dibawah angka Provinsi Jawa Barat, akan tetapi setiap tahunnya IPG Kabupaten Bandung barat meningkat, pada tahun 2021-2022 meningkat sebesar 0,62 poin.

Tabel 3.22
Perbandingan Tren IPG Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota
Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, terhadap Provinsi Jawa
Barat periode Tahun 2018-2022



Jika disandingkan dengan Bandung Raya, Kabupaten memiliki angka IPG terendah, berikut juga jika disandingkan dengan

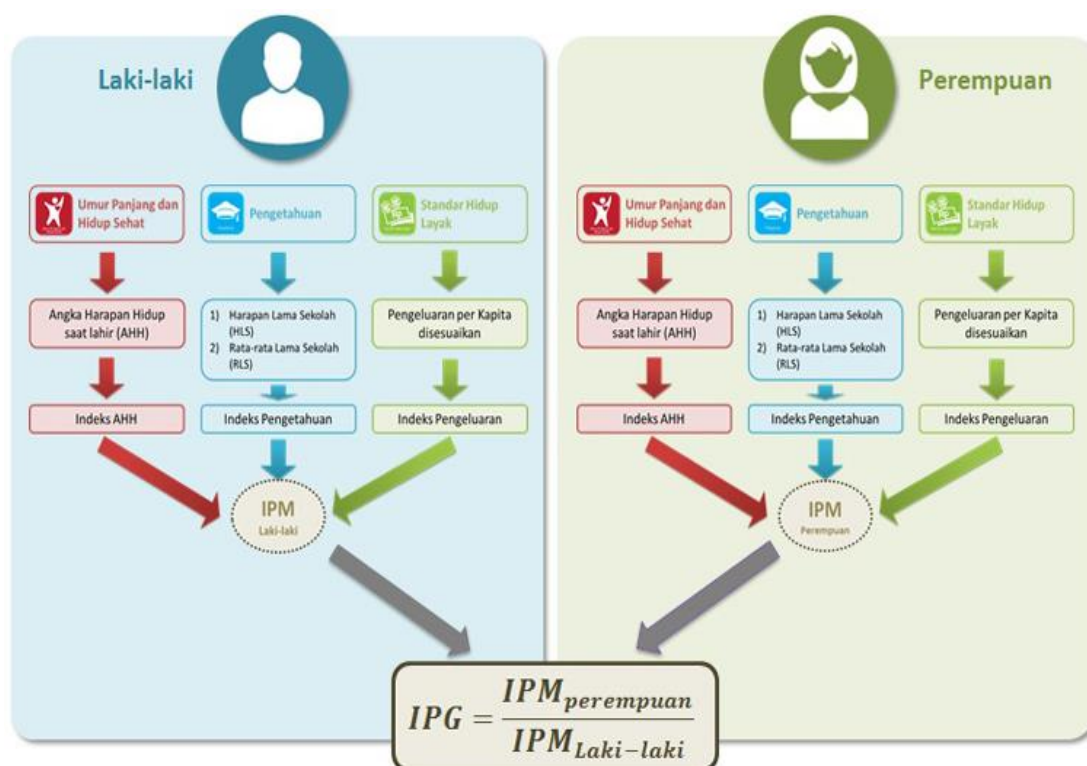
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat memiliki nilai IPG Terendah se- Provinsi Jawa Barat. Hal- hal yang mempengaruhi IPG antara lain dimensi:

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);
2. Pengetahuan (knowledge); dan
3. Standar hidup layak (decent standard of living).

Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data Susenas. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari Susenas.

Adapun metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010, yaitu:

Dimensi	Indikator	IPG
Umur Panjang dan Sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	



Penghitungan	IPG = Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> IPG dapat diinterpretasikan sendiri Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki $IPG < 100$, capaian perempuan < capaian laki-laki $IPG = 100$, capaian perempuan sama dengan laki-laki $IPG > 100$, capaian perempuan > capaian laki-laki

Wilayah Jawa Barat	Laki-laki	Perempuan
	2022	2022
Provinsi Jawa Barat	77,17	69,30
Bandung Barat	74,15	59,09

$$IPG = \frac{IPM_{Perempuan}}{IPM_{Laki-Laki}} = \frac{59,09}{74,15} \times 100 = 79,69$$

- **Kabupaten/Kota Layak Anak**

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas KLA dan melakukan penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya. Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Pembentukan Gugus Tugas KLA, keanggotaannya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat. Adapun untuk kategori penilaian apakah kabupaten/kota masuk dalam kategori layak anak adalah sebagai berikut:

KATEGORI	TOTAL NILAI
PRATAMA	501 – 600
MADYA	601 – 700
NINDYA	701 – 800
UTAMA	801 – 900
KLA	901 – 1000

Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 menargetkan untuk mendapatkan kategori Pratama pada penilaian tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2022 Kabupaten Bandung Barat tidak mendapatkan kategori dalam hasil akhir pada saat verifikasi dengan

nilai dibawah 500. Adapun rincian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah:

Tabel 3.23
Hasil perolehan nilai Kabupaten/Kota Layak Anak Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

INDIKATOR KLA	NILAI MAKSIMAL	NILAI YANG DIPEROLEH	PERSENTASE
Kelembagaan	100	85	85%
Klaster I: Hak Sipil Dan Kebebasan	125	93,5	75%
Klaster Ii: Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	180	127,5	71%
Klaster Iii: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	150	79,95	53%
Klaster Iv: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya	130	60,5	47%
Klaster V: Perlindungan Khusus	215	107,8	50%
Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	100	25,41	25%
Total Nilai Pemkab KBB	100	85	85%

(Sumber : DP2KBP3A Kab. Bandung Barat, 2022)

Kriteria:

Merah : 0 – 50 % = Rendah

Kuning : 51% - 75% = Sedang

Hijau : 76% - 100% = Tinggi

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Meningkatnya kasus kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bandung Barat tercatat tahun dari Januari 2022 s.d bulan Desember 2022 sebanyak 52 Kasus.

2. Kompetensi SDM yang menangani tentang penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak masih kurang;
3. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih mengalami kesulitan untuk menghimpun data dan Informasi dalam bentuk Profil Anak secara lengkap dan teragregasi sampai ke tingkat desa
4. Koordinasi yang belum sepenuhnya sinergis antara pemerintah dan elemen-elemen lainnya dalam pencapaian kota/kabupaten layak anak
5. Melakukan koordinasi dan kegiatan yang intens bersama dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat, melakukan beberapa kegiatan yang diharapkan memberikan hal yang positif bagi masyarakat seperti program SEKOPER CINTA (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita) yang dilakukan secara *daring*, kemudian kegiatan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya kompetensi SDM yang menangani tentang penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak;
2. Anggaran dari berbagai perangkat daerah belum responsive gender;
3. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambilan kebijakan mengenai pentingnya pengarusutamaan gender;
4. Kelembagaan gender yg belum berjalan secara efektif;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan perempuan.
6. Belum terbentuk APSAI (Asosisasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia) dan tidak adanya keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Forum Anak dalam Informasi Layak Anak

7. Sulitnya mengakses data yang dibutuhkan dari setiap indikator klaster KLA pada seluruh wilayah yang berda di Kabupaten Bandung Barat

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan ;

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan tindak pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan berbagai elemen dari masyarakat termasuk lembaga swasta;
2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga penyedia layanan yang memungkinkan untuk menyediakan layanan psikososial, guna mengantisipasi kurangnya tenaga ahli seperti psikolog, advokat dan tenaga ahli lain yang mendukung penanganan tindak kekerasan;
3. Menyediakan anggaran responsif gender, sehingga akan memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan anak;
4. Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan pelatihan untuk focal point PUG dan Pokja PUG yang dilaksanakan secara *continue*;
5. Kabupaten Bandung Barat mempunyai mitra untuk melaksanakan urusan pemberdayaan dan pengarusutamaan gender, seperti organisasi wanita, kelompok pemerhati perempuan, dan lain sebagainya;
6. Melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat agar konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai ke lapisan masyarakat yang paling jauh.
7. Melakukan tahap penyusunan data dan informasi dalam bentuk Profil Anak yang lengkap dan teragregasi sampai ke tingkat desa

8. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sedang merancang untuk pembentukn APSAI (Asosisasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia).
9. Menyusun peraturan, membentuk kemitraan dengan OPD, dunia usaha dan media massa tentang RBRA serta inovasi Ruang Publik Ramah Anak;
10. Melengkapi data persentase ruang laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum, data kemitraan dengan OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha dalam peningkatan PMBA dibawah 2 tahun
11. Melengkapi data persentase ruang laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum, data kemitraan dengan OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha dalam peningkatan PMBA dibawah 2 tahun;
12. Meningkatkan kemitraan dengan Forum anak, OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga;
13. Melengkapi Data Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Ruang Bermain Anak, Persentasi penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah, kemitraan dengan dunia usaha (DU) dan media dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok, program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok;
14. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan media dalam penanganan ABH, penanganan anak korban jaringan terorisme, data kemitraan dengan media, dalam penanganan anak korban stigmatisasi;
15. Menyusun data anak kelompok minoritas dan terisolasi, data SDM terlatih penanganan anak penyandang disabilitas,

penanganan anak kelompok minoritas dan terisolasi dan penanganan anak berperilaku sosial menyimpang;

16. Memaksimalkan SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, Meningkatkan kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, data lembaga layanan bagi anak Anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk, mekanisme pengawasan terhadap Pekerja Anak, sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak yang ditarik dari BPTA

TUJUAN 5

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Pembangunan manusia dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk peningkatan taraf hidup maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karena sektor ekonomi merupakan faktor utama dalam menunjang sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat khususnya dan skala nasional pada umumnya.

Untuk mewujudkan tujuan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Meningkatnya investasi PMDN;
3. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada;
4. Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif

Capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 12 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Sampai dengan tahun 2022 pandemi Covid 19 masih memberikan dampak pada beberapa sektor, upaya pemulihan pasca pandemi ini terus dilakukan oleh Pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga agar tidak berimplikasi besar pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya efek yang diakibatkan oleh pandemi berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga pemulihan yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Terlepas dengan kondisi pasca pandemi covid 19 tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha keras agar pertumbuhan ekonomi bisa stabil dan tumbuh sehingga bisa bertahan dan melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini. Pencapaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan ditopang oleh 7 indikator kinerja sebagai paramater keberhasilan, adapun indikator tersebut adalah pertumbuhan sektor pertanian, persentase kenaikan produksi peternakan, persentase kenaikan produksi budidaya perikanan, pertumbuhan sektor industri pengolahan, pertumbuhan sektor perdagangan, jumlah kunjungan wisatawan, persentase pertumbuhan ekonomi terhadap sektor pariwisata. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2021 sebagai

tahun ketiga RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Capaian Sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET 2022	REALISASI	%	TARGET	%
Pertumbuhan sektor pertanian	-2,39	-1,03	7,5	4,11	54,8	7,81	52,62
Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	3,5	4,1	4	-32	0	4	0
Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	4,27	4,33	5	5,8	116	5	116
Pertumbuhan sektor industri pengolahan	7,82	8,37	8,28	8,01	96,74	8,45	94,79
Pertumbuhan sektor perdagangan	9,43	9,97	10,67	9,21	86,32	10,89	84,57
Jumlah Kunjungan Wisatawan	4.064.126	4.497.692	2.125.000	5.045.679	237,44	2.125.000	237,44
Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata	-42	18	10	119	1190	10	1190

Berdasarkan tabel di atas bahwa keberhasilan capaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan diukur oleh 7 indikator kinerja, adapun dari ke 7 indikator tersebut terdapat 4 indikator yang tidak mencapai target namun hanya 2 indikator yang

masuk dalam kategori tidak berhasil yaitu pada indikator kinerja pertumbuhan sektor pertanian dengan capaian realisasi sebesar 4,11% dari target yang ditentukan sebesar 7,5% dan indikator Persentase Kenaikan Produksi Peternakan dengan capaian realisasi sebesar -32 % dari target yang ditentukan sebesar 4%. Jika dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran tersebut, memperoleh capaian yaitu sebesar 254,47%, artinya capaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pada tahun 2022 masuk dalam kategori berhasil.

- **Pertumbuhan sektor pertanian**

Pertumbuhan sektor pertanian tahun 2022 menunjukkan capaian realisasi pada angka positif yaitu 4,11%. Walaupun realisasi pertumbuhan sektor pertanian belum mencapai target yang ditetapkan tetapi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sector pertanian termasuk didalamnya adalah pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan sehingga pencapaian persentase sebesar 4,11% mungkin disebabkan oleh adanya wabah penyakit mulut dan kuku pada sector peternakan yang mengakibatkan menurunnya produksi daging sapi terutama produksi susu. Sedangkan dari sektor pertanian sendiri yang meliputi produksi tanaman pangan, tanaman obat-obatan dan tanaman perkebunan kecuali tanaman hias melebihi target yang ditetapkan. Berikut pencapaian jumlah produksi pertanian 2022:

Tabel 3.25
Capaian Jumlah Produksi Pertanian Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Ket
		Target	Realisasi	%	
1.	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan)	454.395 ton	457.816 ton	100,75	Baik
		84.393.785 tangkai	35.605.770 tangkai	42,19	Kurang

Untuk komoditas pangan utama secara total mengalami kenaikan walaupun beberapa komoditas menurun seperti kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Penurunan produksi untuk komoditas-komoditas tersebut lebih disebabkan karena faktor penerimaan hasil yang lebih rendah daripada biaya produksi sehingga petani tidak tertarik untuk menanam komoditas tersebut. Sebagian petani mensiasatinya dengan merubah varietas kedelai dan jagung sehingga dapat dipanen muda seperti edamame dan jagung manis yang harganya jauh lebih menguntungkan. Sedangkan untuk ubi kayu dan ubi jalar harga panen relative tidak berubah sedangkan masa panen nya lama sehingga kurang diminati para petani.

Sedangkan komoditas tanaman sayuran realisasi sebesar 78,49 % dari target 2022 tetapi mendekati angka realisasi tahun 2021. Kenaikan komoditas sayuran dibanding tahun 2021 terjadi pada komoditas cabe besar dan buncis. Sedangkan penurunan yang signifikan terjadi pada komoditas paprika. Hal ini menunjukkan bahwa efek pascacovid masih terasa pada para petani paprika. Seperti yang kita bahwa budi daya paprika hanya bisa dilakukan di dalam Green House (GH). Pada saat covid terjadi banyak GH yang tidak terpelihara, sehingga petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk berinvestasi. Untuk tanaman buah-buahan terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan relaisasi 2021 walaupun realisasi 2022 mencapai 73,57 % dari target.

Adapun komoditas oabat-obatan produksi nya relative stagnan walupun ada kenaikan tapi relative kecil. Peningkatan yang yang sangat tinggi terjadi pada tanaman hias yang meningkat 346,11 persen dibanding tahun 2021 walaupun masih jauh dari jumlah produksi pada masa-masa sebelum pandemi tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa ada gairah dari petani untuk kembali membudidayakan tanaman hias yang sempat terpuruk sangat dalam pada tahun 2020 dan 2021. Untuk komoditas perkebunan, realisasi mencapai 118,30 % dari target yang ditetapkan. Namun ada penurunan dibandingkan capaian produksi tahun 2021. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada komoditas teh yaitu sebesar 12,03 % dari produksi 2021. Penurunan produksi disebabkan oleh kondisi tanaman teh yang sudah menurun produktifnya sehingga perlu peremajaan atau penanaman baru.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah :

Pasca pemulihan dampak covid 19, terdapat kenaikan Produksi yang dapat dijual.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target :

1. Luas lahan yang semakin berkurang;
2. Faktor Cuaca yang berubah-ubah;
3. Penggunaan teknologi tepatguna yang masih rendah;
4. Sumberdaya Manusia;
5. Gangguan hama dan penyakit tanaman;
6. Prasarana banyak yang rusak.
7. Mengurangi kehilangan produksi akibat kesalahan dalam pascapanen.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan ;

1. Pengembangan Pola Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi pertanian.
2. Penggunaan benih/ bibit unggul yang responsive dengan perubahan cuaca;
3. Penyuluhan serta pemberian bantuan alat-alat pertanian teknologi tepatguna;
4. Melakukan Bimtek SOP GAP (Standar Operasional Prosedur/ Cara Budidaya yang benar)
5. Melaksanakan Bimtek/ pelatihan SL PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Penyakit Tanaman);
6. Membangun, memelihara dan merehabilitasi prasarana pertanian seperti Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi, dam parit dll.
7. Memberikan penyuluhan/ bimtek penanganan pascapanen serta memberikan alat pascapnen yang aplikatif.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target :

Mengembangkan *Smart Farming* (penggunaan Teknologi informasi dalam pertanian).

- **Persentase Kenaikan Produksi Peternakan**

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja kenaikan produksi peternakan tahun 2022 adalah (-32%) dari target 4%. Produksi hasil Peternakan tahun 2022 adalah sebanyak 88.350 Ton. Produksi peternakan tersebut terdiri dari produksi daging (sapi dan ayam), telur (ayam dan bebek) dan susu sapi. Hasil produksi peternakan turun sebesar 29.2% dari produksi tahun 2021. Turunnya produksi peternakan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang merebak di seluruh Indonesia. Berikut penjelasannya dari indikator kinerja ini:

- Realisasi produksi daging mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Untuk produksi daging sapi hanya naik 0,44% sedangkan produksi daging ayam hanya naik 0,03%.
- Realisasi produksi telur mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Untuk produksi telur ayam hanya naik 0,03 % sedangkan produksi telur bebek hanya naik 0,011%.
- Realisasi produksi susu mengalami penurunan sebesar 38.59%. hal ini disebabkan oleh wabah penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth diseases*) yang menyerang komoditas sapi perah sebanyak 18.533 ekor, atau 65.9% dari populasi sapi perah di sentra-sentra produksi seperti Kecamatan Lembang, Cisarua, Parongpong dan Ngamprah.

A. Faktor yang mempengaruhi melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Meningkatnya populasi Ayam Petelur, Sumberdaya peternak ayam petelur serta permintaan pasar terhadap telur ayam berpengaruh terhadap meningkatnya produksi telur ayam di Kabupaten Bandung Barat;
2. Wabah penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth diseases*) yang menyerang ternak ruminansia khususnya ternak sapi perah, sehingga menimbulkan multiplier effect negative seperti panic selling (Penjualan) dan panic slaughtering (Pemotongan), membuat produksi susu sapi perah menurun secara signifikan (38.59%);
3. Penyakit lain muncul akibat wabah PMK yang menurunkan produksi susu, diantaranya adalah penyakit Mastitis (Radang Ambing).

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK);

2. Menurunnya minat generasi muda yang bergerak disektor peternakan;
3. Alih fungsi lahan sumber hijauan pakan ternak, sehingga daya tahan tubuh ternak berkurang akibat kurangnya asupan pakan yang bergizi;
4. Belum tersedianya kandang yang representative untuk mendukung produksi ternak (kebersihan kandang kurang sehingga memudahkan penularan dan penyebaran penyakit ternak);
5. Kurangnya pengetahuan peternakan tentang management pemeliharaan dan pemberian pakan ternak yang berkualitas ;untuk meningkatkan produksi hasil peternakan;
6. Skala usaha peternakan yang ekonomis (Economic of Scale) belum tercapai sehingga masih diperlukan penambahan populasi ternak untuk mendukung peningkatan produksi hasil peternakan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Pendistribusian bibit ternak yang berkualitas untuk meningkatkan populasi ternak.
2. Memberikan bantuan pakan ternak dan pelatihan bagaimana menyediakan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.
3. Perbaikan mutu genetic ternak melalui **UJI ZURIAT** (Progeny Test) dan optimalisasi pelaksanaan Inseminasi Buatan (**IB**) untuk meningkatkan produktifitas ternak.
4. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana petugas yang berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan, pendistribusian perlengkapan petugas IB/PKB/ATR, baik yang dilakukan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya melebihi capaian target:

1. Perbaikan kualitas dan kuantitas pakan melalui green pellet, silase, diversifikasi jenis Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan perluasan lahan hijauan pakan ternak.
2. Peningkatan penanganan produk sisa hasil peternakan melalui program **GREEN HOUSE** di Kecamatan Lembang dan Parongpong.
3. Pendistribusian sarana dan prasarana teknologi peternakan seperti Pengolahan pakan ternak, Cultivator, dan Kandang Sehat.
4. Pengembangan kawasan sapi perah wilayah selatan berbasis korporasi peternakan, dengan memfasilitasi terbentuknya Koperasi Produsen Peternakan Bandung Barat (KP2 BB), yang akan mewadahi peternak sapi perah terutama peternak milenial di wilayah selatan.
5. Pendataan ternak sapi dan kerbau secara online (Aplikasi Identik PKH).

● **Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan**

Indikator kinerja persentase kenaikan produksi budidaya perikanan merupakan parameter baru yang sudah berjalan 2 tahun dalam menghitung capaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Berdasarkan tabel di atas pada indikator Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan tahun 2022 menunjukkan data capaian 5.8% dari target 5%. Produksi ikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 sebesar 46.957 Ton. Produksi ikan tersebut hasil dari budidaya ikan kolam air tenang sebesar 5.396 Ton dan kolam jaring apung sebesar 41.364 Ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 produksi ikan mengalami kenaikan sebesar 5.87%.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan adalah:

1. Peningkatan SDM pembudidaya ikan melalui Pelatihan dan bimbingan teknis tentang CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) serta penyakit dan hama Ikan.
2. Adanya temu teknis antara stakeholder dan pembudidaya ikan
3. Revitalisasi induk ikan berkualitas unggul.
4. Adanya alih usaha Kolam Jaring Apung (KJA) ke Kolam Air Tenang (KAT).
5. Fasilitasi Sarana prasarana Budidaya ikan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Pembudidaya ikan masih banyak yang belum menerapkan CBIB dan CPIB.
2. Penataan jumlah Kolam Jaring Apung menimbulkan potensi penurunan jumlah produksi perikanan dari segmen budidaya KJA;
3. Kurangnya pengetahuan Pembudidaya Ikan tentang pencegahan dan penanggulangan hama penyakit, serta pentingnya menjaga kualitas air.
4. Kurang optimalnya fungsi Unit Pembenihan Rakyat dalam memproduksi benih unggul dikarenakan kurangnya ketersediaan induk ikan Unggul
5. Mahalnya harga pakan komersil dan kurangnya kelompok yang membuat pakan mandiri.
6. Penurunan Kualitas air dan faktor cuaca menyebabkan adanya penyakit pada Ikan.

C. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Sosialisasi Program alih usaha dan Penataan KJA serta pemberian paket bantuan Program Alih Usaha dari pembudidaya di Kolam Jaring Apung (KJA) ke Kolam Darat/ Kolam Air Tenang;
2. Pembinaan kepada pembudidaya ikan untuk dapat meningkatkan produksi ikan dengan memberikan stimulan bantuan sarana prasarana budidaya ikan;
3. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pembudidaya ikan melalui Bimbingan Teknik Budidaya dengan teknologi tepat guna;
4. Memberikan pembinaan dan stimulan bantuan berupa benih dan calon induk ikan unggul untuk mengoptimalkan Fungsi UPR;
5. Memberikan stimulan bantuan pakan berkualitas ;
6. Memberikan pembinaan tentang pengelolaan kualitas air dan pencegahan penyakit ikan melalui pembinaan CBIB dan CPIB.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Meningkatkan kualitas pembudidaya ikan dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Benar (CBIB) dan Teknologi tepat guna (Bioflok dan *Nano Bubbel*) serta Memfasilitasi pembudidaya milenial untuk berinovasi dalam peningkatan produksi ikan;
2. Pengembangan Teknologi Budidaya Pakan Alami (budidaya Magot) dan Pakan buatan dengan bahan baku lokal untuk menekan biaya produksi budidaya;
3. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah melalui Budidaya Ikan dalam Ember (budikdamber).

● **Pertumbuhan sektor industri pengolahan**

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan tahun 2022 menunjukkan data capaian 96,82 %, jika dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 capaian pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2022 masih diberlakukan kebijakan PPKM, sehingga masih ada pembatasan pergerakan manusia yang berdampak pada berkurangnya aktivitas perusahaan-perusahaan di sektor industri pengolahan. Dibandingkan dengan tahun 2020 tahun 2022 masih lebih baik, tahun 2020 bisa dikatakan merupakan tahun yang sangat sulit dan mengalami pelambatan karena pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang mencapai Level 4 akibat Covid - 19. Meskipun, terjadi penurunan capaian pada tahun 2022 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kesatu dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar 40,36%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan tinggi, tahun 2021 target pertumbuhan sektor industri pengolahan yaitu 8,11 % meningkat sebesar 0,26 % yaitu 8,37 %, sebagaimana kita ketahui pada data BPS tahun 2020 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan menurun sangat drastis akibat Pandemi Covid - 19 yaitu sebesar - 2,41 %. Pada tahun 2020 bisa dikatakan merupakan tahun yang sangat sulit dan mengalami pelambatan karena pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang mencapai Level 4 akibat Covid-19. Pada Tahun 2021 dewasa ini, pandemi Covid-19 masih dirasakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, meskipun masih dalam pandemi Covid-19 namun pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB mengalami kenaikan sebesar 4.88 %, jika melihat dari data BPS

tahun 2021 kenaikan yang sangat tinggi tersebut berbanding terbalik yaitu -2,41% pada tahun 2020, hal ini menggambarkan bahwasannya Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bandung Barat terjadi peningkatan yang sangat tinggi dan baik, meskipun dalam situasi Pandemi Covid - 19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya berupa bantuan stimulus ekonomi lanjutan sejak dari tahun 2020 sampai dengan sekarang yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai jaring pengaman ekonomi untuk pelaku industri dan masyarakat secara luas di Kab. Bandung Barat seperti pembebasan pajak, subsidi listrik, penangguhan pembayaran hutang kepada perbankan;
2. Bantuan Langsung Usaha Mikro (BLUM) untuk Industri kecil sebagai pelaku usaha kecil menengah yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah, serta diberikan juga bantuan paket mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Perindustrian RI, yang mana bantuan dari Pemerintah tersebut sebagai penunjang dalam memproduksi barang serta pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan agar supaya pelaku usaha IKM dapat memiliki skill yang baik dan mampu meningkatkan ekonomi serta menjaring tenaga kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar atau lingkungannya.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan terlatih sehingga belum mampu mendongkrak peningkatan produktivitas secara baik;
2. Daya dukung mesin dan peralatan yang masih konvensional sehingga belum bisa mendongkrak produksi secara massal;
3. Refocusing Anggaran, dengan adanya hal tersebut diatas maka beberapa program terhadap penyaluran stimulus serta bantuan bagi masyarakat terdampak belum sepenuhnya bisa dioptimalkan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Memberikan bantuan hibah berupa mesin/peralatan yang semi modern atau modern agar mampu meningkatkan produksi;
2. Melaksanakan beberapa pelatihan sumber daya manusia khususnya pelaku IKM agar terampil dalam mengoperasikan peralatan agar mampu mendongkrak produktivitas secara baik;
3. Melaksanakan program dengan mengalihkan beberapa program yang tidak prioritas agar pemulihan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Melakukan Pendataan IKM penerima manfaat secara periodik dan berkelanjutan agar bantuan hibah/stimulus dapat dioptimalkan serta pelatihan untuk menunjang SDM yang berkualitas;
2. Mendorong dan memberikan wawasan serta manfaat bagi para pelaku IKM khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dengan merubah paradigma serta membuka interaksi secara *digitalisasi* ekonomi sesuai dengan

perkembangan teknologi saat ini selain mampu mendorong produktivitas juga efisiensi dalam produksi.

● **Pertumbuhan Sektor Perdagangan**

Pada indikator pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2022 menunjukkan data capaian 86,36%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2022 pada tahun ini, mengalami penurunan, berdasarkan data BPS hal ini terjadi karena sektor perdagangan sama seperti sektor pertanian berangsur-angsur menurun. Dibandingkan tahun sebelumnya ada pergeseran dimana lapangan usaha pertanian menjadi urutan kedua melampaui pencapaian lapangan usaha perdagangan. Ini terjadi karena saat Pandemi Covid-19. Ada pergeseran lapangan usaha pertanian diakibatkan lapangan usaha ini walaupun sama mengalami hantaman karena covid namun tidak sebesar lapangan usaha perdagangan. Sebagaimana kita ketahui pada data BPS tahun 2020 pertumbuhan sektor perdagangan menurun sangat drastis akibat Pandemi Covid - 19 yaitu sebesar - 8,15 %, hal tersebut juga dikarenakan terjadi pelambatan aktivitas ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang mencapai Level 4 yang mana perdagangan besar dan kecil dalam hal ini eceran melakukan transaksi ekonomi atau jual beli secara online dan membatasi semua kebutuhan serta waktu penjualan. Disamping itu juga selalu terjadi fluktuasi harga barang dan jasa disertai juga kelangkaan yang terjadi selama Pandemi, hal ini justru menurunkan daya beli masyarakat secara langsung.

Pada Tahun 2022, meskipun Pandemi COVID-19 belum selesai namun sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar 13,23%, ini menggambarkan pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Bandung Barat terjadi peningkatan

yang baik karena beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dari pemberlakuan status dari mulai pelonggaran dan jaminan-jaminan yang diberikan mampu membuat pertumbuhan sektor perdagangan mengalami peningkatan sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti biasanya. Hal ini yang mampu membuat pertumbuhan sektor perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi stabil dan dapat meningkat secara baik.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya kebijakan serta Peraturan dan jaminan dari Pemerintah Pusat ataupun Daerah yang diharapkan oleh masyarakat seperti halnya percepatan Vaksin, Pelonggaran status PPKM dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan jasa lainnya;
2. Sistem Digitalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga banyak pelaku usaha yang menjual produknya melalui online atau *E-commerce*.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

Fluktuasi harga barang dan jasa serta kelangkaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Bersubsidi.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi serta kerjasama dengan pemangku kepentingan dan stakeholder terkait agar supaya kebijakan, peraturan dan jaminan dari pemerintah yang berubah-ubah dapat dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan yang tidak menyalahi aturan yang berlaku;
2. Melakukan Pengawasan serta Operasi Pasar.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Menyusun Kebijakan serta Peraturan Daerah agar jaminan bagi masyarakat berupa bantuan, stimulus, kelangkaan dan kestabilan harga dapat terealisasi dengan baik;
2. Membuat Sistem Aplikasi Manajemen Pasar, yang mana dengan sistem digitalisasi terintegrasi ini maka pengawasan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan penting, kestabilan harga dan kelangkaan dapat dioptimalisasi secara online.

● **Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Jumlah Kunjungan Wisatawan menunjukkan data realisasi capaian 5.045.679 jiwa tahun 2022, jumlah tersebut sudah mencapai target sebesar 2.000.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari 4.497.692 jiwa di tahun 2021 menjadi 5.045.679 jiwa dengan persentase capaian sebesar 237,44% di tahun 2022. Adapun jumlah kunjungan wisatawan meningkat dikarenakan pasca pemulihan covid 19, dimana masyarakat sudah tidak dibatasi aksesibilitasnya dan sudah tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada pendapatan daerah yang bersumber dari hotel, restoran, dan hiburan.

A. Faktor yang mempengaruhi melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan urusan pariwisata;
2. Terdapatnya potensi sumber daya alam, budaya, serta ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung Barat;
3. Dukungan organisasi profesi pariwisata serta kebudayaan yang

kuat dan mandiri serta terdapatnya kerja sama antar unit kerja organisasi yang mendukung pencapaian jumlah kunjungan wisatawan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pariwisata;
2. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
3. Kurang gencarnya promosi pariwisata baik di wilayah Regional maupun Nasional, terlebih lagi di wilayah Mancanegara;
4. minimnya kualitas aksesibilitas menuju destinasi wisata;
5. kurangnya inovasi pembaharuan daya tarik wisata yang baru.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Menerapkan standar CHSE (Cleanliness/Kebersihan, Health/Kesehatan, Safety/Keamanan, dan Environment Sustainability/Kelestarian Lingkungan) pada setiap industri pariwisata;
2. Bekerjasama dengan kelompok penggerak pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kab. Bandung Barat;
3. Meningkatkan promosi pariwisata terutama melalui media social, kegiatan pameran baik didalam maupun luar negri, penyelenggaraan festival wisata;
4. Meningkatkan dan mengembangkan potensi industri pariwisata daerah pada minat khusus wisata yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi kreatif serta sebaran area destinasi obyek wisata.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Berkolaborasi dengan influencer untuk pemasaran pariwisata;
2. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media masa, dalam menarik minat kunjungan wisatawan;

3. Menawarkan kepada Production House untuk memproduksi filmnya di wilayah Bandung Barat, sehingga dapat menjadi media promosi yang efektif;
4. Membuat paket wisata lintas wilayah administrasi dengan Kota Bandung, Kab. Bandung , dan Kab. Subang.

● **Persentase Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata**

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata menunjukkan data capaian tahun 2022 sebesar 119% meningkat dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 18%, serta melebihi target capaian tahun 2022 sebesar 10%. Adapun data Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.26
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata

Realisasi 2022	Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata Tahun 2022	Realisasi 2021	Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata Tahun 2020	Realisasi 2019	Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata Tahun 2019
73.473.288.496	119%	33.579.281.408	18%	28.401.845.086	-42%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat (data diolah)

Jika dilihat pada tabel tersebut diketahui Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 sebesar -42%, hal tersebut dikarenakan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 sehingga seluruh aktivitas wisata harus dibatasi baik itu tempat rekreasi, hotel, juga restoran, hal tersebut

berdampak pada menurunnya Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata di Kab. Bandung Barat. Kemudian pada tahun 2021 wabah pandemik Covid-19 berangsur pulih, industri pariwisata sudah mulai dibuka kembali, sehingga pada tahun 2021 Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata mengalami kenaikan sebesar 18%. Untuk tahun 2022 PAD pada sektor pariwisata terealisasi sebesar Rp 73,473,288,496,-, meningkat dari tahun sebelumnya, salah satunya dikarenakan adanya pembayaran tunggakan retribusi dari asset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta yaitu objek wisata Maribaya Hotspring & Resort, sehingga Persentasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 119%.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Keberadaan organisasi didukung oleh dasar hukum atau kewenangan yang kuat;
2. Potensi sumber daya budaya yang memadai;
3. Dukungan pembinaan dan menumbuh kembangkan kebudayaan secara moril dan materil yang kuat;
4. Dukungan organisasi profesi seni dan budaya yang kuat dan mandiri.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Standarisasi profesi SDM kebudayaan dan pariwisata masih rendah;
2. Partisipasi masyarakat masih rendah;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya;
4. Kondisi lintas sektoral masih belum berjalan dengan baik;
5. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mengembangkan pemajuan kebudayaan;
6. Status aset Situs/Cagar Budaya bukan milik pemerintah daerah.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Membangun koordinasi yang intensif baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan kebudayaan;
2. Meningkatkan kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan jaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
3. Memperkuat seni budaya kearifan lokal kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh;
4. Mengoptimalkan potensi CSR dalam pendanaan pengembangan kebudayaan.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Membuat kajian roadmap pengembangan pemajuan kebudayaan, sehingga pengembangannya dapat terarah;
2. Mengadakan festival seni dan budaya rutin setiap tahunnya;
3. Melestarikan warisan budaya dan meningkatkan penyelenggaraan gelar seni budaya dalam rangka memperkuat budaya lokal;
4. Bekerjasama dengan kelompok seni budaya dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kab. Bandung Barat;
5. Revitalisasi pemetaan kawasan wisata pada destinasi objek pariwisata Kabupaten Bandung Barat.

Sasaran 13 Meningkatnya investasi PMDN

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia perlu adanya peran strategis yakni pembentukan modal, pembentukan modal ini nantinya bersumber dari hasil

kegiatan investasi dan pendanaan di beberapa pasar keuangan. Untuk Negara-negara berkembang, dimana terdapat “*Labour Surplus Economy*” artinya modal pembangunan tak dapat dituangkan hanya pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi. Pembangunan tersebut akan terlalu mahal dan juga akan mengalami hambatan apabila sesuatu waktu sumber investasi menjadi terbatas, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Selain itu jumlah SDM yang besar hendaknya dijadikan sebagai keunggulan karena jumlah penduduk yang besar apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan bagi usaha – usaha disegala bidang. Antara dinamika jumlah penduduk dan proses pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan timbal balik yang erat. Dalam meningkatkan investasi PMDN di Kabupaten Bandung Barat indikator yang digunakan adalah nilai investasi PMDN dan jumlah investor PMDN sebagai parameter keberhasilan dalam mencapai target kinerja, adapun rincian pencapaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.27
Capaian Sasaran Meningkatnya investasi PMDN

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET 2022	REALISASI	%	TARGET	%
Nilai Investasi PMDN	Rp. 336 (miliar)	Rp. 254 (miliar)	Rp. 550 (miliar)	Rp. 704 (miliar)	128,07	Rp. 600 (miliar)	117,39
Jumlah Investor PMDN	241	131	195	68	34,87	300	22,67

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 indikator yang menopang sasaran meningkatnya investasi PMDN, adapun untuk indikator Nilai Investasi PMDN tahun 2022 menunjukkan data realisasi sebesar 704 miliar dengan target yang ditetapkan sebesar 550 miliar, sehingga

capaiannya adalah sebesar 128,07% yang artinya masuk dalam kategori berhasil.

Adapun untuk indikator Jumlah investor PMDN tahun 2022 menunjukkan data realisasi sebesar 68 investor dengan target yang ditentukan sebesar 195 investor, adapun jumlah capaiannya adalah sebesar 34,87% yang artinya masuk dalam kategori tidak berhasil. Berdasarkan dari 2 indikator tersebut, jumlah rata-rata capaian sasaran meningkatnya investasi PMDN adalah sebesar 81,47%, yang artinya capaian ini tidak berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian sasaran tahun 2021 mengalami peningkatan dari segi persentase yaitu sebesar 23,34%, namun masih tetap masuk dalam kategori tidak berhasil.

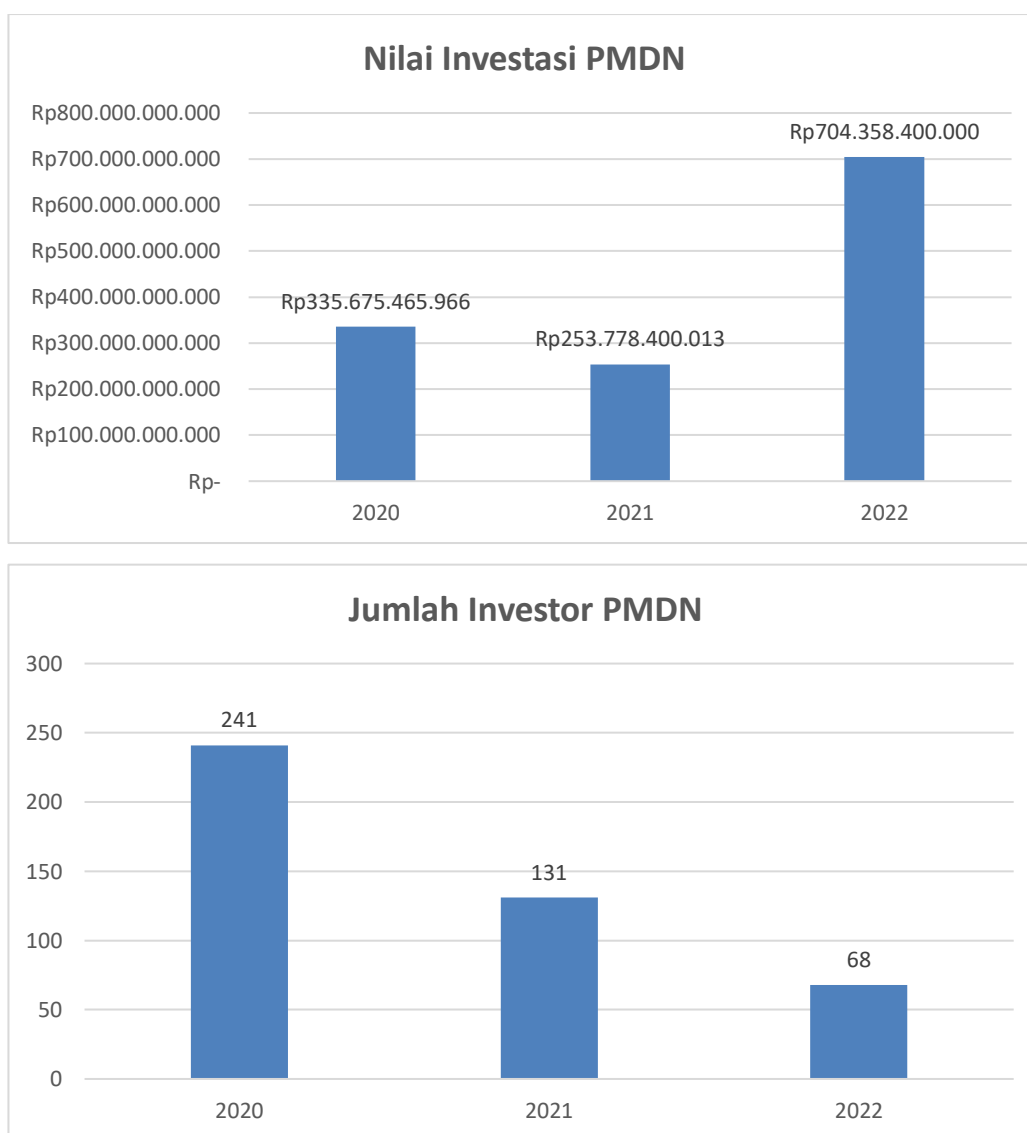
● **Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Berdasarkan tabel di atas pada indikator Nilai Investasi PMDN tahun 2022 menunjukkan data capaian 128,07 %, jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 mengalami kenaikan, dari capaian realisasi tahun 2020 naik sebesar Rp 368,682,934,034.00 dan dari capaian realisasi tahun 2021 naik sebesar Rp 450,579,999,987.00. Terjadi kenaikan capaian realisasi investasi pada Tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 dikarenakan Transisi perizinan ke sistem OSS sedikit banyak mempengaruhi tren kenaikan investasi di tahun ini. Seluruh jenis perizinan berusaha dilakukan melalui sistem Online Single Submission- Risk Based Approach (OSS-RBA).

Untuk investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), nilai investasi terbesar dipegang oleh sektor sekunder dengan nilai investasi sebesar Rp. 595,335,800,000 atau sebesar 84.52% dari keseluruhan total investasi PMDN dengan bidang yang mendominasi bidang Industri Tekstil, berikutnya adalah sektor tersier dengan nilai investasi sebesar Rp. 68,634,500,000 atau sebesar 9.74% yang didominasi dalam bidang Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi,

terakhir adalah sektor primer dengan nilai investasi sebesar Rp. 40,388,100,000 atau sebesar 5.73% yang didominasi dalam bidang Pertambangan. Berdasarkan grafik di atas pada indikator jumlah investor tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 mengalami penurunan, dari capaian realisasi tahun 2020 turun sebesar 173 investor atau 71,78% dan dari capaian realisasi tahun 2021 turun sebesar 63 investor atau 48,09%.

Tabel 3.28
Tabel Nilai invetasi PMDN dan Jumlah Investor PMDN
Tahun 2022



Sumber: DPMTSP Kab.Bandung Barat,2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, untuk investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), nilai investasi terbesar dipegang oleh sektor sekunder dengan nilai investasi sebesar Rp. 595,335,800,000 atau sebesar 84.52% dari keseluruhan total investasi PMDN dengan bidang yang mendominasi bidang Industri Tekstil, berikutnya adalah sektor tersier dengan nilai investasi sebesar Rp. 68,634,500,000 atau sebesar 9.74% yang didominasi dalam bidang Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, terakhir adalah sektor primer dengan nilai investasi sebesar Rp. 40,388,100,000 atau sebesar 5.73% yang didominasi dalam bidang Pertambangan. Berdasarkan grafik di atas pada indikator jumlah investor tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 mengalami penurunan, dari capaian realisasi tahun 2020 turun sebesar 173 investor atau 71,78% dan dari capaian realisasi tahun 2021 turun sebesar 63 investor atau 48,09%.

TABEL 3.29
NILAI INVESTASI PER SEKTOR TAHUN 2022

Sektor	Nilai Investasi PMDN	LKPM PMDN	%
Sektor Primer	Rp 40,388,100,000	17	5.73%
Sektor Sekunder	Rp 595,335,800,000	282	84.52%
Sektor Tersier	Rp 68,634,500,000	323	9.74%
JUMLAH	Rp 704,358,400,000	622	100.00%

Sumber: DPMTSP Kab.Bandung Barat,2022 (data diolah)

- **Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Indikator jumlah investor PMDN merupakan parameter baru yang dimasukan untuk menghitung keberhasilan capaian sasaran meningkatnya investasi PMDN, adapun indikator ini sudah berjalan 2 tahun. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa capaian jumlah investor PMDN mengalami penurunan dari 131 investor di tahun 2021 menjadi 68 investor di tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan diperburuk oleh kasus Covid-19 dipertengahan meskipun saat ini masi dalam proses pemulihan pasca covid 19. Adapun rincian faktor-faktor turununya capaian jumlah investor sebagai berikut:

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Kinerja investasi Kabupaten Bandung Barat bergerak naik seiring dengan semakin pulihnya perekonomian dan bangkitnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat karena pelonggaran pembatasan mobilitas terkait pandemi Covid-19;
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibanding tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung Barat;
3. Pemerataan infrastruktur salah satu faktor yang dapat menentukan minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung Barat. Semakin memadainya infrastruktur mengakibatkan biaya yang perlu dikeluarkan oleh investor lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain, dan mengakibatkan realisasi investasi tumbuh melampaui target;
4. Semakin bertambahnya pemahaman para pelaku usaha terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menambah nilai investasi di Kabupaten Bandung Barat;

5. Adanya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencapai realisasi sebesar 4,3 triliun sehingga dapat menggerakkan masuknya aliran investasi dari sektor-sektor pendukung, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan memberikan dampak yang positif utamanya dalam bidang perekonomian;
6. Dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan serta upaya penyelesaian masalah kepada para pelaku usaha di Kabupaten Bandung Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Khusus Fasilitas Penanaman Modal;
7. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam meningkatkan pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha;
8. Salah satu faktor tidak tercapainya target jumlah investor di tahun 2022 dikarenakan beberapa investor yang sudah menanamkan investasi di tahun sebelumnya menanamkan kembali investasi yang cukup besar di tahun 2022 salah satunya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sehingga jumlah investor tidak bertambah tetapi jumlah realisasi investasi bertambah;
9. Seiring berjalannya pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia pasca pandemi Covid-19 sehingga beberapa investor masih cenderung melakukan strategi menunggu dan melihat iklim ekonomi dan usaha serta stabilitas ekonomi sehingga menjadi salah satu faktor calon investor untuk menanamkan investasinya;
10. Belum tersedianya Peta Potensi Investasi untuk memudahkan investor menanamkan modalnya;
11. Kurangnya anggaran kegiatan promosi investasi sebagai media informasi dalam rangka meningkatkan masuknya investor.

B. Faktor penghambat / permasalahan sehingga tidak tercapainya target adalah:

1. Masih kurangnya pengetahuan para pelaku usaha terhadap kewajiban-kewajiban salah satunya yaitu kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik, sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Serta masih adanya kekurangan pemahaman para pelaku usaha terhadap cara pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan pengisian LKPM, menyebabkan laporan kegiatan penanaman modal para pelaku usaha masih belum dapat disetujui oleh BKPM/Kementerian Investasi sehingga pelaku usaha dianggap belum melaporkan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal).
2. Masih terdapatnya perusahaan yang belum memiliki izin usaha tetapi sudah melaksanakan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa hal ini disebabkan terlambatnya proses perizinan daerah yang merupakan dokumen pendukung izin usaha.
3. Kurangnya pemahaman para investor dengan perizinan yang seharusnya dimiliki serta kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, adanya beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan (baik tahap pembangunan maupun yang sudah mempunyai izin usaha), serta lokasi perusahaan yang tidak sesuai dengan tata ruang, masih terdapat ketidak pahaman perusahaan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

4. Adanya perubahan manajemen pada perusahaan sehingga mempengaruhi terhadap kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
5. Belum meratanya sarana dan prasarana yang memadai di masing-masing kecamatan sebagai penunjang penyelenggaraan pelayanan publik.

C. Alternatif solusi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kegiatan pemantauan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaku usaha yang bertujuan untuk mendapatkan data perkembangan investasi meliputi sektor, lokasi, bidang usaha dan tenaga kerja;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaku usaha terkait LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) bertujuan mengumpulkan, memverifikasi dan evaluasi yang meliputi keterangan perusahaan, perizinan yang dimiliki, realisasi investasi, permodalan, realisasi mesindan/atau barang dan bahan, penggunaan tenaga kerja, produksi dan pemekaran, kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang undangan dan permasalahan yang di hadapi perusahaan untuk mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal;
3. Meningkatkan kegiatan Pembinaan pelayanan perizinan: terselenggaranya bimtek terkait sistem Online Single Submission - Risk Based approach (OSS – RBA) kepada pelaku usaha dilakukan sebanyak 4 kali di Kabupaten Bandung Barat. Dengan diadakannya kegiatan bimbingan teknis untuk

meningkatkan wawasan dan pengetahuan perizinan kepada pelaku usaha di lingkungan Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar mentaati peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan legalitas perizinan serta memberikan penjelasan serta penyuluhan kepada masyarakat serta pemahaman tentang pentingnya perizinan;

4. Bersama-sama dengan dinas teknis memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah terkait perizinan sehingga memudahkan para pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perizinan serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap hukum dan perundang – undangan serta legalitas usaha terkait pelayanan perizinan;
5. Meningkatkan kegiatan Penanganan Pengaduan dan Penanaman Modal dengan persentase penyelesaian pengaduan masyarakat/pemohon sebesar 100%, dengan maksud bahwa semua pengaduan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti, adapun realisasinya bahwa semua pengaduan yang masuk dapat diselesaikan/ditindaklanjuti oleh petugas dengan efektif dan efisien;
6. Meningkatkan kegiatan Promosi Investasi melalui media sosial serta Kegiatan Penyelenggaraan Eksibisi, berupa penyelenggaraan pameran atau keikutsertaan dalam pameran investasi.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target adalah:

1. Menyediakan help desk yang bertugas memberikan bantuan secara langsung terhadap pelaku usaha mengenai tata cara pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);

2. Melakukan pendampingan kepada pemohon terutama pelaku UMKMK untuk kemudahan pelayanan perizinan;
3. Pemeliharaan dan update fitur secara berkala sistem pelayanan perizinan secara elektronik.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur khususnya di bidang perizinan
5. Dengan telah dibangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) maka akan dilengkapi dan diupayakan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana sesuai kebutuhan seperti Sistem MPP, Sumber Daya Manusia, Kiosk, Sistem Antrian, Media Informasi, loket dan toilet khusus disabilitas untuk menjadi prioritas dengan pertimbangan percepatan dan kemudahan pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.
6. Kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh Bupati serta pejabat perangkat daerah dalam rangka mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung Barat.
7. Menyediakan pendamping Non aparatur Sipil Negara yang bertugas memberikan bimbingan, konsultasi dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala dalam pengoprasian Sistem OSS, pengawasan rutin dan pengawasan insidental , Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ;
8. Menyediakan sarana informasi berupa media sosial untuk menampung saran dan pengaduan dari pelaku usaha;
9. Menyediakan web sistem perizinan online yang dapat di akses oleh para pelaku usaha tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSP.
10. Terbatasnya informasi peluang investor yang dimiliki calon investor terkait potensi investasi di Kabupaten Bandung Barat oleh karena itu, perlu adanya kajian/analisis yang lebih mendalam berkaitan dengan profil potensi peluang investasi.
11. Untuk mencapai pertumbuhan investasi yang berkelanjutan perlu dilakukan upaya penyempurnaan peluang investasi yang

siap jual dan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif salah satunya dengan memberi kemudahan perizinan (pelayanan yang diberikan kepada investor), peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di suatu daerah;

E. Penghargaan/Prestasi yang diraih dalam mencapai capaian meningkatnya investasi PMDN

1. DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat memperoleh Nilai rata-rata 84,79 dengan Predikat Zona Kepatuhan “Hijau” hasil penilaian kepatuhan standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari OMBUDSMAN RI yang diterima pada tanggal 24 Februari 2022;
2. DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik katagori “Sangat Baik” Tahun 2021 dari KEMENPAN-RB yang diterima pada tanggal 8 Maret 2022;



3. DPMPTSP Meraih penghargaan sebagai “Pemenang Katagori Inspiratif” pada Pameran APKASI OTONOMI EXPO 2022 di

Jakarta Convention Center Senayan Jakarta Pada 20-22 Juli 2022;



4. DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat mendapat Penilaian Mandiri PTSP “Sangat Baik” dengan nilai 88,250 dari Kementrian Investasi/BKPM Tahun 2022;
5. DPMPTSP KBB sebagai Penyelenggara Pelayanan Prima dengan katagori A dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.



Sasaran 14**Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada**

Menyikapi kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat merupakan hal yang perlu dilakukan untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi tren kondisi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan stakeholder terkait dalam upaya perbaikan dan peningkatan kondisi ketenagakerjaan tersebut. Di tengah pemulihan kondisi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi.

Pekerjaan atau ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian. Angkatan Kerja, penduduk yang bekerja, dan angka pengangguran tenaga kerja merupakan modal bagi gerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Secara teoritis pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia dapat berperan sebagai suatu faktor produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian, untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pembentuk modal manusia (human capital). Dalam pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan

ekonomi yang ada, Pemerintah Bandung Barat mengukur keberhasilannya dengan 2 indikator yaitu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar, sebagai parameter dalam keberhasilan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Sasaran Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET 2022	REALISASI	%	TARGET	%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,91	60,75	71,75	61,23	85,34	73,77	83,00
Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 indikator yang menopang sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada, adapun untuk indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2022 menunjukkan data persentase realisasi sebesar 61,23 dengan target yang ditetapkan sebesar 71,75, sehingga capaiannya adalah sebesar 85,34% yang artinya masuk dalam kategori berhasil.

Adapun untuk indikator kinerja persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar tahun 2022 menunjukkan data persentase sebesar 100 dengan target yang ditetapkan sebesar 100 yang artinya mencapai target dengan capaian 100% dengan kategori berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memiliki pencapaian realisasi yang konsisten

yaitu mencapai target 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMDpun sudah mencapai target yaitu 100%.

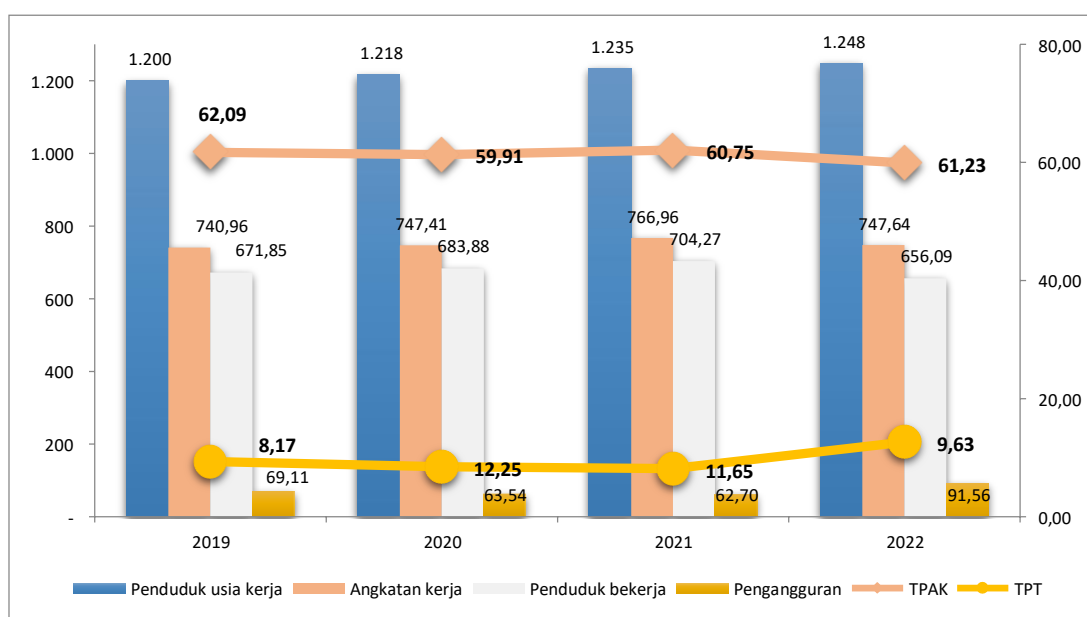
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada mengalami penurunan angka persentase, yaitu pada tahun 2021 capaian sasaran tersebut sebesar 100,52% sedangkan tahun 2022 sebesar 92,67 artinya terdapat penurunan angka sebesar 7,85%, hal ini disebabkan oleh penyesuaian target pada tahun 2022.

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pada tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 61,23%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2021, artinya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 lebih banyak dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK. Kondisi ketenagakerjaan selama 4 (empat) tahun di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019-2022 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 741 ribu pada tahun 2019 menjadi 767 ribu pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 menurun menjadi 747 ribu. Penurunan angkatan kerja akibat pandemi covid 19 yang memukul perekonomian, sehingga banyak usia kerja yang terhenti bekerja atau enggan mencari pekerjaan. Secara

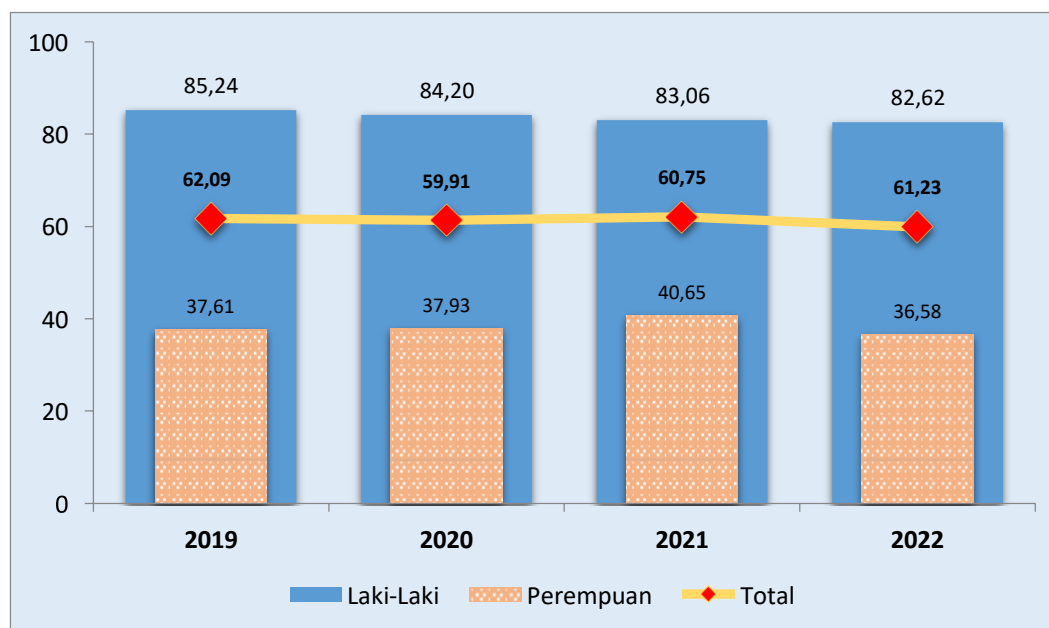
umum, apabila tingginya TPAK disebabkan oleh tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Namun bila tingginya diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja (persentase penduduk yang bekerja), hal ini cukup mengkhawatirkan, karena berarti penduduk yang mencari pekerjaan meningkat yang selanjutnya dapat menambah angka pengangguran.

Tabel 3.31
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019-2022



Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019-2022

Gambar 3.7
Tingkat Partistipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin



Kabupaten Bandung Barat 2019-2022

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019-2022

Secara empiris, terdapat perbedaan antara jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung Barat. Sehingga terjadi ketimpangan pada partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki pada tahun 2022 sebesar 82,62 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 36,58 persen. Kondisi ini dianggap wajar karena norma yang terbangun di tengah masyarakat mengarahkan laki-laki memegang peranan kunci sebagai pencari nafkah utama rumah tangga. Sedangkan perempuan memegang peranan pokok sebagai pendamping suami, mengurus keperluan rumah tangga dan keluarga.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah, semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga;
2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK;
3. Struktur umur, penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah, oleh sebab itu TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah;
4. Semakin rendah tingkat pendidikan semakin kecil kesempatan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin rendah tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin kecil. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin kecil pula.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Adanya perusahaan yang ditutup akibat terdampak covid-19;
2. Banyak perusahaan yang mulai beroperasi namun belum mampu menambah pegawai;

3. Pencari kerja memiliki keinginan untuk membuka usaha namun kondisi ekonomi yang tidak mendukung akibat pandemi;
4. Banyaknya putus sekolah akibat Pandemi covid yang berdampak pada kalah bersaingnya dalam menembus pasar kerja.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

- 1 Pengukuran produktivitas tingkat daerah Kabupaten/Kota berupa pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (IPK)
- 2 Pelayanan antar kerja, Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Sesuai Permenakertrans R.I No. 07/Men/IV/2008 tentang Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja beberapa tugas Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan seperti Penyebarluasan lowongan kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
- 3 Perlindungan PMI (Pra dan Purna Pempatan)

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Desmografis desa Migran kreatif di Kabupaten Bandung Barat terdapat di 2 lokasi desa Saguling Kecamatan Saguling dan Desa Celak kecamatan Gunung Halu;
2. Koordinasi dengan Dirjen penempatan untuk menggali potensi kegiatan Kementerian Tenaga Kerja RI agar dapat di serap di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3. Pemberdayaan Purna Tenaga Kerja Migran Indonesia dalam rangka usaha kemandirian melalui program tenaga kerja mandiri.

- **Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar**

Indikator persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar dengan capaian dari tahun 2019 sampai 2022 mencapai 100 % dari jumlah perselisihan yang terdaftar. Hal ini dipengaruhi oleh penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja sangat diperlukan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. Hubungan industrial tersebut diharapkan tercipta sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi dan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan Bangsa. Kondisi Penyelesaian perselisihan hubungan industrial kabupaten Bandung Barat terdapat pada tabel berikut ini:

A. Faktor yang mempengaruhi melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Pemerintah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
2. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya;
3. Pengusaha dan organisasi pengusaha: menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Tingkat pendidikan yang relatif rendah, memerlukan pendekatan komunikasi yang setara dengan pola pikir karyawan. Orang berpendidikan rendah umumnya tidak neko-neko. Bagi mereka yang penting tercukupi kebutuhan fisiknya: cukup makan, minum, merokok, dan dapat berpakaian secara wajar. Jika tingkat kebutuhan paling bawah dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow sudah terpenuhi, umumnya mereka juga tenang;
2. Kesenjangan ekonomi dan sosial, bukan hanya terjadi di dalam perusahaan tetapi juga di luar perusahaan dapat menimbulkan gejolak kaum pekerja. Kesenjangan ekonomi di dalam perusahaan dapat dilihat dari perbedaan gaji tertinggi dan gaji terendah di dalam perusahaan. Jamak terjadi pada perusahaan-perusahaan bermodal asing, mereka menerapkan sistem penggajian berbeda antara ekspatriat dengan pekerja lokal. Jauhnya perbedaan antara gaji karyawan tingkat rendah dengan para staf, manajer, direksi yang berasal dari asing dapat memicu kecemburuan sosial di dalam perusahaan. Ditambah lagi dengan lingkungan tempat tinggal kaum pekerja yang umumnya berada di rumah kontrakan, rumah petak, akan menambah beban emosi. Di perusahaan mendapat diskriminasi sementara di rumah tinggalnya juga merasakan adanya kesenjangan dalam kehidupan ekonomi dan social;
3. Peningkatan kebutuhan, meningkatnya beban hidup akibat inflasi atau perekonomian yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, pun dapat menjadi pemicu kerawanan hubungan industrial. Tidak heran apabila pemerintahan selalu berusaha mengendalikan sembilan bahan pokok yang dikenal sebagai sembako. Tujuannya adalah untuk meredam gejolak di kalangan masyarakat bawah.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
2. Mediator Hubungan Industrial yang disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (pasal 1 angka 11 dan 12 UU 2/2004)

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target

Untuk menciptakan hubungan industrial yang baik, pasal 103 UU 13/2003 menyebut, hubungan industrial dapat dilaksanakan melalui sarana:

1. Serikat pekerja/serikat buruh;
2. Organisasi pengusaha;
3. Lembaga kerjasama bipartite;
4. Lembaga kerjasama tripartite;
5. Peraturan Perusahaan;
6. Perjanjian Kerja Bersama;
7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan
8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sasaran 15 Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif

Di tengah pemulihan pasca pandemi Covid-19, peranan koperasi sangat penting guna membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terutama, guna menyalurkan program bantuan atau kredit untuk permodalan mereka. Selain itu, kehadiran koperasi sangat penting guna menggairahkan ekonomi nasional, karena koperasi bisa menjangkau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menciptakan wirausaha baru yang mendukung ekonomi regional maupun nasional. Koperasi dan UMKM sebagai pelaku utama perekonomian daerah Kabupaten Bandung Barat, harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, dengan demikian Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Daerah, membuka lapangan kerja serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah khususnya pada saat situasi pandemik seperti sekarang ini.

Pengukuran kinerja melalui strategi meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif ditopang oleh 2 indikator kinerja yaitu pertumbuhan koperasi sehat dan penumbuhan wirausaha baru, sebagai parameter keberhasilan dalam mengukur hasil capaian dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga hasil capaian dan analisis kinernya dapat terlihat dalam mendukung misi mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing. Adapun rincian dan analisis capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32

**Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi,
usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET 2022	REALISASI	%	TARGET	%
Pertumbuhan Koperasi Sehat	190	18,18	25	21,82	87,28	28	77,92
Penumbuhan Wirausaha Baru	75	213	125	149	119,20	150	99,33

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif ditopang oleh 2 indikator, yaitu indikator pertumbuhan koperasi sehat dan penumbuhan wirausaha baru. Dari ke 2 indikator tersebut, indikator pertumbuhan koperasi sehat tahun 2022 tidak mencapai target, realisasi yang diperoleh adalah sebesar 21,82% dengan target yang ditentukan sebesar 25%, untuk capaian yang diperoleh sebesar 87,28% yang artinya indikator tidak berhasil. Adapun untuk indikator penumbuhan wirausaha baru memperoleh realisasi sebesar 149 pelaku usaha, dengan target yang ditentukan sebesar 125 pelaku usaha, sehingga capaian dari indikatornya sebesar 119,20% yang artinya melebihi target dan berhasil.

Berdasarkan 2 indikator tersebut, diperoleh capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif sebesar 103,24%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 44,17%, hal ini disebabkan dengan penambahan yang cukup signifikan wirausaha baru. Dampak dari pandemi covid-19 menimbulkan sisi positif terhadap masyarakat, yaitu dengan tumbuhnya wirausaha baru yang salah satunya dapat dikelola secara

online serta kreativitas masyarakat yang didorong atas dasar kebutuhan yang terjadi saat pandemi berlangsung, namun dengan capaian saat ini yang tidak melebihi target masih masuk dalam kategori berhasil.

- **Pertumbuhan Koperasi Sehat**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dapat diukur dari sejauh mana pertumbuhan koperasi sehat yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Meningkatnya jumlah koperasi tentu harus sejalan dengan kondisi koperasi itu sendiri yang mencirikan aktif, sehat, inovatif dan berdaya saing dengan kualitas indikator yaitu persentase koperasi sehat. Adapun kesehatan koperasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek permodalan;
2. Aspek kualitas aktifa produktif;
3. Aspek efisiensi;
4. Aspek likuidisi;
5. Aspek kemandirian;
6. Aspek jati diri koperasi.
7. Aspek perizinan badan hukum koperasi

Pada indikator pertumbuhan koperasi sehat tahun 2022 menunjukkan data capaian 87,27%. Mengalami peningkatan 4,63% dari capaian tahun 2021 sebesar 82,64%. Dengan rincian peningkatan 24 koperasi sehat dari 210 koperasi pada Tahun 2021 menjadi 234 koperasi sehat pada Tahun 2022. Adapun untuk pertumbuhan jumlah koperasi aktif pada setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.33
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten
Bandung Barat, 2019–2022

Kecamatan Subdistrict	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rongga	7	8	9	12
Gununghalu	11	20	21	21
Sindangkerta	30	27	29	31
Cililin	15	24	28	28
Cihampelas	19	22	25	25
Cipongkor	10	25	33	33
Batujajar	25	19	23	26
Saguling	4	5	5	7
Cipatat	12	25	26	29
Padalarang	77	65	67	71
Ngamprah	91	57	57	67
Parongpong	30	27	29	31
Lembang	39	53	55	62
Cisarua	8	17	18	20
Cikalong Wetan	9	12	13	15
Cipeundeuy	14	19	19	22
Bandung Barat	401	425	457	500

PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA
BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES



Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bawah pertumbuhan koperasi aktif dari tahun 2022 sebanyak 500, bertambah menjadi 43 dari tahun 2021 dalam satu tahun.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah:

1. Digitalisasi koperasi

Pelaksanaan digitalisasi koperasi melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi koperasi untuk berperan serta dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah melalui aplikasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bandung Barat.

2. Pendampingan dan Penyuluhan Koperasi

Pendampingan dan penyuluhan koperasi dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM koperasi.

3. Pelatihan Akutansi Perkoperasian

Pelatihan Akuntansi Perkoperasian sangatlah penting dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4. Pelatihan Manajemen Perkoperasian

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat secara intensif telah melaksanakan Pelatihan Manajemen Perkoperasian terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

5. Fasilitasi Akses Pasar Koperasi

Fasilitasi akses pasar, merupakan tugas besar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan

usaha kecil dan menengah untuk memiliki daya saing tinggi, sebagai strategi meningkatkan akses pasar global atau ekspor.

6. Advokasi Perkoperasian

Advokasi perkoperasian di Bandung Barat, harus lebih ditingkatkan, untuk mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat khususnya milenial untuk tertarik dan percaya untuk berperan aktif dan menjadi anggota koperasi, untuk itu koperasi yang ideal harus memiliki hubungan baik dan kepercayaan tinggi pada anggota. koperasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan media social diantaranya Instagram, TikTok, Fb, Web, dll.

7. Pengawasan koperasi

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Penguatan Kelembagaan Dan Penataan Manajemen Koperasi

Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan

B. Faktor penghambat / permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya Kapasitas SDM Pengawas dan Pengurus Koperasi;
2. Masih Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
3. Banyaknya Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha Koperasi dan Legalitas Koperasi yang belum sesuai dengan kondisi koperasi;
4. Masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran koperasi;
5. Belum optimalnya digitalisasi koperasi;
6. Belum adanya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan koperasi;
7. Manajemen dan daya saing usaha Koperasi belum optimal.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Fasilitasi Kerjasama antar koperasi;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan berkoperasi;
3. Pendampingan dan Penyuluhan Perkoperasian;
4. Fasilitasi perizinan koperasi;
5. Fasilitasi Advokasi Pendirian Koperasi;
6. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi melalui Peraturan Daerah;

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target:

1. Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi;
2. Digitalisasi Koperasi melalui pelatihan penggunaan teknologi informasi bagi pengurus koperasi, sehingga dapat tercipta pengelolaan koperasi berbasis teknologi;
3. Fasilitasi temu usaha antar koperasi dengan pelaku usaha lainnya sebagai sarana pemasaran dan kerjasama usaha koperasi;
4. Fasilitasi permodalan terhadap koperasi untuk meningkatkan daya saing usaha koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
5. Penghargaan Koperasi berprestasi;
6. Program “Warung Berkah”, bela beli produk UMKM melalui Koperasi;
7. Kerjasama antar koperasi melalui program wajib belanja ASN kepada UMKM KBB;
8. Pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Tingkat KBB, dalam rangka pemasaran dan pemasyarakatan koperasi di KBB.

- **Penumbuhan Wirausaha Baru**

Penumbuhan wirausaha baru dilaksanakan dengan tujuan menumbuhkan jiwa dan motivasi berwirausaha, menciptakan wirausaha baru bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan

yang kreatif dan inovatif, dan membentuk wirausaha yang hebat, tangguh dan handal di Kabupaten Bandung Barat. Indikator penumbuhan wirausaha baru menjadi salah satu indikator yang baru dalam mengukur keberhasilan meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif. Pada indikator Penumbuhan Wirausaha Baru tahun 2022 menunjukkan data capaian 119,2%, telah melebihi target yang direncanakan yaitu sebesar 125 Pelaku Usaha, jika dibandingkan dengan tahun 2021, dari target 100 Pelaku Usaha dicapai sebesar 213 Pelaku usaha. Adapun hal-hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target adalah:

A. Faktor yang mempengaruhi melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Pelatihan Kewirausahaan;
2. Pelatihan Managerial dan pemasaran;
3. Sosialisasi dan Fasilitasi Legalitas pelaku UMKM (Perizinan, sertifikat halal, HAKI);
4. Pengembangan Forum UMKM.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Data Base Pelaku UMKM yang belum tersedia;
2. Belum optimalnya manajemen usaha pelaku UMKM;
3. Rendahnya Akses Pemasaran, Kemitraan dan Akses Permodalan UMKM;
4. Rendahnya Produktivitas dan Daya saing UMKM;
5. Belum optimalnya digitalisasi pelaku UMKM.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Pendataan potensi UMKM dengan data pusat;
2. Meningkatkan fasilitasi legalitas UMKM (NIB, HAKI, HALAL);

3. Pelatihan dan Bimtek kewirausahaan, Perizinan, Digital Marketing, dll.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya target:

1. Strategi Pemasaran Digital;
2. Pemasaran Produk Prioritas di Galeri / IKEA;
3. Bersinergi dengan stakeholder, instansi terkait dan unsur pentahelix;
4. Mengalokasikan anggaran untuk program wirausaha baru;
5. Fasilitasi Legalitas UMKM.

TUJUAN 6

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi dan sosial

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi mulai dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan Nasional dan Daerah khususnya Kabupaten Bandung Barat. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Pembangunan telah mengalami perluasan makna, namun di dalamnya tetap menganggap pertumbuhan sebagai hal yang penting. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial,

yang menentukan tingkat standar hidup negara tersebut. Upaya mempercepat pembangunan regional dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitasnya. Kegiatan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga mendorong peningkatan potensi daerah masing-masing secara berkesinambungan. Pertumbuhan potensi daerah akan mendorong proses pertukaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memungkinkan bergerakaknya perekonomian daerah sesuai dengan potensinya serta secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat sesuai dengan kemampuannya yang optimal.

Sasaran 16 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Ekonomi, Kawasan Perkotaan dan pusat Kegiatan di Pedesaan, melalui Alternatif Skema Pembiayaan

Kondisi infrastruktur dan geografis desa sangat mempengaruhi tingkat aksesibilitas ke desa tersebut. Semakin minim infrastruktur maka akan semakin sulit desa tersebut dijangkau. Selain itu kondisi geografis yang kurang mendukung, biasanya berupa daerah pegunungan atau lereng yang curam juga akan menurunkan tingkat aksesibilitas desa. Aksesibilitas desa tidak hanya terfokus pada transportasi dan sarana transportasi saja, tapi juga infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi, ketersediaan energi serta ketersediaan pelayanan dasar terkait pendidikan dan kesehatan.

Pencapaian yang dilakukan dalam merealisasikan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di pedesaan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Indeks Kesulitan Geografis (IKG) adalah Indeks komposit yang menggambarkan tingkat kesulitan akses terkait kondisi geografis atau ketersediaan sarana prasarana di desa. Tingkat kesulitan geografis diukur berdasarkan jangkauan ketersediaan pelayanan dasar,

infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi. Semakin besar tingkat kesulitan geografis berarti semakin sulit desa dalam menjangkau ketersediaan akan pelayanan dasar, infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi, dibandingkan dengan desa yang memiliki tingkat kesulitan geografis yang lebih rendah. Sehingga desa dengan Indeks Kesulitan Geografis yang tinggi perlu perhatian yang lebih besar dari pemerintah.

IKG pada dasarnya merupakan indeks yang disusun berdasarkan scoring yang dilakukan untuk masing – masing instrumen penilaian. Pemilihan instrumen ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. IKG dihitung dengan rentang nilai 0–100 dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Indeks Kesulitan Geografis (IKG) disusun berdasarkan 3 faktor yaitu:

1. Ketersediaan pelayanan dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan;
 2. Kondisi infrastuktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi;
- Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Tabel 3.34
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Ekonomi, Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan di
Pedesaan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	N/a*	27,59	33,82	26,78	120,82	32,22	116,88

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di pedesaan dengan 1 indikator yaitu Indeks Kesulitan Geografis (IKG), realisasi IKG Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 berada pada skala 26,78. Sesuai dengan perhitungan IKG jika nilainya semakin rendah maka akan semakin baik, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan capaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,81. Adapun jika dibandingkan dengan akhir RPJMD capaian saat ini telah melebihi target dengan total capaian 116,88%. Perolehan realisasi tahun 2022 saat ini pun telah melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian 120,82%, artinya capaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di pedesaan dapat dikatakan berhasil.

Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) berdasarkan 3 faktor yaitu Ketersediaan pelayanan dasar, Kondisi infrastuktur dan Aksesibilitas/Transportasi. Berdasarkan komponen penyusunan tersebut Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi *leading sector* dalam menunjang tercapainya indikator Indeks Kesulitan Geografis.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah :

1. Penyediaan perlengkapan jalan meningkat, khususnya pada Alat Penerangan Jalan sehingga mendorong pada pencapaian faktor pelayanan dasar;
2. Adanya pembangunan infrastuktur baru berupa Flyover Yang menghubungkan Gerbang Tol Padalarang dengan Kawasan Kotabaru Parahyangan, yang berpengaruh baik terhadap aksesibilitas di sekitaran kawasan Padalarang dan berdampak terhadap pergerakan perekonomian kawasan padalarang yng

berkontribusi ke pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target :

1. Masih rendahnya ketersediaan konektivitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
2. Terbatasnya penganggaran untuk penyediaan infrastruktur;
3. Terjadinya bencana alam pada ruas-ruas jalan Kabupaten yang mengakibatkan kerusakan pada badan jalan maupun pada bahu jalan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Menata kembali jaringan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga pelayanan konektivitas orang di wilayah KBB dapat terselenggara dengan baik;
2. Mengusulkan bantuan keuangan Khusus (BKK) Jawa Barat untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur bidang Perhubungan di wilayah KBB;
3. Merumuskan bentuk inovasi yang aplikatif dalam pelayanan Perhubungan sehingga memberikan kemudahan dan manfaat yang banyak dirasakan oleh masyarakat;
4. Membuat anggaran khusus tentang penanganan jalan yang di akibatkan oleh bencana alam.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target :

1. Melaksanakan pembangunan fasilitas Perhubungan yang menggunakan sumber anggaran dari luar APBD Kabupaten Bandung Barat seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Jawa Barat dan APBN;
2. Membuat aplikasi inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan.

Sasaran 17 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sosial

Pembangunan ekonomi suatu wilayah tak luput dari pengaruh sosial budaya, keadaan politik, kelembagaan dan sistem yang berlaku. Faktor-faktor tersebut saling terkait dalam menggerakkan roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan yang tak kalah penting adalah unsur pemerataan pembangunan yang mendorong terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat.

Pencapaian pembangunan di Kabupaten Bandung Barat sudah relatif terus membaik, namun masih banyak pekerjaan yang masih belum optimal terkait dengan pembenahan fasilitas umum dan infrastuktur yang menjadi daya dukung dalam aktivitas perekonomian daerah. Akses jalan, infrastuktur dan sarana transportasi, baik kuantitas maupun kualitasnya berperan penting dalam Pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sehingga sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur sosial dapat diukur capaiannya dengan indikator Presentase Penduduk yang Terlayani oleh Sistem Prasarana Sosial.

Adapun untuk capaian Presentase Penduduk yang Terlayani oleh Sistem Prasarana Sosial tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.35
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Sosial

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Penduduk yang Terlayani oleh Sistem Prasarana Sosial	N/a*	111	63,67	N/a*	N/a*	65,42	N/a*

Berdasarkan tabel di atas capaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial ditopang oleh 1 indikator yaitu persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial, saat ini untuk realisasi indikator tersebut masih dalam proses perhitungan. Adapun jika melihat capaian tahun sebelumnya realisasinya sudah melebihi target dengan prolehan nilai 111 dengan capaian sebesar 179,26%.

Ketersediaan infrastruktur bagi suatu negara merupakan sumber dari adanya pembangunan yang terjadi secara nasional maupun daerah. Lebih luas, infrastruktur berperan dalam peningkatan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja termasuk pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan sebagai tujuan akhir adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur memberikan dampak terhadap perekonomian melalui dua cara yaitu dampak secara langsung dan dampak secara tidak langsung. Dampak langsung adalah meningkatnya *output* dengan bertambahnya infrastruktur, sedangkan dampak tidak langsung adalah mampu mendorong kenaikan aktivitas perekonomian yang akan meningkatkan modal, baik bagi pihak swasta maupun pihak pemerintah dan menyerap tenaga kerja yang berakibat pada kenaikan *output*.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah :

1. Melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh seperti: penataan ruang terbuka hijau, penataan tempat pembuangan sampah, pemasangan listrik pada rumah yang belum memiliki

- aliran listrik dan pemasangan listrik serta lampu di jalan-jalan umum dan juga TPU ataupun yang dimiliki Pemda KBB;
2. Faktor keberhasilan yang membuat realisasi Presentase Tersedianya Akses Air Minum Yang Memadai yaitu pembangunan infrastruktur pendukung layanan air bersih berupa SPAM (sistem pengelolaan air minum) yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
 3. Adanya penambahan unit armada pengangkut sampah berupa 3 unit *dump truck*.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target :

1. Proses pengerjakan serta pemetaan luas lahan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan;
2. Adanya perubahan data dikarenakan beberapa calon penerima bantuan yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris;
3. Masih ada timbunan sampah liar di pinggir jalan;
4. Kurangnya pembinaan terhadap bank sampah.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Adanya agenda kegiatan bedah rumah yaitu dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) atau bantuan dari perusahaan-perusahaan yang mendukung dalam hal RUTILAHU;
2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan kegiatan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) yang tertangani total sampai dengan tahun 2020 sebanyak 9.251 Unit;
3. adanya dana swakelola dari kementerian pusat untuk kegiatan PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) dan serta peran aktif masyarakat dalam kegiatan air bersih dalam pengelolaan pra dan pasca pelaksanaan kegiatan air bersih serta dukungan desa dan kecamatan terkait dalam hal

pengelolaan kegiatan air minum dan sistem operasional pengelolaan air minum yang baik yang dilakukan oleh masyarakat;

4. Memaksimalkan peran armada pengangkutan sampah dalam pengangkutan sampah liar, memberdayakan peran tenaga PTT (sebagai koordinator kecamatan dan koordinator desa) dalam monitoring aksi 3R di masyarakat (bank sampah).

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target :

1. Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat dengan perempuan sebagai penggeraknya;
2. Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), merupakan rencana kegiatan implementasi kemandirian komponen TNI, aparat pemerintah di semua tingkatan sesuai dengan tataran kewenangan yang dimiliki bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik diarahkan untuk mendinamisasikan pertumbuhan desa terutama sasaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat;
3. Membuat perencanaan pembangunan infrastruktur air minum baik secara kota maupun kabupaten dan mengoptimalkan kembali perencanaan pembangunan infrastruktur yang sudah ada serta

melakukan kerja sama dengan BUMD dalam pengelolaan layanan air minum di Kabupaten Bandung Barat dan mencari potensi mata air di wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk pelayanan air minum.

TUJUAN 7

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain banyaknya pembangunan berlebihan dikawasan dengan peruntukan lahan penyangga atau kawasan lindung, yang menyebabkan berkurangnya lahan konservasi sehingga berpotensi menyebabkan bencana alam. Selain itu, ketersediaan air tanah juga akan terdampak oleh berkurangnya luasan daerah serapan. Laju pembangunan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selain faktor pembangunan, meningkatnya pertumbuhan penduduk juga berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan lingkungan, seperti sampah, limbah dan lain sebagainya.

Mengingat pentingnya kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, maka Pemerintah Daerah menjadikan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebagai salah satu sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sasaran 18 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tolak ukur Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah dengan mengukur capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA),

Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Karena wilayah Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki laut maka IKLH dihitung berdasarkan 3 faktor yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tabel 3.36
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

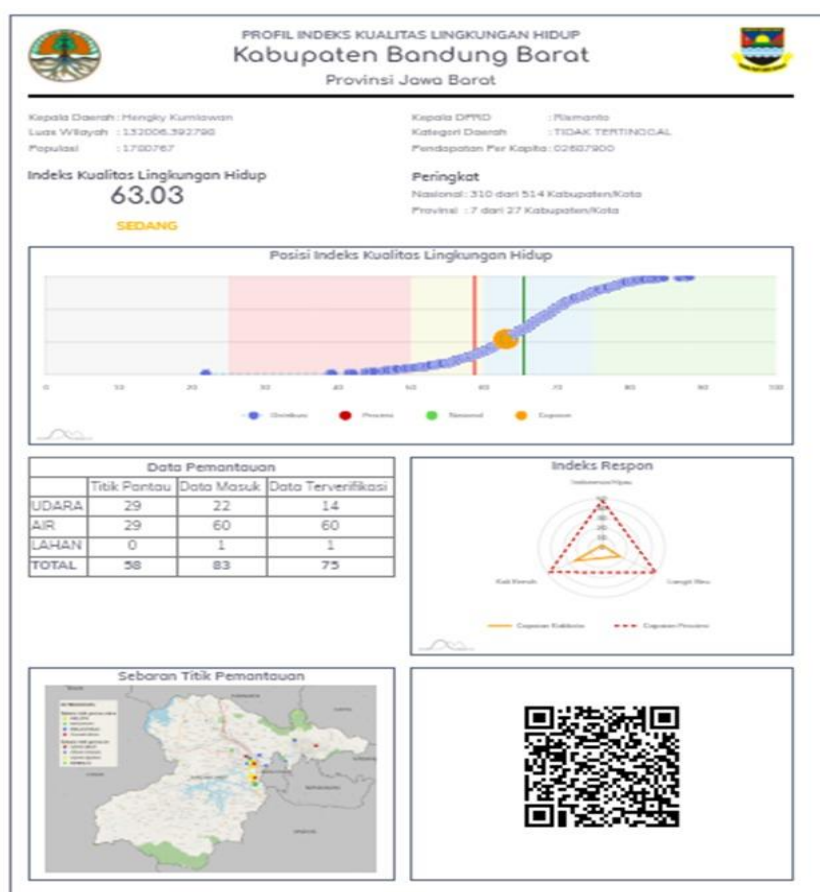
INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,07	50,27	47,15	63,03	133,68	47,20	133,54

Berdasarkan tabel di atas, pada indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2022 memperoleh realisasi sebesar 63.03 dengan target yang ditentukan sebesar 47,15, yang artinya melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian sebesar 133,68%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 perolehan indeks kualitas lingkungan hidup mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hasilnya pun telah melampaui target dengan capaian 133,54, hal ini merupakan sinyal positif yang perlu terus dipertahankan, mengingat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan vegetasi sebagai indikator kualitas lingkungan. Nilai IKLH didapatkan dengan menghitung nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pada tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) telah mengeluarkan inovasi berupa tautan website bagi pemerintah daerah untuk melihat capaian IKLH. Sistem tersebut merupakan gabungan data hasil pemantauan dilakukan oleh KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Perolehan

Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 adalah 49,33, perolehan Indeks Kualitas Udara adalah 76,98 dan perolehan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 60,75. Bahwa nilai IKLH pada tahun 2022 yaitu 63,03 berada diantara $50 \leq x < 70$ yang masuk ke kriteria Sedang. Berdasarkan nilai IKLH yang diperoleh, Kabupaten Bandung Barat mendapatkan peringkat 7 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan peringkat 320 dari 514 Kabupaten/Kota se Indonesia.

Gambar 3.8
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bandung Barat



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah :

1. Antusias dunia pendidikan dalam melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) yang meliputi 3 kegiatan yaitu perencanaan gerakan,

pelaksanaan GPBLHS dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan GPBLHS, kemudian yang terakhir adalah penjelasan mengenai isian exel kuisioner tentang evaluasi mandiri sekolah dan penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata;

2. Pemanfaatan teknologi saat ini yaitu berupa pemasangan GPS pada armada pengangkut sampah, sehingga memudahkan dalam melakukan kontrol untuk mendeteksi keberadaan lokasi armada;
3. Program Citarum Harum yang saat ini terus dilakukan secara konsisten dan dampaknya mulai terasa di beberapa daerah;
4. Peningkatan pelaku usaha untuk mengelola Limbah B3 yang dihasilkan;
5. Koordinasi secara sinergis yang dilakukan oleh KLHK dan DLHK Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengawasan usaha.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target :

1. Kabupaten Bandung Barat belum memiliki IPAL terpusat untuk pengolahan air limbah domestik;
2. Pencemaran air sungai oleh aktivitas domestik (rumah tangga) akan semakin meningkat akibat adanya peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya alih fungsi lahan untuk permukiman;
3. Sampai saat ini masih minimnya infrastruktur persampahan (TPS dan TPST);
4. Kurangnya monitoring dan pembinaan terhadap aksi 3R;
5. Banyaknya armada pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai karena faktor usia armada;
6. Adanya kenaikan jumlah penduduk setiap tahun di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang berdampak pada meningkatkan jumlah timbulan sampah.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Melaksanakan pemantauan air sungai dan udara ambient, Fasilitas IPAL UMKM peternak sapi, fasilitas IPAL UMKM pabrik tahu dan pemasangan alat pemantau air sungai (telemetri) yang merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pembinaan desa Proklam, Penanaman non area hutan, Monitoring pengelolaan LB3 industri, Penilaian dan verifikasi usulan dokumen lingkungan, Pengawasan industri dan tindak lanjut laporan dugaan kerusakan/pencemaran lingkungan;
2. Tahun ini telah dilakukan pemasangan GPS untuk memantau keberadaan lokasi armada pengangkut sampah;
3. Melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan terkait pengelolaan LB3 sektor pelayanan kesehatan agar dapat dikelola dengan baik;
4. Terus melakukan upaya pembinaan secara intens terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar sempadan sungai untuk ikut menjaga kelestarian sungai;
5. Optimalisasi peran armada pengangkutan sampah dalam pelayanan sampah dan pengangkutan sampah liar;
6. Optimalisasi kapasitas pengangkutan sampah ditengah minimnya armada yang dimiliki saat ini.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target :

1. Pemasangan GPS untuk armada pengangkutan sampah sehingga keberadaan lokasi armada dapat terdeteksi.
2. Melakukan pemetaan sumber-sumber pencemar (LB3) industri di setiap wilayah pada Kabupaten Bandung Barat.
3. Menggunakan tautan link dlh.bandungbaratkab.go.id terkait persetujuan lingkungan yang jenis kegiatannya belum bisa dilayani melalui sistem OSS (seperti sektor pendidikan dan praktek mandiri tenaga medis).

TUJUAN 8

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia.

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil.

**Sasaran 19 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih,
Akuntabel, Efektif dan Efisien**

Upaya agar terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien salah satunya dilakukan dengan penekanan pada pembangunan aparatur negara melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat.

Praktek dalam implementasinya, pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan PNS; peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya; dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya sosok dan perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif, bersih, bebas KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tatanan birokrasi dalam pemerintahan yang mampu melakukan pelayanan publik secara optimal menjadi dambaan warga negara dimanapun berada. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dengan menciptakan Birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien terhadap aspek organisasi, SDM, prosedur dan peraturan, serta pembenahan pada aspek pengawasan dan akuntabilitas untuk dapat memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan publik. Sehingga untuk mengukur capaian sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien. Dalam menunjang terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien maka Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat menetapkan 5 (Lima) indikator kinerja sebagai acuan dan tolak ukur ketercapaian sasaran tersebut. Adapun ketercapaian sasaran mengenai terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.37
Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih,
Akuntabel, Efektif dan Efisien.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
		2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
1.	Indeks Merit	Kategori II	Kategori III	Kategori III	Kategori III	100	Kategori IV	100
2.	Nilai Sakip	B	B	BB	B	97,19	A	74,49
3.	Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	100	WTP	100
4.	Indeks SPBE	3,17	2,85	2,81	2,65	94,31	3,00	88,33

* Data tahun 2022 masih menunggu Hasil Evaluasi Kemen PAN-RB

Berdasarkan tabel capaian sasaran terwujudnya pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh rata-rata hasil capaian sebesar 97,87 % dari total 4 indikator yang menopangnya. Dari 4 indikator terdapat 2 indikator yang mencapai target yaitu Indeks merit dan Opini BPK dan 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu Nilai SAKIP dan Indeks SPBE. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata capaian sasaran mengalami peningkatan dari 95,20 menjadi 97,87, dengan 1 indikator yaitu opini BPK yang tidak mencapai target tahun 2021. Dengan pencapaian total rata-rata sasaran capaian sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien sebesar 97,87%, artinya capaian kategori berhasil.

I. Indeks Merit

Kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 oleh KASN dilaksanakan secara bersamaan dengan agenda Evaluasi Akhir 8 Aspek Sistem Merit. Aspek Penilaian dalam Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dilakukan dengan mengunggah bukti -bukti pendukung ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER). Hasil yang diraih tahun 2022 mendapatkan capaian kategori III (baik) dengan target tahun 2022 kategori III (Baik), artinya tahun ini pencapaian indek merit Kabupaten Bandung Barat tercapai. Adapun perolehan skor jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, yaitu sebesar 5,5 dengan total skor 288. Hal ini diperoleh dengan melakukan langkah-langkah seperti:

- a. Penerapan Assessment Center di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. telah memiliki peta jabatan yang komprehensif yang disusun dengan mempertimbangkan prioritas instansi;
- c. mulai membangun mekanisme talent pool berdasarkan pemetaan kompetensi dan kinerja pegawai, meliputi talent mapping untuk menilai tingkat kesiapan (readiness) dari ASN untuk ditempatkan pada tanggung jawab yang lebih tinggi.

II. Nilai SAKIP

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor B/973/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai dievaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi menunjukkan nilai SAKIP tahun 2022 memperoleh sebesar 68,03 dengan predikat B, jika dibandingkan dengan target tahun ini, belum mencapai target yang ditentukan yaitu nilai 70,00 dengan predikat BB. Namun meski belum mencapai target, terdapat kenaikan nilai dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,48, meskipun dari komponen yang dinilai berdeda dengan tahun 2021, yaitu terdapat 5 komponen penilaian dimana tahun 2022 hanya terdapat 4 komponen penilaian dengan komposisi bobot yang berbeda. Dengan perolehan saat ini implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

III. Opini BPK

Tahun 2022 opini BPK Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan data capaian 100% yaitu memperoleh skor Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, yang awalnya tahun 2021 memperoleh skor Wajar dengan Pengecualian (WDP) tahun 2022 menjadi WTP, hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang sinergis dari semua pihak. Pencapaian WTP diperoleh manakala LKPD disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas, pembuatan laporan keuangan merupakan bentuk transparansi pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik transparansi informasi keuangan dan fiskal mampu dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Pemerintah Daerah merupakan entitas publik yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Bermanfaat atau tidak informasinya juganya hanya dapat ditentukan secara kualitas oleh pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah antara lain

adalah kualitas sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal.

IV. Indeks SPBE

Berdasarkan Pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2022 oleh KemenPAN-RB menunjukkan data capaian 94,31% dengan skor 2,65 dari skala 5, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, dengan target 2,81.



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2022

Berdasarkan perbandingan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dan 2022, terlihat terdapat 3 Domain yang mengalami penurunan yaitu Domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Manajemen SPBE, namun terdapat 1 domain yang mengalami peningkatan yaitu Domain Layanan SPBE. Pada pelaksanaan Pemantauan SPBE Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 mendapatkan indeks sebesar 2,65 dengan kategori “Baik”. Nilai tersebut masih melebihi rata-rata Indeks SPBE Nasional yaitu 2,35 dengan predikat “Cukup”. Penilaian Indeks SPBE ini sendiri dilakukan oleh Evaluator Eksternal dari KemenPAN-RB kepada 451 Instansi Pusat dan Pemerintah (IPPD) Daerah yang masuk kedalam lokus pemantauan SPBE, serta 103 IPPD yang masuk kedalam lokus Evaluasi SPBE.

Adapun Pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2022 oleh KemenPAN-RB terdapat 3 pengelompokkan lokus IPPD yaitu lokus evaluasi, lokus pemantauan wajib dan lokus pemantauan tambahan. Bagi IPPD yang masuk dalam lokus evaluasi, dilakukan 5 tahapan pelaksanaannya yaitu 1. persiapan dan koordinasi; 2. Penilaian mandiri; 3. Penilaian dokumen; 4. Penilaian interviu; dan 5. Penilaian visitasi (opsional). Sedangkan bagi IPPD yang masuk dalam lokus pemantauan, hanya dilakukan 3 tahapan pelaksanaan yaitu 1. Persiapan dan koordinasi; 2. Penilaian mandiri; dan 3. Penilaian dokumen. Kabupaten Bandung Barat masuk dalam lokus pemantauan tambahan yang artinya tidak dilakukan penilaian interviu maupun visitasi.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien terdapat beberapa penghargaan yang diraih, yaitu:

1. Penghargaan Anugerah Meritokrasi Tahun 2022 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara memperoleh Kategori “Baik”;

2. Penghargaan Peringkat I BKN Award Tahun 2022 Tingkat Kab/Kota Se-Jawa Barat Kategori Ketaatan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN;
3. Penghargaan Implementasi Manajemen ASN Tingkat Kabupaten / Kota se-Jawa Barat.



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengupayakan penerapan *Assessment Center* dan membangun mekanisme *Talent Pool*;
2. Membangun dan mengembangkan aplikasi E-porja dengan mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran hingga informasi kinerja serta menyusun arsitektur kinerja;
3. Pemenuhan tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan koordinasi yang sinergis terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
4. Pengembangan *Super-Apps* Layanan Administrasi Pemerintahan bernama SMART KBB yang telah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi meliputi Layanan Naskah Dinas (E-Office), Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) serta Manajemen Kinerja Pegawai (Presensi dan AKUR). *Super-Apps* Layanan Publik yaitu KBB Berkah memuat sebagian besar layanan publik yang menjadi indikator penilaian, diantaranya yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Perizinan, Layanan Kependudukan, Layanan informasi kesehatan, pajak dan informasi-informasi lainnya.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Pemutakhiran data mandiri pegawai ASN sampai saat ini masih dalam proses;

2. Belum optimalnya integrasi sistem kinerja dengan sistem informasi manajemen talenta dan belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator, pengawas dan Jabatan Fungsional, sehingga belum tersusunnya gap kompetensi per jabatan;
3. Belum adanya pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja sehingga data hasil capaian kinerja sulit diperoleh dan tidak tepat waktu;
4. Belum adanya kebijakan *reward* and *punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga belum cukup mendorong peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
5. Belum terpenuhinya sumber daya manusia di masing-masing Perangkat Daerah yang berkompeten terhadap penyusunan laporan keuangan sebanyak 47 Perangkat Daerah dan 36 BLUD;
6. Penerapan indikator manajemen perubahan, pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, pelaksanaan audit aplikasi SPBE, serta pelaksanaan audit keamanan SPBE sampai saat ini belum diterapkan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Percepatan pengisian profil ASN yang dikoordinasikan dengan pimpinan seluruh Perangkat Daerah;
2. Menyusun strategi dan program pengembangan kapasitas ASN melalui jalur klasikal dan non klasikal dalam dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang dapat secara efektif menyasar kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai dengan berpedoman pada Peraturan LAN No.10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS;
3. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2023 akan menyusun Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan dokumen SAKIP Kabupaten Bandung Barat yang akan memuat

- dokumen mulai dari Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja;
4. Saat ini sedang dilakukan koordinasi dan perencanaan mekanisme pemberian reward terhadap Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan aspek anggaran dan urgensinya;
 5. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah berupaya meningkatkan kompetensi SDM di masing-masing Perangkat Daerah dalam hal penyusunan laporan keuangan dan penggunaan SIPD akuntansi pelaporan dengan menggandeng Kemendagri dalam hal pelatihan, bimtek dan pendampingan;
 6. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah berupaya untuk melaksanakan reviu terkait evaluasi pelaksanaan SPBE dengan tik koordinasi.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target:

1. Memperluas pemetaan profil kompetensi pegawai menggunakan *assessment center*;
2. Menyusun kelompok rencana suksesi dari *talent pool* yang disandingkan dengan kesesuaian kompetensi teknis;
3. Menyusun Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan dokumen SAKIP Kabupaten Bandung Barat yang akan memuat dokumen mulai dari Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja;
4. Rekonsiliasi data pendapatan belanja dan BMD secara berkesinambungan setiap tahun secara berkala untuk memastikan keakuratan data dan ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan;
5. Berkoordinasi dengan inspektorat dalam menyelesaikan TLHP SPI maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
6. Membuat arsitektur dan peta rencana SPBE, sehingga dapat

mendongkrak potensi peningkatan indeks SPBE kabupaten Bandung Barat.

7. Pengembangan *super-app* yang akan menyederhanakan sistem aplikasi khusus dan menghindari munculnya banyak aplikasi yang lebih menyulitkan manajemen di masa mendatang.

TUJUAN 9

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Dalam kenyataannya pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sasaran 20 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut merupakan sebuah langkah nyata untuk mewujudkan *good governance* terutama di dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

Tujuan Utama penerapan kebijakan otonomi daerah salah satunya adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan kebijakan ini masyarakat dapat semakin mudah untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas terutama pada pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik berjalan, perlu dilakukan survei yang dilakukan kepada penerima layanan dengan mengukur indeks kepuasan masyarakat, agar dapat memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Salah satu metode yang direkomendasikan pemerintah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu program yang mendukung misi ke-4 Pemerintah Bandung Barat yang tertuang dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik menjadi salah satu perhatian khusus, terlihat pada capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 yang memiliki nilai 82,22.

Tabel 3.38
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,29	80,75	80,23	82,22	102,62	81,23	101,35

Berdasarkan tabel di atas pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 menunjukkan data realisasi

sebesar 82,22 dengan target yang hendak di capai sebesar 80,23 sehingga capaian yang diperoleh melebihi target yaitu sebesar 102,62 %, jika dibandingkan dengan tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan sebesar 1,93 % dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,47%.

Kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan karena adanya perubahan pada jumlah responden, adapun penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan yang berjumlah 83, terdiri dari 47 Perangkat Daerah, 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 32 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan nilai interval IKM 3,29 dengan rata-rata nilai SKM sebesar 82,22 dan hasil huruf mutu pelayanan yaitu B (Baik).

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Faktor yang mempengaruhi bertambahnya nilai IKM diantaranya bertambahnya jumlah responden, 1 penyelenggara pelayanan dan konsistensi yang dilakukan responden tahun lalu;
2. Pemenuhan unsur pelayanan pada Perangkat Daerah mengalami perubahan yang lebih baik.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Pelayanan dari unit penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan ketentuan;
2. Sarana pengaduan di setiap unit pelayanan pengaduan kurang memadai;
3. Kurangnya perhatian perangkat daerah dalam unsur pelayanan seperti SOP, waktu penyelesaian dan perilaku pelaksana.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Menjadikan prioritas dalam peningkatan mutu pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat;
2. Melakukan evaluasi dan perhatian khusus kepada perangkat daerah yang menjadikan ujung tombak pelayanan dasar sebagai urusan wajib;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh unit penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target:

1. Melakukan pemutakhiran aplikasi E-SKM yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mempermudah pengisian survei;
2. Unit penyelenggara pelayanan menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, *whatssap*, email, dan atau kotak saran;
3. Melakukan inisiasi untuk pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

3.2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.39
Pencapaian Kinerja Sasaran Per Indikator Tahun 2022

No	Nilai Angka	Interprestasi	Jumlah	Capaian (%)
1.	> 85	Berhasil	29	72,5

2.	< 85	Tidak Berhasil	10	25
3.		N/A	1	2,5
TOTAL			40	100

*Masih ada beberapa indikator yang belum masuk datanya

Secara umum Pemerintah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2022 dengan baik, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN		JUMLAH INDIKATOR	RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR	< 85	≥ 85	N/a
				Tidak Berhasil	Berhasil	
MISI 1: Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas						
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1	82,95	√		
2	Meningkatkan Minat Budaya Baca	1	37,97	√		
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	2	104,65		√	
4	Terwujudnya Ketahanan Pangan	1	93,66		√	
5	Meningkatnya Pembangunan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	53,13	√		
6	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	2	93,9		√	
7	Meningkatkan sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan	1	89		√	

SASARAN		JUMLAH INDIKATOR	RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR	< 85	≥ 85	N/a
				Tidak Berhasil	Berhasil	
	penanggulangan bencana					
8	Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	3	90,15		√	
9	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat	2	128,65		√	
10	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	2	92,08		√	
11	Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak	3	67,71	√		
MISI 2: Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing						
12	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	7	130,43		√	
13	Meningkatnya investasi PMDN	2	81,47	√		
14	Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada	2	92,67		√	
15	Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif	2	99,60		√	
MISI 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi						
16	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat	1	120,82		√	

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR	< 85	≥ 85	N/a
			Tidak Berhasil	Berhasil	
	kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternative skema pembiayaan				
17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial	1	N/a		√
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	133,68	√	
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi					
19	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	4	98,79	√	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	102,48	√	

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Dari tabel terlihat bahwa pemakaian **kategori Berhasil dengan interval capaian ≥85 lebih banyak diperoleh pada setiap Sasaran**, ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat telah berupaya secara maksimal untuk melakukan kinerja yang baik untuk melayani masyarakat dengan berbagai program pemerintah, baik pembangunan dan pelayanan berbagai sektor kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik,

dan terus meningkat meski masih banyak potensi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

3.3. Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Pencapaian kinerja meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan indikator yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan adalah hasil kerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama masyarakat dan stakeholder bidang keuangan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 6.179.021.871.131,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.674.794.053.542,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,84 %.

Adapun realisasi anggaran belanja daerah dalam mencapai kinerja sasaran dilihat dari masing-masing organisasi atau satuan perangkat kerja daerah pada tahun 2022 rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.41

Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022		
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
1	Pendapata n Daerah	2,980,703,438,219.00	2,781,252,577,719.06	93,30
2	Belanja Daerah	3,198,318,432,912.00	2,893,541,475,823.00	90,47
Jumlah		6,179,021,871,131.00	5,674,794,053,542.00	91,84

Sumber: BPKD Kabupaten Bandung Barat 2022 (*data masih dalam audit BPK)

Tabel 3.42
Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun
Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	2	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2,980,703,438,219	2,781,252,577,719	93.31
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	740,926,947,093	667,243,725,925	90.06
3	Pajak Daerah	480,000,000,000	495,814,400,587	103.29
4	Retribusi Daerah	21,341,968,392	15,099,253,355	70.75
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	989,684,042	1,253,070,525	126.61
6	Lain-lain PAD yang Sah	238,595,294,659	155,077,001,458	65.00
7	PENDAPATAN TRANSFER	2,239,776,491,126	1,929,331,252,543	86.14
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,934,184,190,171	1,637,296,424,922	84.65
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	305,592,300,955	292,034,827,621	95.56
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	184,677,599,251	100.00
11	Pendapatan Hibah	-	-	-
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	184,677,599,251	100.00
13	BELANJA DAERAH	3,198,318,432,912	2,893,541,475,823	90.47
14	BELANJA OPERASI	2,311,858,162,809	2,086,070,172,818	90.23
15	Belanja Pegawai	1,217,760,026,253	1,126,247,524,223	92.49
16	Belanja Barang dan Jasa	977,209,697,850	880,687,593,731	90.12
17	Belanja Bunga	11,025,600,000	10,303,550,991	93.45
18	Belanja Hibah	94,412,976,451	62,369,036,473	66.06
19	Belanja Bantuan Sosial	11,449,862,255	6,462,467,400	56.44
20	BELANJA MODAL	405,761,320,380	341,545,861,605	84.17
21	Belanja Modal Tanah	-	-	-
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105,276,225,240	97,105,705,629	92.24
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,863,377,816	52,174,354,880	91.75
24	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	226,585,975,882	177,473,377,906	78.32
25	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16,064,661,352	14,098,540,479	87.76
26	Belanja Modal Aset Lainnya	971,080,090	693,882,711	71.45
27	BELANJA TIDAK TERDUGA	9,090,015,624	2,511,104,082	27.62
28	Belanja Tidak Terduga	9,090,015,624	2,511,104,082	27.62
29	BELANJA TRANSFER	471,608,934,099	463,414,337,318	98.26
30	Belanja Bagi Hasil	50,089,060,001	45,321,914,164	90.48
31	Belanja Bantuan Keuangan	421,519,874,098	418,092,423,154	99.19
32	SURPLUS/(DEFISIT)	(217,614,994,693)	(112,288,898,104)	51.60
33	PEMBIAYAAN DAERAH	217,614,994,693	177,494,441,286	81.56
34	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	279,614,994,693	232,657,933,693	83.21
35	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84,793,235,771	84,793,235,771	100.00
36	Penerimaan Pinjaman Daerah	194,821,758,922	147,864,697,922	75.90
37	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62,000,000,000	55,163,492,407	88.97
38	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000	9,999,998,915	100.00
39	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	52,000,000,000	45,163,493,492	86.85
40	PEMBIAYAAN NETTO	217,614,994,693	177,494,441,286	81.56
41	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	-	65,205,543,182	100.00

Sumber: BPKD Bandung Barat tahun 2022 (* data masih dalam audit BPK)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan tahun sebelumnya dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan tahun 2022. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bandung Barat mencakup kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja daerah serta pembiayaan. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dapat disimpulkan rata-rata realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 91,84 % dengan interpretasi baik. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 86,94 % mengalami kenaikan sebesar 4,9 %.

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari mulai perencanaan, penganggaran, sampai capaian pelaksanaannya. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada indikator-indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan indikator kinerja tersebut membutuhkan sistem yang kuat dalam pengendalian pelaksanaan anggaran, juga perlu adanya peningkatan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat.

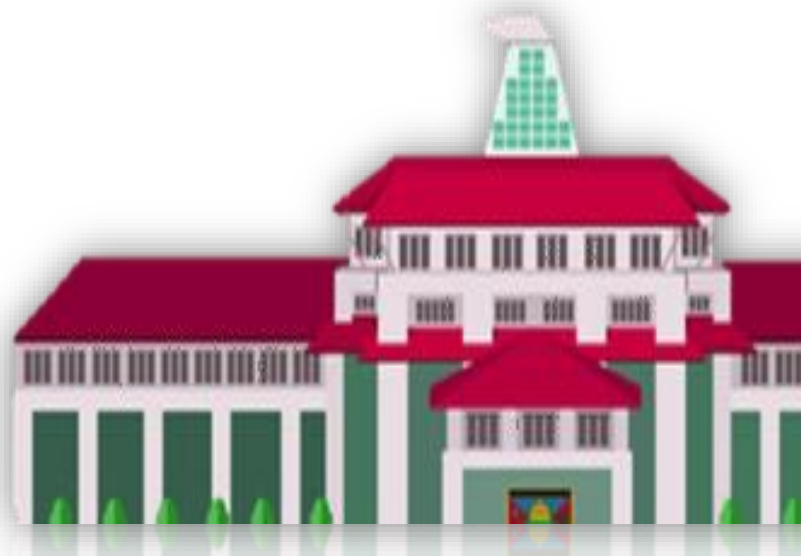
Dari 20 sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh **sebanyak 14 sasaran dinyatakan “berhasil”, 6 sasaran dinyatakan “tidak berhasil”** dengan kondisi 1 (satu) indikator belum memiliki hasil capaian realisasi (N/A) dikarenakan masih dalam proses penghitungan. Rata-rata capaian indikator berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada capaian tahun 2022 dinyatakan “berhasil” jika capaiannya $\geq 85\%$ dari target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung capaian sasaran tahun 2022 tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 5.674.794.053.542,00 atau **91,84%** dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.179.021.871.131,00. Upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut ialah dalam penyusunan dokumen

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi secara simultan telah dilakukan kajian dan reviu yang lebih mendalam terutama terhadap program-program kegiatan agar sesuai dengan kondisi dan isu strategis yang ada, sehingga upaya-upaya yang dilakukan serta sumber daya yang menjadi input terlaksana sesuai harapan dan target yang diinginkan. Selain itu, perlu penguatan kembali terhadap komitmen dan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan daerah baik secara internal maupun pendampingan atau asistensi lembaga-lembaga terkait.

Kendala dan permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai tujuan dan target, di antaranya adalah masih belum optimalnya komitmen dan masih perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta belum memadainya infrastruktur teknologi informasi. Sehingga hal tersebut menjadi fokus perbaikan kinerja kedepannya terutama sebagai upaya dalam mengakomodir kebijakan pusat, di antaranya kebijakan *e-planning*, *e-budgetting*, dan kebijakan terkait lainnya, yang saat ini sedang berproses.

Pada fase tahun anggaran 2022 ini merupakan periode tahun ke empat RPJMD 2018–2023. Harapannya melalui proses penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan lebih komprehensif berdasarkan hasil evaluasi dan Reviu RPJMD dan arah kebijakan serta indikator lebih berorientasi hasil di periode kedepan manajemen SAKIP dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja lebih baik lagi.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENGKI KURNIAWAN
Jabatan : BUPATI BANDUNG BARAT

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung Barat, 19 Januari 2023

BUPATI BANDUNG BARAT

HENGKI KURNIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas					
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	Indeks pendidikan	Skala	74,21
2	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah	32.400
3	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	3	Indeks Kesehatan	Indeks	80,07
		4	Total Fertility Rate	%	2,42
4	Mewujudkan ketahanan pangan	5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	82,5
5	Meningkatnya Pengembangan objek pemajuan kebudayaan	6	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	32
6	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100
		8	Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks	80
7	Meningkatkan sinergi dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang
8	Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	10	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	54,57
		11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	73
		12	Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	Skala	73,79-74,78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
9	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga kemasyarakatan	13	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	100
		14	Persentase Desa Mandiri	%	27
10	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	15	Persentase Layanan Kepemudaan	%	10,30
		16	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,299-0,799
11	Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak	17	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,11
		18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79,44
		19	Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Madya
Misi 2 : Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing					
12	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	20	Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	7,81
		21	Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	4
		22	Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	%	5
		23	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	8,45
		24	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	10,89
		25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.125.000
		26	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata	%	10
13	Meningkatkan Investasi PMDN	27	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	600

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		28	Jumlah Investor PMDN	Perusahaan	200
14	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada	29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,77
		30	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	%	100
15	Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro wirausaha dan ekonomi kreatif	31	Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	28
		32	Pertumbuhan Wirausaha Baru	Pelaku Usaha	150
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi					
16	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di pedesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan	33	Indeks Kesulitan Geografis	Skala	32,22
17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial	34	Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	%	65,42
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	35	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	47,2
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi					
19	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	36	Indeks Merit	Indeks	Kategori IV
		37	Nilai SAKIP	Nilai Mutu	A
		38	Opini BPK	Skor	WTP
		39	Indeks SPBE	Skala	3
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	40	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,23

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,139,449,329,896
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	387,584,789,265
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	285,057,562,660
4	urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	22,635,934,803
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentaraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	34,890,688,732
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	13,251,695,719
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	9,881,289,453
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,763,094,400
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	20,397,546,557
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1,036,384,753
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	38,433,114,418
112	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17,866,967,048
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18,459,359,516
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33,224,894,021
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	55,655,552,630
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	24,239,067,962
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12,721,121,497
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	14,083,057,877
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29,637,772,835
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	453,547,150
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	258,931,250
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3,410,811,932
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	6,562,804,300

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	7,329,441,887
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	25,677,973,587
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	14,046,240,932
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	35,805,219,138
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	4,280,934,638
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	26,238,761,269
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	17,500,000
31	Sekretariat Daerah	109,812,979,619
32	Sekretariat DPRD	94,126,099,849
33	Perencanaan	18,123,697,321
34	Keuangan	690,734,657,743
35	Kepegawaian	22,382,274,057
36	Pendidikan dan Pelatihan	1,981,615,400
37	Penelitian dan Pengembangan	1,660,615,000
38	Inspektorat Daerah	19,786,367,574
39	Kecamatan	98,282,841,522
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	23,596,108,963
JUMLAH		3,364,838,647,173

Bandung Barat, 19 Januari 2023

BUPATI BANDUNG BARAT


A. HENGKI KURNIAWAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	2020	2021	CAPAIAN 2022			AKHIR RPJMD 2023		Kategori	Capaian		
								TARGET 2022	REALISASI	%	TARGET	%	% > 85	Sasaran		
1	Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	1 Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan	1 Indeks pendidikan	Indeks	DISDIK	60,27	60,33	72,84	60,42	82,95	74,21	81,42	Tidak Berhasil	82,95		
		2 Meningkatkan Minat Budaya Baca	2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah	DISARPUS	13256	5331	28.800	10936	37,97	32.400	33,75	Tidak Berhasil	37,97		
2	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	3 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan	3 Indeks kesehatan	Indeks	DINKES	80,52	80,80	80,04	81,22	101,47	80,07	101,44	Berhasil	104,65		
			4 Total Fertility Rate	%	DP2KBP3A	2,39	2,43	2,43	2,24	107,82	2,42	92,56	Berhasil			
3	Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Non Dasar Lainnya	4 Terwujudnya ketahanan pangan	5 Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi	Skor	DKPP	76,8	79,10	82	76,80	93,66	82,5	93,09	Berhasil	93,66		
		5 Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	DISPARBUD	-53	40,00	32	17,00	53,13	32,00	53,13	Tidak Berhasil		53,13	
		6 Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7 Presentase Penegakan Perda dan Perkada	%	SATPOL PP	74,96	97,91	100	100,00	100,00	100	100,00	Berhasil	93,9		
			8 Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks	DISDAMKAR	N/a	54,00	77	67,53	87,70	80	84,41	Berhasil			
		7 Meningkatkan Sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	9 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	BPBD	Sedang (0,51)	Sedang (0,52)	0,53	0,47	89	Sedang	100	Berhasil	89		
		8 Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	10 Persentase Angka PPKS yang Tertangani	%	DINSOS	51,1	52,14	53,36	47,56	89,13	54,57	87,15	Berhasil	90,15		
			11 Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skala	KESBANGPOL	58,33	81,20	72	83,59	116,10	73	114,51	Berhasil			
			12 Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	Skala	KESBANGPOL	32	34,00	80	52,18	65,23	100	52,18	Tidak Berhasil			
		4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	9 Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat	13 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	DPMD	73,51	82,34	91,17	91,82	100,71	100	91,82	Berhasil	128,65
					14 Persentase Desa Mandiri	%	DPMD	16,97	24,00	24	37,58	156,58	27	139,19	Berhasil	
10 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	15 Presentase Layanan Kepemudaan			%	DISPORA	N/a	9,20	7,83	7,83	100,00	10,3	76,02	Berhasil	92,08		
	16 Indeks Pembangunan Olahraga			Indeks	DISPORA	N/a	0,41	0,499	0,42	84,17	0,499	84,17	Tidak Berhasil			
11 Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak	17 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Indeks	DP2KBP3A	65,4	N/a	64,31	65,83	102,36	65,11	0,00	Berhasil	67,71		
	18 Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	DP2KBP3A	79,06	79,07	79,09	79,69	100,76	79,44	100,31	Berhasil			
	19 Kabupaten/Kota Layak Anak			Predikat	DP2KBP3A	Non Kategori	Non Kategori	Pratama	Non Kategori	0,00	Madya	0,00	Tidak Berhasil			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	2020	2021	CAPAIAN 2022			AKHIR RPJMD 2023		Kategori	Capaian Sasaran
								TARGET 2022	REALISASI	%	TARGET	%		
5	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	12 Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	20 Pertumbuhan sektor pertanian	%	DKPP	-2,39	-1,03	7,65	-1,03	-13,46%	7,81	-13,19	Tidak Berhasil	132,34
			21 Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	DISPERNAKAN	3,5	4,10	4	-32,00	-800,00	4	-800,00	Tidak Berhasil	
			22 Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	%	DISPERNAKAN	4,27	4,33	5	5,80	116,00	5	116,00	Berhasil	
			23 Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	DISPERINDAG	7,82	8,37	8,28	8,01	96,74	8,45	94,79	Berhasil	
			24 Pertumbuhan sektor perdagangan	%	DISPERINDAG	9,43	9,97	10,67	9,21	86,32	10,89	84,57	Berhasil	
			25 Jumlah Kunjungan Wisatawan	jiwa	DISPARBUD	4.064.126	4.497.692	2.125.000	5.045.679	237,44	2.125.000	237,44	Berhasil	
			26 Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata	%	DISPARBUD	-45	18,00	10	119	1190	10	1190	Berhasil	
		13 Meningkatkan investasi PMDN	27 Nilai Investasi PMDN	Rupiah	DPMPTSP	Rp335.675.465.966	Rp253.778.400.013	Rp550.000.000.000	Rp704.358.400.000	128,07	Rp600.000.000.000	117,39	Berhasil	81,47
			28 Jumlah Investor PMDN	Jumlah	DPMPTSP	241	131	195	68	34,87	200	34,00	Tidak Berhasil	
		14 Meningkatkan partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada	29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	DISNAKER	59,91	60,75	71,75	61,23	85,34	73,77	83,00	Berhasil	92,67
			30 Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	%	DISNAKER	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	Berhasil	
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial	16 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan	31 Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	DISKOP UKM	190	18	25	20	80,00	28	71,43	Tidak Berhasil	99,60
			32 Penumbuhan Wirausaha Baru	Pelaku Usaha	DISKOP UKM	75	213	125	149	119,20	150	99,33	Berhasil	
		17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial	33 Indeks Kesulitan Geografis	Skala	DPUPR, DISHUB	N/a	27,59	33,82	26,78	120,82	32,22	116,88	Berhasil	120,82
			34 Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	%	DISPERKIM, DPUTR, DLH	N/a	111,00	63,67	N/a	0,00	65,42	0,00	Tidak Berhasil	0,00
			35 Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	DLH	47,07	50,27	47,15	63,03	133,68	47,2	133,54	Berhasil	133,68
8	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	19 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	36 Indeks Merit	Indeks	BKPSDM	Kategori III (251)	Kategori III (282.5)	Kategori III (250-324)	Kategori III (288)	100	Kategori IV	100,00	Berhasil	98,79
			37 Nilai SAKIP	Nilai Mutu	SETDA, ITDA, BAPPELITBANGDA	B (67,4)	B (67,55)	70,01	68,03	97,17	A(80)	74,49	Berhasil	
			38 Opini BPK	Skor	BPKAD, ITDA, BAPPENDA	WTP	WDP	WTP	WTP	100	WTP	85	Berhasil	
			39 Indeks SPBE	Skala	DISKOMINFOTIK, DISARPUS, SETDA	3,17	2,85	2,81	2,65	94,31	3	88,33	Berhasil	
9	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	20 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	40 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	SETDA	80,29	80,75	80,23	82,22	102,48	81,23	101,22	Berhasil	102,48

**PENGHARGAAN / PRESTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022**

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT NASIONAL/PROVINSI /KOTA/KABUPATEN	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan USG dan Pembagian telur kepada Ibu Hamil Terbanyak	Nasional	DINKES
2.	Penghargaan sebagai "Pemenang Katagori Inspiratif" pada Pameran APKASI OTONOMI EXPO 2022	Nasional	DPMPTSP
3.	Penyelenggara Pelayanan Prima dengan katagori A dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.	Nasional	DPMPTSP
4.	Medali emas penghargaan dengan predikat A plus di bidang Bahasa Indonesia atas prestaisnya pada Ajang Olimpiade Tingkat Nasional	Nasional	Olimpiade Tingkat Nasional
5.	Kompetensi IPA Tingkat Nasional 2022 jenjang SMP/Mts sederajat sebagai peraih Medali Perak dan Olimpiade Sains Indonesia (POSI) atas prestasinya dengan meraih medali perunggu pada bidang IPA jenjang SMP/Mts	Nasional	Challenge Science Competition (CSCO) Tahun 2022
6.	Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7.	Penghargaan Dharma Karya Kencana Dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8.	Penghargaan Adiwiyata Nasional	Nasional	SMPN 1 Parongpong dan SMPN 1 Cisarua

9.	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tk Kabupaten/ Kota Berhasil dalam Pembinaan Komitmen Keamanan Pangan	Nasional	2022
10.	Kontribusi Peningkatan Produksi Tanaman Hias Daun Nasional	Nasional	Rijki Subagja (Cv Berkah Bunga Abadi)
11.	Petani Milenial Inovatif Bidang Produksi Paprika	Nasional	Muhammad Ramdlani Husni
12.	inovasi MANIK (Majalah Dinding Elektronik) dan mendapatkan peringkat 10 besar	Provinsi	Disdik
13.	Juara Bina 2 LKBB Pada Lomba Paskibra	Provinsi	Disdik
14.	Juara harapan 3 putra dengan lomba aksara sunda	Provinsi	Disdik
15.	Juara Ke 2 Lomba Maca Sajak	Provinsi	Disdik
16.	prestasinya sebagai Pengelola Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) jenjang Sekolah Menengah Pertama	Provinsi	Disdik
17.	Peringkat 1 BKN AWARD Tahun 2022 Kategori Ketaatan, Norma, Standar, Prosedur, dan Manajemen ASN	Provinsi	BKPSDM
18.	Peringkat 2 BKN AWARD Tahun 2022 Kategori Pemutakhiran Data ASN	Provinsi	BKPSDM
19.	Implementasi Manajemen ASN Tingkat Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat	Provinsi	BKPSDM
20.	Terbaik II Lomba Kampung KB Kategori Kabupaten Tingkat Provinsi Jawa Barat	Provinsi	Kampung KB Cempaka Ramah Anak Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah
21.	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Kabupaten dengan Capaian peserta pelayanan KB 100% pada kegiatan Pelayanan KB	Provinsi	DP2 KBP3A

	Serentak dalam rangkaian Hari Keluarga Tingkat Nasional		
22.	Juara Pengelola Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik	Provinsi	Disdik
23.	Juara 1 Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna tingkat Provinsi Jawa Barat	Provinsi	SMPN 2 Ngamprah
24.	Juara Harapan 1 Siaga Kependudukan Paripurna tingkat Provinsi Jawa Barat		SMPN 3 Parongpong
25.	Juara Harapan 3 Siaga Kependudukan Paripurna tingkat Provinsi Jawa Barat	Provinsi	SMPN 3 Cipeundeuy
26.	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2022	Provinsi	SMPN 4 Cikalong Wetan
27.	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2022	Provinsi	12 Sekolah yang lolos penilaian sekolah adwiyata tingkat kabupaten tahun 2022
28.	Lomba Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Berprestasi Katagori Penyuluh PNS Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Peringkat 2	Provinsi	Wiwin Darwin, S.ST
29.	Lomba Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Berprestasi Katagori Gapoktan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Peringkat 2	Provinsi	Gapoktan Karya Tani
30.	Ekspor kopi "Halu Mountain Coffee" ke Netherland 1.5 ton; Turki 1 ton; Bahrain 600 kg; USA 6 ton oleh Kelompok tani Halu Farm Desa Mekarwangi	Provinsi	Kecamatan Sindangkerta
31.	Juara 1 Cooking competition Tingkat provinsi Jawa Barat Kategori PKK	Provinsi	DP2 KBP3A
32.	Petani Milenial Dalam Program Petani Milenial	Provinsi	Rijki Subagja
33.	Enumerator Terbaik kedua Tk. Propinsi	Provinsi	Dini Rayatiningrum,S.E

34.	Inovasi system Monitoring ANN Rest Time (SMART) sebagai Juara III pada Komptensi inovasi perangkat daerah kabupaten bandung barat tahun 2022	Provinsi	BPBD
35.	Juara I Lomba Penyusunan Kaji Cepat Kejadian Bencana dalam Rangka Ulang Tahun (HUT) BPBD Provinsi Jawa Barat Ke 13 Tahun 2022	Provinsi	BPBD
36.	Pemerintah Kabupaten yang Aktif Mendorong Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Provinsi	DINSOS
37.	3 Medali Emas, 7 Perak, dan 6 Perunggu olahraga Tradisional dan kreasi Budaya (OTKB)	Provinsi	DISPORA
38.	2 Medali Emas, 2 Perak dan 3 Perunggu Olahraga Petualangan dan Tantangan (OPT)	Provinsi	DISPORA
39.	2 Medali Emas Olahraga Kesehatan dan Kebugaran	Provinsi	DISPORA
40.	88 Perolehan Medali PKAN Paralimpik Daerah VI Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	Provinsi	DISPORA
41.	88 Atlet peraih medali pada PEPARDA Jabar Tahun 2022	Provinsi	DISPORA
42.	642 Perolehan medali pekan olahraga provinsi XIV Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	Provinsi	DISPORA



KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(UNAUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6	5
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.2.1	2.980.703.438.219	2.781.252.577.719	93,31	2.804.253.404.555
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.2.1.1	740.926.947.093	667.243.725.925	90,06	540.783.936.035
3	Pajak Daerah	5.1.2.1.1.1	480.000.000.000	495.814.400.587	103,29	375.265.784.971
4	Retribusi Daerah	5.1.2.1.1.2	21.341.968.392	15.099.253.355	70,75	17.073.496.576
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.2.1.1.3	989.684.042	1.253.070.525	126,61	653.894.651
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.2.1.1.4	238.595.294.659	155.077.001.458	65,00	147.790.759.837
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2.1.2	2.239.776.491.126	1.929.331.252.543	86,14	2.074.746.679.520
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.1.2.1	1.934.184.190.171	1.637.296.424.922	84,65	1.804.538.931.386
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.2.1.2.2	305.592.300.955	292.034.827.621	95,56	270.207.748.134
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.2.1.3	-	184.677.599.251	100,00	188.722.789.000
11	Pendapatan Hibah				-	-
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	184.677.599.251	100,00	188.722.789.000
13	BELANJA DAERAH	5.1.2.2	3.198.318.432.912	2.893.541.475.823	90,47	2.917.749.150.862
14	BELANJA OPERASI	5.1.2.2.1	2.311.858.162.809	2.086.070.172.818	90,23	2.128.381.840.567
15	Belanja Pegawai	5.1.2.2.1.1	1.217.760.026.253	1.126.247.524.223	92,49	1.140.660.223.059
16	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.2.1.2	977.209.697.850	880.687.593.731	90,12	918.292.891.347
17	Belanja Bunga	5.1.2.2.1.3	11.025.600.000	10.303.550.991	93,45	723.711.188
18	Belanja Hibah	5.1.2.2.1.4	94.412.976.451	62.369.036.473	66,06	65.485.210.973
19	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.2.1.5	11.449.862.255	6.462.467.400	56,44	3.219.804.000
20	BELANJA MODAL	5.1.2.3	405.761.320.380	341.545.861.605	84,17	346.128.576.027
21	Belanja Modal Tanah	5.1.2.3.1		-	-	11.193.228.000
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.3.2	105.276.225.240	97.105.705.629	92,24	134.040.385.765
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.3.3	56.863.377.816	52.174.354.880	91,75	71.983.011.084
24	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.3.4	226.585.975.882	177.473.377.906	78,32	101.033.415.866
25	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.3.5	16.064.661.352	14.098.540.479	87,76	27.700.975.312
26	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.3.6	971.080.090	693.882.711	71,45	177.560.000
27	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.4	9.090.015.624	2.511.104.082	27,62	8.328.012.910
28	Belanja Tidak Terduga		9.090.015.624	2.511.104.082	27,62	8.328.012.910
29	BELANJA TRANSFER	5.1.2.5	471.608.934.099	463.414.337.318	98,26	434.910.721.359
30	Belanja Bagi Hasil		50.089.060.001	45.321.914.164	90,48	40.579.431.776
31	Belanja Bantuan Keuangan		421.519.874.098	418.092.423.154	99,19	394.331.289.583
32	SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.2.6	(217.614.994.693)	(112.288.898.104)	51,60	(113.495.746.307)
33	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.2.7	217.614.994.693	177.494.441.286	81,56	198.288.982.078
34	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		279.614.994.693	232.657.933.693	83,21	198.288.982.078
35	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		84.793.235.771	84.793.235.771	100,00	124.439.894.438
36	Penerimaan Pinjaman Daerah		194.821.758.922	147.864.697.922	75,90	73.849.087.640
37	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		62.000.000.000	55.163.492.407	88,97	-
38	Penyertaan Modal Daerah		10.000.000.000	9.999.998.915	100,00	
39	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		52.000.000.000	45.163.493.492	86,85	
40	PEMBIAYAAN NETTO		217.614.994.693	177.494.441.286	81,56	198.288.982.078
41	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.2.8	-	65.205.543.182	100,00	84.793.235.771

Bandung Barat, Maret 2023



BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep.264-Bag.Orgs/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

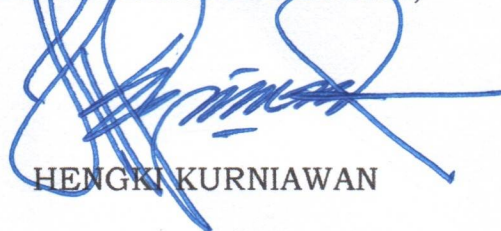
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

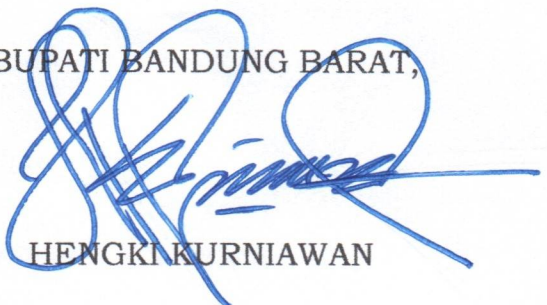


HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 264-Bag.Orgs/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
- Penanggung jawab : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- Ketua : Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : Vivi Noviani, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- Anggota : 1. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
2. Siti Nur Komala Dewi, S.IP., M.Si, Fungsional Analais Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan;
3. Ellam Muhammad Aminuddin, SE, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Surasa, S.HI , Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Farianto, S.Kom.,M.A.P, Analis Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Operator : Para Pejabat Pengelola SAKIP pada masing-masing Perangkat Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.264-Bag.Orgs/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN
2023

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

a. TUGAS POKOK

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023.

b. FUNGSI

1. Pengumpulan LAKIP dari setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pengoordinasian Penyusunan LAKIP;
3. Pengevaluasian dan pelaporan LAKIP kepada Ketua Tim;
4. Pelaporan LAKIP Kabupaten Bandung Barat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

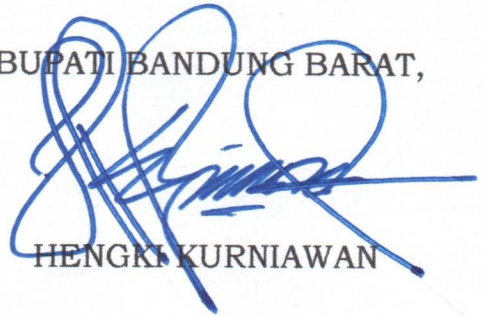
c. RINCIAN TUGAS

1. Pengarah
 - a. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim;
 - b. Menetapkan rencana kegiatan Tim.
2. Penanggungjawab
 - a. Menyelenggarakan pengawasan dan pengkoordinasian tugas tim dengan pihak terkait;
 - b. Melaporkan rumusan rencana dan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada pengarah.
3. Ketua
 - a. Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan;
 - b. Mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan anggota;
 - c. Mengevaluasi kegiatan anggota;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.
4. Sekretaris
 - a. Menyusun jadwal kegiatan Tim;
 - b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan;
 - c. Menyusun materi risalah rapat pembahasan;
 - d. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim;
 - e. Menyediakan fasilitas kegiatan Tim;
 - f. Melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua.
5. Anggota
 - a. Melaksanakan penyusunan LAKIP;
 - b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Melaporkan progress pelaksanaan penyusunan LAKIP kepada Ketua Tim.

6. Operator

- a. Menginput data SAKIP pada aplikasi E-Sakip Reviu (ESR);
- b. Menginput, mengolah dan mengelola data kinerja masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi e-porja.

BUPATI BANDUNG BARAT,



HENGKI KURNIAWAN



Ubah Slogan Menjadi Tindakan



Tahun
2022

